

ANDRAGOGI

JURNAL PENDIDIKAN ORANG DEWASA

FENOMENA HIDUP MEWAH (HEDONISME & FLEXING) PARA APARATUR SIPIL NEGARA



MUHAMMAD FACHRI

**KAJIAN FEAR OF MISSING OUT (FOMO),
TEORI GENERASI, DAN LOCUS OF CONTROL
TERHADAP KECENDERUNGAN POLA
HIDUP MEWAH PADA ASN DI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**

RAKHMAD KAVIN

**GAYA HIDUP MEWAH (HEDONISME)
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) ANTARA
FENOMENA, PENDAPATAN DAN ETIKA**

M. DENNY ELYASA

**ANALISIS FLEXING DAN HEDONISME:
MEMBENTUK CITRA NEGATIF ASN
DI MEDIA SOSIAL**

LADIASARI

**KAITAN 7 CORE VALUE "BerAKHLAK"
DENGAN PERILAKU GAYA HIDUP HEDONISME
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TAHUN 2023**

IMAM KUSNADI

**FENOMENA FLEXING HARTA MEWAH DI KALANGAN
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN IMPLIKASINYA**

RIA ANGGRENI

**BIJAK BERMEDSOS MEMINIMALISASI
ASN FLEXING**

ANDRAGOGI

Jurnal Pendidikan Orang Dewasa

Volume 11, Nomor 1, 2023
P-ISSN: 2303-0496, E-ISSN: 2809-7963

PENGARAH:

Sekretaris Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PENANGGUNG JAWAB:

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

REDAKTUR:

Kepala Bidang Pengembangan SDM
BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

MITRA BESTARI:

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
Ahmad Yani, S.E., M.Si., Ph.D
Dr. Muslim El Hakim Kurniawan, S.T., M.M
Nanang Wahyudin, S.E., M.M

TIM EDITOR:

Dr. Yan Megawandi, S.H., M.Si
Dr. Slamet Wahyudi, S.Pd., M.Si
Yudi Suhasri, S.Sos

SEKRETARIAT/WEB ADMIN:

Irfandi Lesmana, S.Pd.I., S.A.P
Gigih Ibnu Prayoga, S.P., M.P
Dadang Kurnia, S.T.

DESAIN GRAFIS:

Erman Arif, S.T.

FOTOGRAFER:

Adhitya Liansyah Putra

ALAMAT REDAKSI:

BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka, Air Itam – Pangkalpinang 33149
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Website: bkpsdmd.babelprov.go.id
e-mail: pengembangansdm@babelprov.go.id

Catatan:

Redaksi menerima artikel ilmiah dari Seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Naskah merupakan hasil penelitian, kajian maupun pemikiran kritis terhadap isu-isu di bidang administrasi publik/pemerintahan atau menyesuaikan dengan tema berkala, asli dan belum pernah diterbitkan di jurnal ataupun majalah lain. Penulisan naskah harus relevan dengan *scope issue* yang terkait dengan **“FENOMENA HIDUP MEWAH (HEDONISME DAN FLEXING) PARA APARATUR SIPIL NEGARA”**. Naskah harus relevan dengan ketentuan *template* dan *author guidelines* yang telah ditetapkan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tim Sekretariat Jurnal Andragogi.

*Rangkai Teratur Si Kembang Cendana
Harum Sungguh Berpadu Kembang Seroja
Jadilah Aparatur Kompeten Primadona
Tingkatkan Syukur Dengan Hidup Bersahaja*

SAMBUTAN



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya, Jurnal Andragogi Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023 dapat kembali terbit guna memberikan wawasan kepada seluruh pembaca khususnya para Aparatur Sipil Negara baik di pusat maupun di daerah.

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di sebuah negara. Mereka bertugas dalam menjalankan kegiatan administratif dan eksekutif, serta memiliki peran penting dalam melayani masyarakat.

Tanggung jawab moral dan etika yang tinggi dalam menjalankan tugas negara sangat diperlukan menjadi bagian dari seorang aparatur sebagai pelayan publik. Namun fenomena hidup mewah di kalangan Aparatur Sipil Negara kian sering terlihat dewasa ini. Kehidupan yang mewah sering kali diperlihatkan dan menimbulkan pertanyaan etis terkait tanggung jawab mereka sebagai pemegang amanah rakyat.

Banyak Aparatur Sipil Negara terlibat dalam gaya hidup yang didasarkan pada pencarian kesenangan, terlihat dari aktivitas konsumtif berlebihan seperti liburan mewah, klub malam, atau gaya hidup yang sangat terpapar dengan barang-barang mahal. ASN juga seringkali terlihat memamerkan kekayaan mereka melalui kendaraan mewah, rumah besar, dan konsumsi berlebihan lainnya, yang terkadang tidak sejalan dengan penghasilan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal inilah yang kemudian menginspirasi kami untuk mengusung tema “Fenomena Hidup Mewah (Hedonisme dan *Flexing*) Para Aparatur Sipil Negara” dalam publikasi Jurnal Andragogi Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023.

Kami berharap melalui publikasi jurnal ini dapat menjadi media bagi pemikiran, gagasan dan ide baik, sehingga memberikan pembelajaran dan inspirasi bagi kita dalam upaya menciptakan Indonesia Emas di tahun 2045. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Dra. SUSANTI, M.AP

SALAM REDAKSI

Dear Pembaca,

Jurnal Andragogi merupakan publikasi jurnal terbuka bagi seluruh pegawai ASN pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, publikasi Jurnal Andragogi dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki *focus* dan *scope* terkait Pemerintahan. Edisi kali ini menampilkan beberapa artikel membahas tentang fenomena hidup mewah di kalangan Aparatur Sipil Negara. Banyak kajian dan gagasan baik yang dapat kita pelajari dari Jurnal Andragogi pada terbitan Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023.

Melalui tulisannya, penulis **Muhammad Fachri** memberikan gagasan terkait pencegahan perilaku hidup mewah dikalangan ASN melalui kontrol masyarakat dan media massa terhadap perilaku ASN serta penegakan disiplin atas pelanggaran kode etik. Gagasan ini tertuang di dalam tulisan yang berjudul Kajian *Fear of Missing Out (FoMO)*, Teori Generasi, dan *Locus of Control* Terhadap Kecenderungan Pola Hidup Mewah Pada ASN Di Kepulauan Bangka Belitung

Penulis **M. Denny Elyasa** menaruh perhatiannya pada pentingnya bijak di dalam penggunaan media sosial sebagai ruang digital publik yang harus dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya tanpa meninggalkan etika, norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Penyampaian beberapa faktor yang menyebabkan seorang melakukan *flexing* dan hedonisme juga disampaikan penulis pada tulisannya. Hal yang sama pun diulas oleh **Ria Anggreni** melalui sebuah tulisan yang berjudul “Bijak Bermedia Sosial Meminimalisasi ASN *Flexing*”.

Penulis **Rakhmad Kavin** membahas tentang gaya hidup mewah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari sudut pandang fenomena, pendapatan, etika dan kepemimpinan. Penulis beranggapan bahwa adanya keterkaitan antara pendapatan, etika dan kepemimpinan di dalam fenomena perilaku hidup mewah yang banyak dilakukan oleh kalangan Aparatur Sipil Negara.

Ulasan lebih lanjut dituliskan oleh **Imam Kusnadi** untuk mendalami fenomena *flexing* atau perilaku pamer kekayaan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menganalisis implikasinya terhadap integritas, etika, serta citra lembaga pemerintah.

Bagaimana keterkaitan *Core Values* “BerAKHLAK” yang merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif terhadap perilaku gaya hidup mewah di kalangan Aparatur Sipil Negara yang dewasa ini sering ditampilkan menjadi ulasan yang diangkat oleh **Ladiasari**.

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para penulis, mitra bestari dan seluruh pengelola Jurnal Andragogi, serta banyak pihak yang telah terlibat di dalam penerbitan ini. Besar harapan, semoga jurnal ini dapat menjadi rujukan guna menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam hal pengelolaan dan publikasi. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca guna menyempurnakan publikasi jurnal pada edisi yang akan datang.

Redaktur Jurnal Andragogi

DAFTAR ISI

TIM REDAKSI	i
PANTUN	ii
SAMBUTAN	iii
SALAM REDAKSI	iv
DAFTAR ISI	v
KAJIAN <i>FEAR OF MISSING (FoMO)</i>, TEORI GENERASI, DAN <i>LOCUS OF CONTROL</i> TERHADAP KECENDERUNGAN POLA HIDUP MEWAH PADA ASN DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
<i>Muhammad Fachri</i>	1 - 14
ANALISIS <i>FLEXING</i> DAN HEDONISME: MEMBENTUK CITRA NEGATIF ASN DI MEDIA SOSIAL	
<i>M. Denny Elyasa</i>	15 - 26
GAYA HIDUP MEWAH (HEDONISME) APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) ANTARA FENOMENA, PENDAPATAN DAN ETIKA	
<i>Rakhmad Kavim</i>	27 – 37
FENOMENA <i>FLEXING</i> HARTA MEWAH DI KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN IMPLIKASINYA	
<i>Imam Kusnadi</i>	38 - 50
KAITAN 7 <i>CORE VALUE</i> “BerAKHLAK” DENGAN PERILAKU GAYA HIDUP HEDONISME APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TAHUN 2023	
<i>Ladiasari</i>	51 - 63
BIJAK BERMEDSOS MEMINIMALISASI ASN <i>FLEXING</i>	
<i>Ria Anggreni</i>	64 - 72

KAJIAN *FEAR OF MISSING OUT (FoMO)*, TEORI GENERASI, DAN *LOCUS OF CONTROL* TERHADAP KECENDERONGAN POLA HIDUP MEWAH PADA ASN DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

(*Study of Fear of Missing Out (FoMO), Generational Theory and Locus of Control on Luxurious Lifestyle Tendency of Civil Servant in Bangka Belitung Island*)

Muhammad Fachri

(Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Kep.Bangka Belitung)

e-mail: muhammadfachri.mf@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis *Fear of Missing Out (FoMO)*, Teori Generasi dan *Locus of Control* terhadap kecenderungan hidup mewah pada ASN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, sampel penelitian ini berjumlah 108 responden ASN yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bulan Agustus – September 2023. Teknik pengambilan sampel dengan *non-probability sampling* dan metode penentuan sampel dengan *purposive sampling*. Adapun analisis data dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji T, Uji F dan regresi linier berganda dengan instrument bantu SPSS versi 22. Adapun hasil penelitian terdapat pengaruh *Fear of Missing Out (FoMO)*, Teori Generasi dan *Locus of Control* terhadap kecenderungan hidup mewah pada ASN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, FoMO, Hidup Mewah, *Locus of Control*, Teori Generasi.

ABSTRACT

The aim of this research are to analyze Fear of Missing Out (FoMO), Generation Theory and Locus of Control on the luxuriously lifestyle tendency of Civil Servant in the Bangka Belitung Islands Province. This research used quantitative research, with research sample consisted of 108 civil servant respondents spread across 7 Re gencies/Cities and the Bangka Belitung Islands Province in August – September 2023. The sampling technique was non-probability sampling and the sample determination method was purposive sampling. The data analysis uses validity tests, reliability tests, T tests, F tests and multiple linear regression with SPSS version 22 as the auxiliary instrument. The results of this research are there is an affect of Fear of Missing Out (FoMO), Generation Theory and Locus of Control on luxury lifestyle tendencies for Civil Servant in the Bangka Belitung Islands Province.

Keywords: Civil Servant, FoMO, Locus of Control, Luxury Lifestyle, Generation Theory.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi pada zaman modernisasi dan globalisasi saat ini memberikan kemudahan dalam mengakses segala informasi. Hampir semua tingkatan usia menggunakan teknologi informasi seperti media sosial (*Tiktok, Facebook, X, Whatsapp dan Instagram*) yang dapat menyebabkan ketergantungan akan kepraktisan dalam mendukung kehidupannya. Menurut Data Badan Pusat Statistik (2022), pada tahun 2020-2022, akses *internet* sudah dilakukan oleh penduduk dengan usia 5 tahun ke atas. Kemudahan ini tidak hanya memberikan dampak positif melainkan juga menimbulkan dampak negatif seperti pola hidup mewah (*hedonisme*).

Pada dasarnya, pola hidup mewah atau paham *hedonisme* sudah ada sejak lama dan menurut Filsuf Yunani Epikuros (341-270 SM), perilaku hedonis merupakan kodrat alamiah untuk mencapai kesenangan (Putra, 2021). Menurut Myrilla dan Dewi (2022), kecenderungan hidup mewah atau hedonis diawali dengan adanya sikap FoMO dan *Conformity Consumption Behavior*. Munculnya fenomena sikap FoMO diawali dengan kemudahan akses *internet* sehingga mendorong untuk aktif di media sosial (Nadzirah *et al.*, 2022). Adanya perasaan takut tertinggal dan ingin selalu mengikuti perkembangan zaman (*up to date*) dengan mengakses media sosial seperti *Tiktok, Facebook, X, Whatsapp, Instagram* sehingga orang berlomba-lomba untuk eksis yang akhirnya terjadi kecenderungan pola hidup mewah atau hedonis.

Kecenderungan sikap FoMO terjadi terutama pada generasi milenial dikarenakan generasi ini lahir pada zaman teknologi informasi yang sudah berkembang (Aisafitri dan Yusriyah (2018)). Menurut Madiistriyatno dan Hadiwijaya (2020), generasi milenial merupakan generasi yang lahir pada rentang tahun 1980-1998.

Namun, menurut Aresti *et al.*, (2023),

keinginan untuk selalu *up to date* atau FoMO tidak hanya terjadi pada generasi milenial namun dapat dialami siapa saja termasuk generasi *baby boomer* dan generasi X. Selain itu, menurut Lestari (2021), setiap generasi akan dipengaruhi oleh keadaan sosial internal dan eksternal yang akan mempengaruhi pola pikir dalam menentukan kehidupannya. Menurut Susana (2016), pengendalian dan pematangan pola hidup erat kaitannya dengan *Locus of Control* yang secara internal dipengaruhi oleh internal yaitu keyakinan diri untuk menata hidup sesuai dengan keinginannya dan eksternal yaitu pengaruh normatif, penerimaan kelompok, keluarga dan strata sosialnya (Rotter (1996) dalam Susana (2016)).

Adanya kemajuan teknologi tentu akan merubah pola pikir setiap generasi untuk mencukupi kebutuhan akan informasi agar *up to date* demi mencapai kesenangan terkadang mengesampingkan kebutuhan utama dan cenderung memiliki pola hidup hedonisme sehingga melebihi pemasukan pendapatan. Hal ini menurut Susana (2016), manusia merupakan *homo ludens* yang memiliki sikap dasar ingin bermain dan mencari kesenangan sehingga dapat mencapai sikap hedonisme. Menurut Inriani (2014) dalam Susana (2016), penyimpangan pola pikir hedonis merupakan pergeseran makna sesungguhnya dari kesenangan atau kebahagiaan. Selain itu, pola hidup mewah atau hedonis merupakan pangkal dari korupsi, kolusi dan nepotisme untuk mencapai kebahagiaan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) merupakan penggerak roda pemerintahan dan menjadi pelayan publik tidak seharusnya memiliki pola hidup mewah. Larangan hidup mewah terdapat pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan

Hidup Sederhana poin 2 yaitu “Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepatantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat”.

Pada tahun 2023, masyarakat digegerkan dengan kasus adanya beberapa oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarga yang melakukan pameran harta dan memiliki pola hidup mewah. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 3-5, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Nilai-Nilai *Core Value* ASN BerAKHLAK dan Perwujudan Perilaku Insan BKN di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Adanya tindakan yang tidak sesuai dengan marwah ASN menyebabkan dan menghancurkan citra ASN sebagai pelayan masyarakat, merusak Amanah, hati dan kepercayaan pada masyarakat.

Penelitian pola hidup mewah telah banyak dilakukan yang membahas kaitan antara *Fear of Missing Out* dengan generasi milenial (Aisafitri dan Yusriyah, 2018), (Adriansyah *et al.*, 2017)), Christina *et al.*, (2019), hedonis sebagai moderator *Fear of Missing Out* pada remaja (Myrilla dan Dewi (2022), FoMO dapat dialami semua generasi (2023) dan Pengaruh *Locus of Control* terhadap gaya hidup hedonis pada ASN (Susana (2016)), namun dipenelitian yang sudah dilakukan belum dianalisa lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain penyebab kecenderungan pola hidup mewah pada ASN.

Pada penelitian ini dilakukan dengan mengkaji lebih dalam dan kompleks untuk melihat bagaimana korelasi antara teori generasi, *fear of missing out* dan *locus of control* sehingga dapat membentuk sikap kecenderungan pola hidup mewah pada

ASN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kaitan antara *Fear of Missing Out*, teori generasi, *Locus of Control* terhadap kecenderungan pola hidup mewah pada ASN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus - September 2023 menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional dan dirancang menggunakan metode asosiatif. Menurut Sugiyono (2019), penelitian asosiatif mencari hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Adapun dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel yaitu *Fear of Missing Out* (FoMO), teori generasi dan *Locus of Control* (LoC), dikarenakan peneliti ingin melihat hubungan antara ketiga variabel terhadap kecenderungan hidup mewah pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun subjek penelitian adalah Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)) yang berjumlah 108 orang yang bekerja di instansi pemerintah di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan rentang usia 20 – 60 tahun. Menurut Alreck dan Settle (2004), untuk pengambilan sampel pada populasi yang besar disarankan untuk menentukan sampel minimum sebanyak 100 orang. Selain itu, menurut Sugiyono (2019), pengukuran sampel penelitian yang layak dalam suatu penelitian adalah 30 sampai 500 orang. Penyebaran kuesioner dilakukan pada 24 Agustus s.d. 01 September 2023.

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *non-propability sampling* dan metode penentuan sampel dengan *purposive sampling*.

Penelitian ini dilakukan di 7 (tujuh) Kabupaten / Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu variabel independent adalah *Fear of Missing Out* (X₁), Teori Generasi (X₂) dan *Locus of Control* (X₃). Adapun variable dependen adalah kecenderungan pola hidup mewah (Y).

Adapun alat ukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

B.1. Alat Ukur *Fear of Missing Out* (FoMO).

Pengukuran FoMO dilakukan dengan memodifikasi penelitian Myrilla dan Dewi (2022) menggunakan skala likert 1-5. Kuesioner dibuat dalam bentuk digital yang terdiri dari 10 butir unidimensi dengan contoh butir (1) Saya ingin menjadi orang pertama yang mengetahui perkembangan terkini, (2) saya ingin mempublikasi foto pencapaian atau pengalaman, (3) Saya membuka media sosial disela-sela waktu dan sebelum tidur, (4) saya rela menabung dan membeli barang secara langsung pada saat peluncuran dan seterusnya,

Adapun pengukuran skor yaitu dengan semakin tinggi skor semakin mengalami FoMO dan semakin rendah skor tidak mengalami FoMO.

1	Sangat tidak saya rasakan
2	Agak saya rasakan
3	Cukup saya rasakan
4	Saya rasakan
5	Sangat saya rasakan

* Myrilla dan Dewi (2022).

B.2. Alat Ukur Pola Hidup Mewah.

Pengukuran pola hidup mewah dilakukan dengan memodifikasi penelitian Myrilla dan Dewi (2022) menggunakan skala likert 1-5. Adapun substansi

pengukuran pola hidup mewah sesuai dengan Khairat *et al* (2018) meliputi *activity, interest* dan *opinion*.

Kuesioner dibuat dalam bentuk digital yang terdiri dari 10 butir pernyataan dengan contoh butir (1) Saya menyenangi bepergian mengunjungi tempat-tempat baru, (2) saya memikirkan mengoleksi barang-barang yang saya anggap unik, (3) Saya menyenangi tontonan video seperti mengulas otomotif, gawai atau benda lainnya dan seterusnya, Adapun pengukuran skor yaitu dengan semakin tinggi skor semakin mengalami kecenderungan pola hidup mewah dan semakin rendah skor tidak mengalami kecenderungan pola hidup mewah.

1	Sangat Tidak Setuju
2	Agak Setuju
3	Cukup Setuju
4	Setuju
5	Sangat Setuju

* Khairat *et al.*, (2018).

B.3. Alat Ukur *Locus of Control* (LoC).

Pengukuran pola hidup mewah dilakukan dengan memodifikasi penelitian Susana (2017) menggunakan skala likert 1-5. Kuesioner dibuat dalam bentuk digital yang terdiri dari 10 butir pernyataan dengan contoh butir (1) saya bisa memfilter informasi dari media sosial, (2) kehidupan saya tidak bergantung dari pengaruh sosial media, (3) saya berani tampil berbeda dari yang lain, (4) saya memikirkan apa yang akan saya lakukan sebelum bertindak dan seterusnya, Adapun pengukuran skor yaitu dengan semakin tinggi skor semakin dapat mengontrol diri dan semakin rendah skor yaitu control diri cenderung dipengaruhi oleh lingkungan.

1	Sangat Tidak Setuju
2	Agak Setuju
3	Cukup Setuju
4	Setuju
5	Sangat Setuju

* Susana (2017).

Adapun analisis data dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji T, Uji F dan regresi linier berganda dengan *instrument* bantu SPSS versi 22 Tahun 2021.

C. KERANGKA TEORI

3.1. Aparatur Sipil Negara.

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi abdi negara yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dalam profesi ASN berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

- a) Nilai Dasar;
- b) Kode Etik dan Kode Perilaku;
- c) Komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
- d) Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e) Kualifikasi akademik;
- f) Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
- g) Profesionalitas jabatan.

Saat ini sudah terdapat persamaan *Core Value* ASN BerAKHLAK dan *Employer Branding* "Bangga Melayani Bangsa". Hal ini diharapkan dapat menguatkan citra ASN, budaya kerja dan perilaku kerjanya. BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

Dengan telah ditetapkannya hal tersebut, diharapkan ASN dapat menjadi

perekat, pemersatu bangsa serta memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa dan negara serta menjadi contoh tauladan bagi masyarakat.

3.2. *Fear of Missing Out* (FoMO).

Menurut Przybylski *et al.* (2013) dalam Aresti *et al.* (2023), *Fear of Missing Out* (FoMO) merupakan bentuk kekhawatiran dan kecemasan diri sendiri Ketika melihat orang lain memiliki pengalaman yang lebih menarik dan dicirikan dengan adanya keinginan terkoneksi dengan orang lain. Selain itu, FoMO merupakan rasa ingin tampil dan terlihat selalu terkini sehingga menciptakan sifat kecemasan untuk tidak tertinggal.

Adapun ciri dari FoMO adalah sebagai berikut.

- Timbul perasaan stress, kehilangan, merasa jauh jika tidak mengetahui peristiwa seseorang (Anggraeni, 2020);
- Tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis dan *relatedness* akan self (Anggraeni, 2020);
- Takut dan khawatir jika kehilangan interaksi dan kontak sosial yang menyebabkan dapat terlewatnya peristiwa sosial, pengalaman dan interaksi (Kang *et al.*, 2019).

Menurut Przybylski *et al* (2013) dalam Anggraeni (2020), terdapat 3 (tiga) indikator FoMO yaitu ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan. Selain itu, FoMO sebagai sikap untuk diterimanya seseorang dalam suatu kelompok, seperti bagaimana seseorang mengetahui informasi lebih dahulu, bagaimana *brand* yang digunakan sehingga dapat menjadi acuan bagi orang lain dan sebagainya, sehingga menurut Myrilla dan Dewi (2022), sikap hedonisme dan FoMO tidak dapat dipisahkan.

3.3. Teori Generasi.

Menurut Lubis dan Mulianingsih (2019), teori generasi merupakan teori yang

memahami suatu kelompok yang memiliki ciri kesamaan dalam rentang usia, pengalaman, peristiwa dan sejarah penting dalam suatu periode yang sama.

Terdapat 5 (lima) *Timeline* generasi yaitu:

1. Generasi *Baby Boomer*, periode lahir tahun 1946-1964;

Generasi ini dicirikan dengan generasi yang adaptif, mudah menerima dan menyesuaikan diri, memiliki pengalaman hidup karena lahir pasca perang dunia ke II, mudah bergaul, namun teknologi belum berkembang.

2. Generasi X, periode lahir tahun 1965-1980;

Generasi ini dicirikan mulai mengetahui *Personal Computer* (PC), tv kabel telepon kabel, video games dan mulai berkembangnya *internet*, memiliki kecenderungan untuk mandiri berpikir dan terkadang kurang kongkret dalam bertindak.

3. Generasi Y, periode tahun lahir 1981-1994;

Generasi ini dicirikan dengan mulai memahami teknologi komunikasi pesan instan, sosial media seperti *Friendster* dan *Facebook*. Generasi ini lebih fleksibel, tidak mengejar harta, mengejar kebersamaan, solidaritas, kebahagiaan bersama dan profesional dengan terbiasa hidup dengan pola kekinian.

4. Generasi Z, periode tahun lahir 1995-2010;

Generasi ini dicirikan dengan generasi *internet*, memiliki sifat yang sama, mudah mengikuti perkembangan zaman, teknologi dan informasi, dapat mengaplikasikan aplikasi dalam satu waktu (*Multitasking*), sudah terbiasa menggunakan teknologi.

5. Generasi Alpha, periode tahun lahir 2011-2025;

Generasi ini dicirikan dengan seluruh aktivitas menggunakan teknologi, sudah memahami *internet* dan

perkembangan teknologi terkini, masih mencari jati diri.

3.4. Locus of Control.

Menurut Dewi *et al.*, (2021), konsep ini dikenalkan oleh Rotter tahun 1996 sebagai bagian dari bagian *Social Learning Story*, yang terkait dengan kepribadian dan mewakili cita-cita, harapan sehingga dapat menentukan arah hidup keberhasilan seseorang.

Menurut Rotter (1996) dalam Susana (2017), sumber pengendalian *Locus of Control* seseorang dipengaruhi oleh internal dan eksternal. Pengaruh internal yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi dipengaruhi oleh tindakannya sendiri termasuk kesuksesan dan kegagalan, memiliki pengendalian yang baik terhadap perilaku dan cenderung perilaku yang politis, dapat mempengaruhi orang lain bahwa usahanya akan berhasil serta lebih aktif mencari informasi dan pengetahuan. Adapun pengaruh eksternal yaitu pengaruh normatif, penerimaan kelompok, keluarga dan strata sosialnya.

3.5. Pola Hidup Mewah.

Pola hidup adalah suatu gaya hidup yang memperhatikan factor-faktor tertentu sehingga mempengaruhi kehidupan sehari-hari (Soekidjo, 2011 dalam Siaputra *et al.*, 2017). Pola hidup dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yaitu sikap, pengalaman dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif dan persepsi. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi adalah kelompok referensi, keluarga, kelas sosial, kebudayaan (Ramdhani, 2020).

Adanya pola hidup yang terbentuk dari faktor internal dan faktor eksternal akan membentuk beberapa pola hidup seperti pola hidup sehat, pola hidup mewah dan sebagainya. Saat ini, muncul pola hidup mewah yang terjadi pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini tentu saja menyebabkan kemarahan dan penurunan

kepercayaan publik pada ASN yang merupakan abdi negara. Menurut Ramdhani (2020), pola hidup mewah adalah pandangan, harapan dan gaya hidup yang menganggap kebahagiaan, kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan hidup dengan menikmati hidup tanpa batas.

Menurut Reynold dan Darden dalam Ramdhani (2020), ada 3 (tiga) aspek yang mempengaruhi pola hidup mewah yaitu:

- *Activities* (Aktivitas).
Aktivitas pada pola hidup mewah biasanya dilakukan diluar rumah untuk berkunjung ke suatu tempat serta membeli barang yang tidak diperlukan, menghabiskan untuk duduk santai di Mall pembelanjaan.
- *Interest* (Minat).
Minat pada pola hidup mewah lebih dari cara individu untuk menarik perhatian yang berasal dari lingkungan dan perangkat mental yang terdiri dari perasaan, pendirian, rasa takut, rasa khawatir, rasa puas terhadap suatu pilihan tertentu. Dengan minat, dapat menjadi pusat perhatian, gairah yang menyertai dikarenakan adanya atensi dan gengsi.
- *Opinion* (pendapat).
Pendapat pada pola hidup mewah mengacu pada bagaimana seseorang mengekspresikan melalui tulisan ataupun lisan terhadap penafsiran, harapan, evaluasi terhadap diri mereka, kepercayaan, isu sosial sehingga membentuk pola pikir dan tindakannya.

ASN tidak diperkenankan memiliki hidup mewah hal ini sesuai dengan Pasal 3-5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Nilai-Nilai *Core Value* ASN BerAKHLAK dan Perwujudan

Perilaku Insan BKN di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data *try out*, butir-butir yang sah atau valid digunakan dalam Analisa data dan butir-butir yang gugur atau error akan dihapus dari Analisa data. Adapun uji coba ini menggunakan SPSS. Adapun hasil uji validitas dan reliabilitas alat ukur disajikan pada Tabel 4., sebagai berikut:

Tabel 4.
Uji Validitas dan Reliabilitas

Skala	Number of Items (r hitung < 0,05)		Cronbach's Alpha (≥ 0,6)
	Valid	Error	
<i>Fear of Missing Out</i>	8	2	0,765
Pola Hidup Mewah	7	3	0,825
<i>Locus of Control</i>	8	2	0,735

Hasil olahan data Peneliti, 2023.

Pengukuran validitas butir pernyataan *Fear of Missing Out* dengan SPSS yaitu diperoleh 8 butir pernyataan valid (r hitung < 0,05), dengan reliabilitas menggunakan Teknik Alpha Cronbach's diperoleh koefisien reliabilitas 0,765 (nilai *Cronbach's Alpha*) yang berarti skala yang dibuat dianggap layak dan andal.

Pengukuran validitas butir pernyataan Pola Hidup Mewah dengan SPSS yaitu diperoleh 7 butir pertanyaan valid (r hitung < 0,05), dengan reliabilitas menggunakan Teknik Alpha Cronbach's diperoleh koefisien reliabilitas 0,825 (nilai *Cronbach's Alpha* ≥ 0,6) yang berarti skala yang dibuat dianggap layak dan andal.

Pengukuran validitas butir pernyataan *Locus of Control* dengan SPSS yaitu diperoleh 8 butir pertanyaan valid (r hitung < 0,05), dengan reliabilitas menggunakan

Teknik Alpha Cronbach's diperoleh koefisien reliabilitas 0,735 (nilai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,6$) yang berarti skala yang dibuat dianggap layak dan andal.

4.2. Uji Normalitas.

Adapun uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*. Adapun hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.
Uji Normalitas.

Variabel	<i>Kolmogorov-Smirnov Test</i>
<i>Fear of Missing Out</i>	0,069
Teori Generasi	0,051
<i>Locus of Control</i>	0,076
Pola hidup mewah	0,062

Hasil olahan data Peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 5., maka dapat diketahui bahwa data *Fear of Missing Out*, memiliki koefisien *Kolmogorov-Smirnov* 0,069 ($p > 0,05$) yang berarti berdistribusi atau tersebar normal, sampel dapat mewakili populasi dan memenuhi persyaratan uji normalitas. Data teori generasi memiliki koefisien *Kolmogorov-Smirnov* 0,051 ($p > 0,05$) yang berarti berdistribusi atau tersebar normal,

4.3. Demografi Partisipasi Generasi.

Tabel 6.
Demografi Partisipasi Generasi^a

No.	Jumlah sampel (orang)	Tahun Kelahiran	Generasi	Persentase (%)	Jenis Kelamin	
					Laki-Laki	Perempuan
1.	3	1963-1964	<i>Baby Boomer</i>	2,78	1	2
2.	18	1965-1980	X	16,67	6	12
3.	37	1981-1994	Y	34,26	17	20
4.	50	1995-2003	Z	46,29	21	29

*Lubis dan Mulianingsih (2019),

^aData diolah oleh peneliti, 2023

sampel dapat mewakili populasi dan memenuhi persyaratan uji normalitas.

Data teori generasi memiliki koefisien *Kolmogorov-Smirnov* 0,051 ($p > 0,05$) yang berarti berdistribusi atau tersebar normal, sampel dapat mewakili populasi dan memenuhi persyaratan uji normalitas. Data *Locus of Control* memiliki koefisien *Kolmogorov-Smirnov* 0,076 ($p > 0,05$) yang berarti berdistribusi atau tersebar normal, sampel dapat mewakili populasi dan memenuhi persyaratan uji normalitas dan data pola hidup mewah memiliki koefisien *Kolmogorov-Smirnov* 0,051 ($p > 0,05$) yang berarti berdistribusi atau tersebar normal, sampel dapat mewakili populasi dan memenuhi persyaratan uji normalitas.

Menurut Sugiyono (2019), dalam suatu penelitian diperlukan uji normalitas untuk menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) berdistribusi normal sehingga berpengaruh terhadap persamaan regresi yang dihasilkan. Persamaan regresi yang baik jika variabel X dan Y dapat berdistribusi normal. Adapun $P > 0,05$ berarti data terdistribusi normal dan dapat mewakili populasi.

Dalam penelitian ini, jumlah responden yang mengisi kuesioner penelitian ini adalah sebanyak 108 orang dengan data sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner diperoleh bahwa:

- Seluruh responden (108 responden=100%) memiliki sosial media *Facebook* dan *Whatsapp* serta pernah melihat status *facebook* dan *whatsapp status*;
- Responden yang lahir pada tahun 1987 – 2003 (68 responden = 63,96%) memiliki media sosial lain seperti *Instagram*, *X* (dulunya *twitter*), *TikTok* dan *telegram* serta memiliki kebiasaan menabung untuk membeli barang terkini pada saat *launching* ;
- Responden yang lahir pada tahun 1997-2003 (29 responden = 26,85%) memiliki kebiasaan tidur diatas jam 00.00, memiliki keinginan untuk publikasi kegiatan secara *real time* dan menyenangi konten mengulas gawai, otomotif serta gemar menabung untuk menonton konser.
- Responden yang lahir pada tahun 1963-1980 (21 responden = 19,44%) memiliki kegemaran melihat *facebook* dan memiliki aplikasi berita online (*Kompas.com*, dan sebagainya).
- Responden yang lahir pada tahun 1963-1975 (14 responden = 12,96%) memiliki kebiasaan untuk lebih banyak menghabiskan waktu dirumah dan menyenangi tontonan sejarah dan berita.
- Responden yang lahir pada tahun 1963-1980 (19 responden = 17,59%) memiliki sosial media lain (selain *facebook* dan *whatsapp*) namun tidak digunakan.
- Responden yang lahir pada tahun 1963-1986 (31 responden = 28,70%) mengganti gawai atau telepon seluler jika telepon seluler mereka rusak. Responden yang lahir pada tahun 1987-1995 (37 responden = 34,26%) mengganti telepon selular atau gawai paling lama 5 tahun dan responden yang lahir tahun 1996-2003 (40 responden = 37,04%) akan mengganti telepon seluler

atau gawai jika ada keluaran terbaru atau paling lama 2 tahun.

- Kepemilikan gawai, otomotif dan barang pada responden yang lahir pada tahun 1986-2003 (40 responden = 37,04%) dipengaruhi oleh iklan dan *influencer* media sosial.

Dapat dilihat pada Tabel 6., diketahui bahwa jumlah responden terbanyak yang mengisi kuesioner diisi oleh responden dengan tahun kelahiran 1995-2003 (20-28 tahun) sebanyak 50 orang atau 46,29%. Menurut Lubis dan Mulianingsih (2019), generasi Z merupakan generasi yang lahir pada tahun 1995-2010. Dapat dilihat pada Tabel 4., tingginya partisipasi generasi Z dikarenakan Generasi Z merupakan generasi *internet* dikarenakan generasi ini sudah berkembang dengan pesat teknologi informasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa generasi ini memiliki media sosial yang beragam, menyenangi menonton konten, menginginkan publikasi kegiatan yang sedang dilakukan, senang menonton konser dan menabung untuk mendapatkan hal yang dirasa meningkatkan eksistensinya. Menurut Lubis dan Mulianingsih (2019), kepribadian Generasi Z secara tidak langsung akan dipengaruhi oleh gawai dan teknologi canggih, dapat bekerja secara *multitasking* menggunakan teknologi.

Responden yang mengisi kuesioner yang lahir tahun 1963 – 1964 sebanyak 3 orang atau 2,78%. Menurut Lubis dan Mulianingsih (2019), kelahiran pada tahun 1946-1964 merupakan generasi *Baby Boomer*. Generasi ini belum memiliki teknologi mutakhir pada masanya, mudah bergaul dan menambah persaudaraan. Berdasarkan hasil penelitian, responden generasi *baby boomer* ini memiliki media sosial yang sering digunakan seperti *whatsapp* dan *facebook*, memiliki kegemaran melihat *facebook* dan senang menghabiskan waktu di rumah. Selain itu, pada rentang tahun kelahiran 1963-1964 tidak mengganti gawai atau telepon seluler

jika tidak rusak. Adanya fenomena ini menurut Lubis dan Mulianingsih (2019), generasi *baby boomer* memiliki usaha ingin mengetahui sesuatu hal baru namun pengalaman hidup yang diutamakan.

Responden yang lahir pada tahun 1965-1980 berjumlah 18 responden atau 16,67%. Adapun hasil penelitian ini hampir sama seperti responden yang lahir pada rentang tahun 1963-1964. Secara umum, responden yang lahir pada 1965-1980 memasuki dunia kerja pada tahun 1990 sehingga secara tidak langsung dipengaruhi oleh generasi *baby boomer*. Menurut Lubis dan Mulianingsih (2019), responden yang lahir 1965-1980 merupakan generasi X dengan sudah mulai mengenal teknologi seperti *Personal Computer* (PC), televisi, *internet* dan video games. Generasi X ini memiliki watak mencari aman sehingga sering mengikuti arus yang dirasa aman, otoriter dan sering kurang kongkret dalam bertindak.

Responden yang lahir pada tahun 1981-1994 berjumlah 37 responden atau 34,26%. Adapun hasil penelitian menunjukkan sudah menggunakan media sosial selain *whatsapp* dan *facebook* seperti *Instagram*, *TikTok*, *X* dan *Telegram*, mengganti telepon seluler paling lama 5 tahun dan membeli suatu barang dikarenakan iklan atau *influencer* media sosial. Menurut Lubis dan Mulianingsih (2019), Responden yang lahir tahun 1981-1994 merupakan generasi Y, memiliki ciri sudah mengenal teknologi komunikasi instan, senang bergaul diluar rumah, mulai berani berbicara, lebih fleksibel dan terpenting eksistensi diri sehingga dapat dihargai di lingkungan sosial.

4.4. Pengujian Hipotesis.

4.4.1. Analisis Regresi Linier Berganda.

Dalam melakukan penelitian korelasi 3 (tiga) variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Adapun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 7.
Variabel Penelitian

Bebas (Independen)	Terikat (Dependen)
<i>Fear of Missing Out</i> (X ₁)	kecenderungan pola hidup mewah ASN (Y).
Teori Generasi (X ₂)	
<i>Locus of Control</i> (X ₃)	

Hasil uji regresi linier berganda dapat disajikan pada Tabel 7.

Tabel 8.
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	15.216	15.714
<i>Fear of Missing Out</i>	.412	.155
Teori Generasi	.021	.190
<i>Locus of Control</i>	.389	.145

a. Dependent Variable : Kecenderungan Pola Hidup Mewah ASN

Data diolah menggunakan SPSS 22 (2021)

Berdasarkan Tabel 8., maka dapat diperoleh model persamaan regresi yaitu:

$$Y = 15,216 + 0,412 + 0,021 + 0,389 + e$$

Dapat dijabarkan yaitu jika variabel bebas atau independent (X₁, X₂, X₃) tidak ada maka akan memberikan nilai 0, sehingga variabel terikat atau dependen (Y) memiliki nilai 15,216.

Berdasarkan persamaan diatas juga dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ✓ Nilai Koefisien X₁ (*Fear of Missing Out*) yaitu 0,412, bernilai positif dan berpengaruh atau berhubungan dengan kecenderungan pola hidup mewah ASN yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- ✓ Nilai Koefisien X₂ (Teori Generasi) yaitu 0,021, bernilai positif dan berpengaruh atau berhubungan dengan kecenderungan pola hidup mewah ASN yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- ✓ Nilai Koefisien X_3 (*Locus of Control*) yaitu 0,389, bernilai positif dan berpengaruh atau berhubungan dengan kecenderungan pola hidup mewah ASN yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut Dewi *et al.*, (2021), penggunaan analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau tidaknya dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat.

4.4.2. Uji T

Menurut Sugiyono (2019), uji T menunjukkan pengaruh satu atau lebih variabel independent terhadap variabel dependen dan seberapa signifikansi pengaruhnya. Adapun tingkat signifikansi $t < 0,05$ menunjukkan berpengaruh. Adapun hasil uji T penelitian ini disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9.
Uji T
Coefficients^a

Model	T Test	
	T	Sig
(Constant)	.817	.114
<i>Fear of Missing Out</i>	1.787	.037
Teori Generasi	.798	.049
<i>Locus of Control</i>	2.018	.043

a. Dependent Variable : Kecenderungan Pola Hidup Mewah ASN
Data diolah menggunakan SPSS 22 (2021)

Berdasarkan Tabel 10., maka diketahui seluruh variabel bebas atau independent (X) berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan pola hidup mewah Aparatur Sipil Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun analisis yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- ✓ Variabel *Fear of Missing Out* (X_1) dengan nilai signifikan 0,037 ($P < 0,05$). Hal ini variabel X_1 berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan pola hidup mewah Aparatur Sipil Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- ✓ Variabel Teori Generasi (X_2) dengan nilai signifikan 0,049 ($P < 0,05$). Hal ini variabel X_2 berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan pola hidup mewah Aparatur Sipil Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- ✓ Variabel *Locus of Control* (X_3) dengan nilai signifikan 0,043 ($P < 0,05$). Hal ini variabel X_3 berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan pola hidup mewah Aparatur Sipil Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.4.3. Uji F

Untuk mengetahui apakah ketiga variabel *Fear of Missing Out* (X_1), Teori Generasi (X_2), *Locus of Control* (X_3) memiliki pengaruh terhadap variabel terikat atau kecenderungan pola hidup mewah ASN (Y) diperlukan instrument uji yaitu Uji F. Menurut Sugiyono (2019), uji statistic F digunakan untuk mengetahui semua variabel independent memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (terikat). Adapun hasil uji F disajikan pada Tabel 10, sebagai berikut:

Tabel 10.
Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of squares	Df	F	Sig. ^b
1 Regression	384.178	3	3.985	.002
Residual	1872.769	104		
Total	2256,947	107		

a Dependent variable

b Independent variable

Data diolah menggunakan SPSS 22 (2021)

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 10., maka dapat diketahui variabel bebas yaitu *Fear of Missing Out* (X_1), Teori Generasi (X_2), *Locus of Control* (X_3) terhadap Kecenderungan Pola Hidup Mewah (Y) pada ASN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diketahui F Hitung adalah 3,985 dengan signifikansi 0,002. Adapun F Tabelnya adalah dengan menghitung $k;n-k$,

n adalah jumlah responden yaitu 108 responden, sehingga $F_{Tabel} = (3; (108-3))$, $F_{Tabel} = (3; 105) = 2,691133$.

Sehingga diketahui $F_{Hitung} > F_{Tabel}$ yaitu $3,985 > 2,691133$, dengan nilai signifikan $F_{Sig} < 0,05$ yaitu $0,002 < 0,05$ sehingga disimpulkan ketiga variabel bebas yaitu variabel bebas yaitu *Fear of Missing Out* (X_1), Teori Generasi (X_2), *Locus of Control* (X_3) berpengaruh terhadap Kecenderungan Pola Hidup Mewah (Y) pada ASN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.5. Pembahasan.

Kecenderungan pola hidup mewah pada Aparatur Sipil Negara (ASN) terbentuk dari tiga aspek yaitu aktivitas, minat dan pendapat (Reynold dan Darden dalam Ramdhani (2020)). Ketiga aspek tersebut mempengaruhi setiap generasi yang terbentuk dari faktor lingkungan internal dan eksternal yang akan membentuk pola *Fear of Missing Out* (FoMO) dan kematangan berpikir atau *Locus of Control*.

Berdasarkan hasil penelitian, ASN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat usia dari 20 – 60 tahun yang tentu saja memiliki pola hidup yang berbeda terutama kecenderungan terhadap pola hidup mewah.

Sebelumnya, sudah terdapat penelitian yang hanya melihat kecakapan berpikir atau *Locus of Control* terhadap kecenderungan pola hidup mewah pada aparatur sipil negara (ASN) (Susana, 2016), namun dipenelitian tersebut belum dianalisa lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain penyebab kecenderungan pola hidup mewah pada ASN.

Pada penelitian ini, dilakukan lebih kompleks dalam melihat bagaimana korelasi antara teori generasi, *fear of missing out* dan *Locus of Control* sehingga dapat membentuk sikap kecenderungan pola hidup mewah pada ASN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini sesuai

dengan Aisahfitri dan Yusriyah (2020), setiap tingkatan generasi akan mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup sebagai interaksi adanya aktivitas, minat dan opini. Selain itu, Dewi *et al.*, (2021), pola pikir menjadi bagian dari *social learning teori* dalam membentuk kepribadian, harapan dan arah hidup seseorang.

Pada hasil penelitian, berdasarkan demografi partisipasi generasi, seluruh responden memiliki kecenderungan untuk hidup mewah namun Generasi Y dan Z ASN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ternyata memiliki kecenderungan lebih besar untuk hidup mewah. Hal ini dikarenakan generasi ini sudah berhubungan dengan teknologi dan akan mempengaruhi kepribadian dan pola pikir (*Locus of Control*). Generasi ini memiliki sikap berani untuk bersuara (memposting di sosial media) dan tidak lepas dari aplikasi sosial media sehingga akan membuat generasi ini berpacu untuk menjadi yang utama dalam menggunakan sesuatu agar dapat lebih diterima dan dihargai pada lingkungan sosialnya (*fear of missing out*) sehingga dapat pola hidup dapat dipengaruhi. Menurut Lubis dan Mulianingsih (2019), generasi X dan Y merupakan generasi yang lebih cenderung memiliki pola hidup mewah. Selain itu, menurut Lestari (2021), generasi Z memiliki kecenderungan pola hidup dengan asumsi (pola pikir) gaya hidup didukung oleh orang tua.

Pada generasi *baby boomer* ASN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kecenderungan pola hidup mewah yang paling rendah dikarenakan generasi ini memiliki pola hidup yang belum bersinggungan dengan teknologi secara utuh namun sudah mengetahui teknologi karena tuntutan profesi. Selain itu, dengan pengalaman hidup membentuk pola pikir (*Locus of Control*) yang lebih baik dan tidak takut untuk *fear of missing out*. Menurut Lubis dan Mulianingsih (2019), generasi *baby boomer* merupakan generasi yang

lebih mengutamakan sosialisasi secara langsung dan bercerita tentang masa lalu untuk diterapkan pada zaman sekarang.

Pada generasi X, memiliki kecenderungan pola hidup mewah ditengah-tengah dikarenakan generasi ini masih dipengaruhi oleh generasi *baby boomer* dan generasi Y serta Z. Dikarenakan adanya pengaruh diantara ketiga generasi, menyebabkan secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir (*Locus of Control*) dan mengikuti perkembangan zaman (*fear of missing out*).

Berdasarkan uji regresi linier berganda, terdapat hubungan teori generasi, *fear of missing out* dan *Locus of Control* terhadap kecenderungan pola hidup mewah ASN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai $Y = 15,216 + 0,412 + 0,021 + 0,389 + e$, masing-masing koefisien variabel (*Fear of Missing Out* (FoMO), teori generasi dan *Locus of Control*) bernilai positif (+0,412, +0,021, +0,389) yang menunjukkan pengaruh dan berkaitan dengan kecenderungan pola hidup mewah.

Secara spesifik, diperlukan uji lanjut untuk melihat hubungan pengaruh masing-masing variabel yaitu teori generasi, *fear of missing out* dan *Locus of Control* terhadap kecenderungan hidup mewah pada ASN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan Uji T. Adapun hasil uji T pada masing-masing variabel yaitu 0,037, 0,049 dan 0,043 (masing-masing variabel berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan pola hidup mewah).

Dikarenakan sudah terdapat hasil hubungan antara variabel teori generasi, *fear of missing out* dan *Locus of Control* terhadap kecenderungan pola hidup mewah ASN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan uji lanjut menggunakan uji F, untuk memperkuat hasil penelitian dan mengukur seluruh variabel bebas (*dependent*) yaitu *Fear of Missing Out* (X_1), Teori Generasi (X_2), *Locus of Control* (X_3) mempengaruhi kecenderungan pola hidup mewah pada ASN di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung. Berdasarkan uji F didapat hasil yaitu ($F_{hitung} 3,985 > F_{tabel} 2,691133$) sehingga teori generasi, *fear of missing out* dan *Locus of Control* berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan hidup mewah pada ASN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk mencegah perilaku hidup mewah pada ASN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperlukan strategi sesuai Sutmasa (2019) yaitu penegakan perilaku etis ASN dengan cara penguatan dan pemantapan jiwa korsa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, kontrol masyarakat dan media massa terhadap perilaku ASN, menegakkan disiplin dan mengenakan sanksi yang tegas dan jelas atas pelanggaran kode etik oleh ASN.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikandari variabel teori generasi, *Fear of Missing Out*, dan *Locus of Control* terhadap kecenderungan pola hidup mewah pada ASN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (uji regresi linier berganda yaitu $Y = 15,216 + 0,412 + 0,021 + 0,389 + e$, dan uji F yaitu $F_{hitung} 3,985 > F_{tabel} 2,691133$).

DAFTAR PUSTAKA

- Aisafitri L dan Yusriyah K. 2020. Sindrom *Fear of Missing Out* sebagai Gaya Hidup Generasi Milenial di Kota Depok. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, 4 (2) : 166-177.
- Alreck, P. L., dan Settle, R. B. 2004. *The Survey Research Handbook*. McGraw Hill, Boston.
- Anggraeni R.D. 2020. *Hubungan Antara Subjective Well-Being dan Fear of Missing Out (FoMO) pada Emerging Adulthood*. Skripsi. Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

- Aresti N.G., Lukmantoro T. & Ulfa N.S. 2023. Pengaruh Tingat *Fear of Missing Out* (FoMO) dan Tingkat Pengawasan Orang Tua terhadap Tingkat Kecanduan Penggunaan TikTok pada Remaja. *Jurnal Universitas Diponegoro*, 1-13.
- Dewi A.V., Nusantoro J dan Joplani A. 2021. Pengaruh Perilaku Pengelolaan Keuangan, *Locus of Control* dan Media Sosial terhadap Hedonisme Lifestyle Dikalangan Mahasiswa (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Metro). *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 2(1) : 113-120.
- Khairat M., Yusri N.A., dan Yuliana S. 2018. Hubungan Gaya Hidup Hedonis dengan Perilaku Konsumtif pada Mahasiswi. *Jurnal Psikologi Islam Al-Qalb*. 10(2) : 130-139.
- Lestari S. 2021. *Hubungan antara Gaya Hidup Hedonis dengan Perilaku Konsumtif pada Mahasiswi terhadap Produk Fashion*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.
- Lubis B dan Mulianingsih S. 2019. Keterkaitan Bonus Demografi dengan Teori Generasi. *Jurnal Registratie*, 1(1) : 21-36.
- Madiistriyatno H & Hadiwijaya D. 2020. *Generasi Milenial, Tantangan Membangun Kerja / Bisnis dan Adversity Quotient (AQ)*. Penerbit Widina, Jawa Barat.
- Myrilla S dan Dewi F.I.R. 2022. Hedonis sebagai Moderator pada FoMO dan *Conformity Consumption Behavior* Remaja Pengguna *Smartphone X*. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*. 6(2) : 507-516.
- Putra I.W.S. 2021. 2021. Komparasi Etika *Hedonisme* Epikuros dengan Filsafat CĀRVĀKA. *Jurnal Filsafat Agama Hindu*. 12 (2) : 41-51.
- Patricia N.L. dan Handayani S. 2014. Pengaruh Gaya Hidup Hedonis terhadap Perilaku Konsumtif pada Pramugari Maskapai Penerbangan X. *Jurnal Psikologi*. 12(1) : 10-17.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Ramdhani, R.A.A. 2020. *Pengaruh Gaya Hidup Hedonis terhadap Perilaku Konsumtif pada Anggota Komunitas Mobil di Yogyakarta*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Siaputra H., Emmiati A., Wibisono E.F., Widajaja A. 2017. Pola Perilaku Hidup Sehat Pra Lansia dalam Mengkonsumsi Makanan Sehari-Hari di Maureen Studi. *Jurnal Neliti*, 131-140.
- Sugiyono. 2019. *Statistika untuk Penelitian*. CV Alfabeta, Bandung.
- Susana E. 2016. Pengaruh *Locus of Control* terhadap Gaya Hidup Hedonisme pada Pegawai Negeri Sipil di Sekratriat Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Fakultas Psikolog, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*. 1-11.
- Sutmasa Y.G. 2019. Etika ASN dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. *Jurnal Cakrawarti*, 2(1) : 19-29.

ANALISIS *FLEXING* DAN HEDONISME: MEMBENTUK CITRA NEGATIF ASN DI MEDIA SOSIAL

(Analysis Of Flexing And Hedonism: Shaping The Negative Image Of Civil Servants On Social Media)

M. Denny Elyasa

(Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
e-mail: dennybabel20@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena *Flexing* dan Hedonisme telah menjadi “tontonan” keseharian masyarakat di era globalisasi saat ini. Masyarakat akan mafhum ketika hal tersebut diperlihatkan oleh para pesohor ataupun pengusaha sukses di negeri ini. Namun, akan dinilai negatif oleh masyarakat ketika hal tersebut diperlihatkan oleh para pejabat dan ASN. Kemajuan teknologi informasi telah menghapus semua sekat informasi yang ada selama ini, sehingga masyarakat saat ini dapat menerima dan menyampaikan informasi secara bebas, cepat dan *up to date*. Menjadikan *flexing* dan bergaya hidup hedonis demi membangun sebuah citra diri bukanlah suatu pilihan yang baik buat seorang ASN. ASN sebagai aparatur pemerintah memiliki tugas melayani masyarakat dan menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan, maka gaya hidup seorang ASN akan menjadi cermin dari sikap dan tingkah laku ASN itu sendiri. Media sosial sebagai sebuah medium dalam mengaktualisasikan diri hendaknya dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya tanpa meninggalkan etika, norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.

Kata Kunci: ASN, *Flexing*, Hedonisme, Pencitraan, Media Sosial.

ABSTRACT

The phenomenon of Flexing and Hedonism has become a daily "spectacle" for society in the current era of globalization. People understand it when showcased by celebrities or successful entrepreneurs in the country. However, when displayed by officials and civil servants, it is negatively perceived by the public. The advancement of information technology has broken down barriers to information that existed before, allowing today's society to freely, rapidly, and up-to-date transmit and receive information. Embracing a flexing and hedonistic lifestyle to build a self-image is not a wise choice for a civil servant (ASN). ASNs, as government personnel, have the duty to serve the public and uphold unity and harmony values. Hence, an ASN's lifestyle reflects their attitude and behavior. Social media, as a means of self-expression, should be utilized responsibly, adhering to ethics, norms, and societal values.

Keywords: Civil Servant (ASN), *Flexing*, Hedonism, Image Building, Social Media.

A. PENDAHULUAN

Beberapa waktu belakangan ini kata *flexing* (pamer kekayaan) dan bergaya hidup mewah (hedonisme) menjadi berita utama dan hangat di berbagai media baik media cetak, *online* maupun televisi di negeri ini. Pertama kali berita terkait *flexing* dan gaya hidup hedonis mencuat setelah Indra Kenz dan Doni Salmana seorang *influencer* dan *youtuber* terkenal, terjerat kasus penipuan aplikasi *trading online*. Masalah tersebut menjadi sorotan masyarakat selain masalah penipuan, kedua orang ini terkenal karena *flexing* dan gaya hidup hedonisnya di berbagai media sosial.

Mereka selalu memamerkan kehidupan kesehariannya dengan pamer tabungan yang jumlahnya berdigit-digit, rumah mewah, kendaraan mewah yang berganti-ganti, makan di restoran mewah, pelesiran ke luar negeri dan banyak lagi kegiatan yang menampilkan gaya hidup mewahnya. Gaya hidup seperti ini sebenarnya tidak asing lagi dan sering dipertontonkan di berbagai *platform* oleh para pesohor, pengusaha bahkan pejabat di negeri.

Kondisi ini tidak hanya terjadi di negeri ini, di luar negeri bahkan di seluruh dunia. Tujuan utamanya tak lain untuk meningkatkan citra diri di mata penggemar maupun masyarakat luas. *Flexing* dan hedonisme semacam mencari pengakuan atas keberhasilan dan kesuksesan

Masalah terkait *flexing* dan hedonisme ini kian menjadi sorotan publik ketika kasus ini menimpa beberapa pejabat di lingkungan kementerian keuangan seperti kasus *flexing* Mario Dandy anak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo, sehingga ketidakwajaran harta kekayaan yang dimiliki ayahnya terbongkar ke luar. Kasus kriminal ini yang akhirnya membuka kembali lembaran hitam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kondisi ini memicu terjadinya polemik soal ASN kaya. Jadi kasus ini menggeliat bukan karena upaya

pengecahan atau pengungkapan kasus dari aparat hukum.

Kasus *flexing* dan hedonisme lainnya yang menimpa ASN semisal dari Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yaitu Eko Darmanto dan Andhi Pramono beserta keluarga. Kasus-kasus lainnya terus bermunculan, tidak hanya terjadi pada ASN di kementerian, tetapi juga diberbagai daerah semisal kasus hedonis istri Sekretaris Daerah Riau, atau kasus *flexing* Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang LHKPNnya dicurigai adanya ketidakbenaran.

Kasus – kasus *flexing* tersebut menurut Rhenald Kasali disebut *Flexing 2.0* yaitu meliputi hal-hal yang sudah ditutupi oleh orang tua yang telah melakukan tindakan terpuji seperti korupsi, manipulasi tapi bocor di anak-anak atau pasangannya. Saat ini *Flexing 2.0* sedang dialami Indonesia. Pamer kekayaan dan bergaya hidup mewah yang ditampilkan oleh para ASN dan keluarganya tersebut telah melukai dan mengkhianati rasa keadilan di masyarakat. Menjatuhkan kewibawaan dan rasa hormat sebagai ASN ke lubang yang dalam.

Kondisi ini menyebabkan timbulnya rasa curiga di mata masyarakat terkait harta kekayaan yang dimiliki oleh para ASN. Akhirnya masyarakat beranggapan semua ASN berperilaku sama. Padahal realitanya tidak seperti itu, masih banyak ASN yang hidup sederhana dan pas-pasan sesuai gaji yang diterima, memegang teguh amanah dan kepercayaan masyarakat.

Pada saat ini masyarakat sedang mengalami tekanan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Banyaknya masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, sulitnya masyarakat mencari pekerjaan, hingga melemahnya daya beli. Namun, di sisi lain ada ASN yang pamer kekayaan dan bergaya hidup mewah baik itu dilakukan di dalam kehidupan nyata maupun sekedar ditampilkan di media sosial.

Wajar apabila masyarakat umum berpikir jika secara realita mana mungkin seorang ASN dapat memiliki barang-barang bermerek dan hidup mewah bila dilihat dari besaran gaji yang diterima setiap bulannya. Besaran gaji dan tunjangan ASN diberbagai tingkatan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, telah mengatur besaran gaji ASN dari pangkat dan golongan terendah sampai tertinggi.

Masyarakat akan berasumsi bahwa ASN yang *flexing* dan gaya hidup hedonis (hedonisme) tersebut telah melakukan tindakan korupsi, pungli dan sebagainya. Hal yang wajar pula jika masyarakat memiliki pemikiran demikian, dikarenakan seorang ASN dimanapun dia berdinis gajinya akan sama, entah itu di kementerian, pemerintah daerah, di Jakarta ataupun di perbatasan negara.

Menurut Wahyudi dikutip dari voaindonesia.com (21/03/2023), ASN itu boleh kaya tidak ada yang membatasinya ketika pegawai merasa kebutuhannya belum tercukupi. Namun, ada prasyarat yang harus dipenuhi terkait harta kekayaan yang dimiliki. Apabila dari hitungan pendapatan sebagai abdi negara, sebenarnya sulit bagi ASN untuk bergelimang harta. Oleh karena itu, jika ada ASN kaya, negara harus memastikan bahwa harta itu diperolehnya secara wajar.

Flexing dan hedonisme dua kata yang memiliki pengertian berbeda. Suatu pola hidup yang ditunjukkan oleh orang – orang yang merasa sukses dan kaya dalam kehidupannya. *Flexing* sebuah istilah slang yang mengacu pada memamerkan atau menunjukkan kekayaan, status, atau barang mewah dalam cara yang mencolok atau eksentrik. Sedangkan pengertian hedonisme secara bebas adalah pandangan hidup yang menekankan pencarian kenikmatan dan kebahagiaan sebagai tujuan

utama dalam hidup. Pendekatan hedonis dapat bervariasi, termasuk kenikmatan sensorik, kepuasan pribadi, atau pengalaman positif lainnya.

Kemajuan teknologi informasi saat ini telah berhasil menghilangkan sekat-sekat informasi yang ada selama ini. Jarak, waktu, dan letak geografis suatu wilayah tidak lagi menjadi penghalang untuk dapat saling berbagi data dan informasi. Informasi dengan mudah didapat dan diterima oleh masyarakat secara *up to date* dan *real time*. Oleh karena itu, ketika ada isu yang dianggap baru dan menarik, maka akan dengan cepat menyebar di berbagai *platform* media dan segera menjadi konsumsi masyarakat secara luas. Saking banyak dan bebasnya informasi, sulit bagi masyarakat untuk memfilter mana informasi yang valid dan mana yang *hoaks*. Hal ini diperparah lagi dengan ketidakmampuan dan rendahnya literasi digital masyarakat.

Kondisi ini akan berbahaya bagi lingkungan dan kehidupan bermasyarakat ketika informasi *hoaks* merajalela. Hal tersebut pun terjadi ketika ada ASN yang melakukan *flexing* dan hedonisme, dengan bangganya menunjukkan di media sosial maka akan segera menjadi konsumsi publik. Netizen yang merasa “tersakiti” oleh tingkah laku ASN tersebut, dengan kemampuannya akan “menguliti” mulai dari membongkar latar belakang ASN tersebut hingga hal yang paling detail. Perlu diingat, media sosial selalu meninggalkan jejak. Jejak yang sulit untuk dihapus dan dilupakan.

Flexing dan hedonisme ini sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh ASN saja. Pola hidup seperti ini diawali oleh kehidupan glamor para pesohor, pengusaha dan pejabat. Seiring kemajuan zaman dan meningkatnya kemakmuran ekonomi masyarakat, pola hidup seperti ini mulai merambah ke dalam level kehidupan masyarakat lainnya. Berkembangnya teknologi informasi, semakin canggihnya

gadget, dan berubahnya gaya hidup masyarakat menyebabkan hal ini semakin mencuat ke permukaan.

Era sosial media menghadirkan ASN bermental “*money status*”. Menurut Weber dalam Haryanto (2011:165) pengejaran kekayaan telah meruntuhkan makna agama dan etika, hanya racun keduniaan belaka. Perubahan dan kemajuan jaman telah merubah konsep bersosialisasi antar manusia. Sosialisasi tidak hanya interaksi sosial yang memungkinkan individu untuk memahami, beradaptasi, dan mengadopsi norma-norma, nilai-nilai, budaya, dan peran-peran yang ada dalam masyarakat di mana mereka tinggal. Namun, mulai bergeser ke arah sosialisasi materialisme.

Sosialisasi materialisme melibatkan pengaruh dari berbagai lembaga sosial, seperti keluarga, media, teman sebaya, dan budaya konsumen, yang secara tidak langsung atau langsung mengajarkan individu untuk menghargai dan mengejar kekayaan material serta status sosial yang terkait dengan kepemilikan barang-barang. Jika dulu kekayaan dan gaya hidup dipamerkan dalam lingkungan sosial terbatas, saat ini sengaja dipamerkan di berbagai *platform* media sosial sehingga diketahui oleh banyak orang tidak terbatas pada lingkungan sosialnya saja.

Seharusnya proses sosialisasi memainkan peran krusial dalam membentuk kepribadian, perilaku, dan identitas seseorang. Ini adalah cara di mana individu belajar bagaimana berperilaku, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka.

Melalui kajian ini penulis mencoba untuk menganalisis dan memberikan sedikit gambaran kaitan antara pencitraan, *flexing* dan hedonisme yang dilakukan oleh ASN di media sosial. Pembahasan dalam kajian ini dibatasi hanya untuk menjawab faktor-faktor penyebab seorang ASN melakukan pencitraan, *flexing* dan hedonis dan korelasi antara ketiga hal tersebut. Apabila ada hal lainnya maka akan

diabaikan walaupun memiliki pengaruh pada kajian ini.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif berdasarkan studi literatur atau tinjauan pustaka yang sudah ada, dimana setiap data dan informasi diperoleh berasal dari data sekunder. Dalam hal ini, penulis tidak melakukan penelitian secara khusus.

Menurut Sugiyono (2014), metode analisis deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Data sekunder tersebut diambil dari hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, buku, jurnal ilmiah, dan tulisan lainnya yang keabsahan referensinya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Menurut Danial dan Warsiah (2009:80), studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Sedangkan menurut Dewi Roseha (2010:79), tujuan utama dari studi literatur adalah menemukan variabel-variabel yang akan diteliti.

Fokus utama tulisan ini melalui tinjauan pustaka atau studi literatur. Tinjauan pustaka memiliki tujuan untuk menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian sebelumnya. (Creswell, 2017:40)

C. KERANGKA TEORI

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bab I Pasal 1

menjelaskan apa yang dimaksud dengan ASN, yaitu profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pada pasal 2 dijelaskan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

ASN sebagai pegawai pemerintah memiliki tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya, ASN wajib menaati aturan dan menghindari larangan. Salah satu kewajiban seorang ASN adalah harus menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 3 huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Adapun terkait larangan yang tidak boleh dilakukan oleh ASN tercantum di pasal 5 antara lain melakukan pungutan di luar ketentuan, melakukan kegiatan yang merugikan negara, menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan, dan meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.

Aturan- aturan di atas mengikat selama seseorang tersebut masih menjadi ASN. Aturan tersebut sebagai rambu – rambu bagi para ASN yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam maupun di luar jam kedinasan termasuk di dalamnya *flexing* dan hedonisme.

Apa itu *flexing* dan hedonisme? Dikutip dari kamus bahasa Inggris Merriam Webster *online flexing* adalah “*to make an ostentatious display of something: Show off*” atau dapat diartikan memamerkan

sesuatu secara mencolok. Adapun menurut Cambridge Dictionary *online flexing* memiliki arti suatu kebanggaan atau kesenangan untuk menunjukkan sesuatu yang telah kita lakukan atau sesuatu yang kita miliki, biasanya dengan cara yang mengganggu orang

Jika ditinjau dari sosiologi dan budaya populer, *flexing* adalah tindakan menunjukkan kemewahan dan kesuksesan seseorang kepada orang lain melalui media sosial, gambaran diri, atau gaya hidup yang mencolok. Ini terkait dengan pembentukan citra pribadi dan pembentukan identitas dalam masyarakat yang sangat terhubung.

Flexing tidak bisa dipisahkan dengan hedonisme. Hal ini disebabkan perilaku *flexing* akan mengarah pada gaya hidup hedonis. Menurut Bakti *et al* (2020), untuk memperoleh kehormatan, kekayaan seseorang itu harus ditunjukkan. Pertama, dengan cara menunjukkan kedermawanan. Kedua, dipamerkan dengan gaya hidup hedonis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *online*, hedonisme berarti pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Konsep dasar *flexing* berbeda dengan pencitraan. Menurut KBBI pencitraan berasal dari kata dasar (noun) “*citra*” yang berarti gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk. Pencitraan sendiri berarti proses, cara membentuk citra mental pribadi atau gambaran sesuatu; penggambaran.

Dikutip dari Soemirat dan Ardianto (2007:114), menurut Frank Jefkins, citra diartikan sebagai kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. Pencitraan diri merujuk pada pemahaman dan persepsi seseorang tentang diri mereka sendiri. Ini melibatkan bagaimana seseorang melihat, memahami, dan menilai aspek-aspek diri mereka, termasuk karakteristik fisik, kepribadian,

kemampuan, nilai-nilai, dan pengalaman hidup.

Pencitraan diri memiliki dampak besar terhadap identitas dan kesejahteraan seseorang, serta dapat mempengaruhi interaksi dengan orang lain dan pengambilan keputusan. Pencitraan diri bisa terdiri dari beberapa elemen:

1. **Pengenalan Diri:** Ini adalah pemahaman dasar tentang siapa diri Anda, seperti nama, usia, jenis kelamin, dan ciri-ciri fisik.
2. **Penghargaan Diri:** Ini melibatkan bagaimana Anda menilai diri Anda sendiri, termasuk apa yang Anda anggap sebagai kelebihan dan kekurangan. Penghargaan diri yang positif dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kesejahteraan mental.
3. **Identitas Diri:** Ini mencakup aspek-aspek yang lebih dalam tentang siapa Anda, seperti budaya, agama, nilai-nilai, preferensi, dan peran sosial yang Anda identifikasi.
4. **Kepribadian:** Ini melibatkan pemahaman tentang karakteristik kepribadian Anda, seperti apakah Anda ekstrovert atau introvert, pemikir kreatif atau analitis, dan sebagainya.
5. **Pengalaman Hidup:** Pencitraan diri juga dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang telah Anda alami dalam hidup, termasuk pencapaian, kegagalan, trauma, dan momen-momen penting lainnya.

Memiliki pencitraan diri yang sehat dan positif penting untuk kesejahteraan mental dan emosional. Ini membantu Anda berinteraksi dengan dunia dengan lebih percaya diri, mengatasi tantangan, dan mengembangkan hubungan yang lebih bermakna dengan orang lain.

Istilah "hedonisme" berasal dari kata Yunani "*hedone*", yang berarti kesenangan atau kenikmatan. Hedonisme adalah sebuah pandangan filosofis yang menganggap kesenangan dan kenikmatan sebagai tujuan

utama kehidupan manusia. Pandangan ini berfokus pada pencapaian kesenangan dan menghindari penderitaan atau rasa tidak nyaman sebanyak mungkin.

Dalam konteks sejarah filosofi, terdapat beberapa aliran hedonisme yang berbeda:

1. **Hedonisme Epikuris:** pandangan ini mengajarkan bahwa pencapaian kesenangan mental dan fisik adalah tujuan tertinggi dalam kehidupan.
2. **Hedonisme Klasik:** aliran ini lebih menekankan pada kesenangan fisik dan kenikmatan sensorik sebagai tujuan utama.
3. **Utilitarianisme:** Meskipun tidak sepenuhnya identik dengan konsep hedonisme, utilitarianisme juga memiliki akar yang erat dengan pemikiran tersebut. Teori utilitarianisme menganggap bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kesenangan atau kesejahteraan bagi sebanyak mungkin orang.

Pandangan ini memiliki berbagai variasi dan pendekatan, tetapi ada dua jenis utama dari hedonisme, yaitu:

1. **Hedonisme Eudaimonik (Hedonisme Etis):** Pendekatan ini berpendapat bahwa kebahagiaan yang bermakna dan berkelanjutan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pengembangan diri. Ini lebih fokus pada kenikmatan jangka panjang dan kebahagiaan yang berasal dari pengembangan pribadi, relasi sosial yang positif, dan pencapaian tujuan hidup.
2. **Hedonisme Psikologis:** Pendekatan ini berfokus pada pencarian kenikmatan sebagai tujuan utama. Ini lebih berkaitan dengan pengalaman kenikmatan sensorik atau emosional dalam jangka pendek, tanpa selalu mempertimbangkan akibat jangka panjang.

Hedonisme sering kali menjadi bahan kritik karena penekanannya pada kesenangan dapat mengabaikan nilai-nilai

etika atau konsekuensi jangka panjang. Misalnya, kritikus berpendapat bahwa tindakan yang hanya menghasilkan kesenangan segera mungkin dapat merugikan individu atau masyarakat pada akhirnya. Selain itu, terdapat perdebatan tentang jenis kesenangan mana yang seharusnya dikejar dan apakah beberapa kesenangan mungkin bertentangan satu sama lain.

Penting untuk dicatat bahwa pandangan hedonisme memiliki variasi dan interpretasi yang beragam dalam sejarah filosofi, dan pandangan individu terhadap konsep ini bisa sangat bervariasi pula. Meskipun konsep hedonisme memiliki akar dalam sejarah filsafat yang panjang, ia tetap menjadi topik kontroversial dan kontemporer. Beberapa kritik terhadap pandangan ini termasuk potensi mengabaikan nilai-nilai etika, tanggung jawab sosial, dan dampak jangka panjang dari tindakan yang berorientasi pada kenikmatan semata. Ketika merujuk pada seseorang sebagai "hedonis," ini mengindikasikan bahwa individu tersebut cenderung menganut atau menerapkan pandangan hedonisme dalam kehidupannya, dengan mengutamakan pencarian kenikmatan sebagai prioritas utama.

Media sosial sebagai hasil dari kemajuan teknologi informasi merupakan *platform* atau layanan berbasis digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan berkomunikasi secara *online*. Melalui media sosial ruang gerak pertukaran data dan informasi yang selama ini dibatasi oleh jarak, waktu dan batas geografis sekarang nyaris tanpa sekat. Ini membuka ruang yang besar bagi tiap-tiap individu dan kelompok untuk terhubung dengan orang lain, baik yang dikenal maupun yang belum dikenal, serta berpartisipasi dalam berbagai aktivitas *online* seperti berbicara, berbagi informasi, gambar, video, dan banyak lagi.

Melalui media sosial sebagai *medium*

di *internet*, pengguna dapat merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain membentuk ikatan sosial secara virtual (Nasrullah,2016:13). Media sosial memiliki tujuan yang bervariasi, mulai dari menjalin hubungan sosial, berbagi pemikiran dan ide, hingga mempromosikan bisnis atau merek.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Globalisasi telah memberikan dampak serius dalam banyak aspek kehidupan manusia. Globalisasi didukung dengan kemajuan teknologi. Era industri 4.0 menitik beratkan pada kemajuan teknologi informasi, AI (*Artificial Intelligence*) dan robotik. Era dimana disrupsi teknologi terjadi. Kemajuan ini telah membuat proses integrasi dan interkoneksi antara berbagai aspek kehidupan manusia di seluruh dunia semakin mudah dan erat. Secara keseluruhan, globalisasi adalah fenomena yang kompleks dan multidimensional yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika dunia.

Media sosial menjadi salah satu *platform* interaksi penting di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia, seiring majunya teknologi informasi, canggihnya gadget dan meluasnya jangkauan internet. Dikutip dari *wearesocial.com*, jumlah pengguna media sosial di Indonesia pada Januari 2023 sebanyak 167,0 juta. Pada awal tahun 2023 jumlah pengguna media sosial di Indonesia setara dengan 60,4 persen dari total populasi. Dari jumlah tersebut, pada awal tahun 2023 terdapat 153,7 juta pengguna berusia 18 tahun ke atas, setara dengan 79,5 persen dari total populasi berusia 18 tahun ke atas.

Secara keseluruhan 78,5 persen dari total basis pengguna internet di Indonesia (berapa pun usianya) menggunakan setidaknya satu *platform* media sosial pada Januari 2023. Saat ini, 46,8 persen pengguna media sosial di Indonesia adalah

perempuan, sedangkan 53,2 persen adalah laki-laki.

Salah satu dampak dari globalisasi adalah tumbuhnya masyarakat yang konsumtif. Masyarakat konsumtif ini cenderung membeli barang bukan karena nilai manfaatnya, melainkan karena gaya hidup (*life style*) demi sebuah citra (Haryanto, 2011:163). Belakangan dengan memanfaatkan media sosial, konsumerisme telah beralih dari toko nyata ke *online*. Hal ini semakin mendapatkan momentumnya ketika pandemi *Covid-19*, dimana interaksi langsung antar manusia dibatasi.

Situasi dan kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan berbagai *platform* jualan semakin banyak dan berkembang dengan pesat, bahkan meningkatkan nilai valuasinya. Sifat konsumtif yang memanfaatkan media sosial ini akhirnya berubah tujuan dari sekedar dari sekedar belanja memenuhi kebutuhan pribadi menjadi pembentukan citra diri.

Kekayaan selalu diidentikan dengan kesuksesan dan kemakmuran seseorang dalam hidupnya. Mengapa seseorang melakukan ingin terlihat kaya? Alasan untuk terlihat kaya dan hidup mewah bisa sangat bervariasi tergantung pada individu dan situasi masing-masing.

Beberapa alasan yang mungkin mendasari keinginan ini termasuk:

1. Status Sosial: Beberapa orang mungkin ingin terlihat kaya agar mereka dihormati dan diakui dalam lingkungan sosial mereka. Kekayaan sering kali dianggap sebagai simbol status yang tinggi dalam masyarakat.
2. Pengaruh dan Koneksi: Dalam beberapa kasus, memiliki penampilan kaya dapat memberikan seseorang pengaruh lebih besar dalam lingkungan bisnis, politik, atau sosial. Orang yang terlihat kaya mungkin lebih mudah menarik perhatian dan membangun koneksi yang bermanfaat.
3. Kepercayaan Diri: Bagi beberapa

individu, penampilan yang mencerminkan kemewahan dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka. Ini bisa memberikan perasaan lebih baik tentang diri sendiri dan membantu mereka merasa lebih berharga.

4. Kesempatan Ekonomi: Terlihat kaya dalam beberapa kasus bisa membuka peluang ekonomi. Orang mungkin percaya bahwa mereka akan lebih mudah diterima dalam kesempatan bisnis atau investasi jika mereka terlihat sukses secara finansial.
5. Daya Tarik Pribadi: Beberapa orang percaya bahwa penampilan yang mencerminkan kemewahan dapat membuat mereka lebih menarik secara fisik dan emosional bagi orang lain.
6. Membentuk Persepsi: Dalam lingkungan sosial yang sering menilai buku dari sampulnya, terlihat kaya bisa mempengaruhi cara orang lain memandang Anda. Meskipun ini bisa positif, tetapi juga dapat menciptakan harapan dan tekanan untuk selalu mempertahankan citra ini.
7. Keamanan Finansial: Orang mungkin percaya bahwa terlihat kaya akan membuat mereka kurang rentan terhadap situasi keuangan yang sulit atau krisis.

Seseorang yang merasa dirinya berhasil secara finansial terkadang memerlukan ruang untuk menunjukkan keberhasilannya tersebut, terlepas apapun alasannya entah itu untuk memotivasi, orang lain, *marketing*, menyombongkan diri, atau bahkan bertujuan untuk menipu masyarakat. Untuk mengaktualisasikan dan mendapatkan pengakuan akan suatu keberhasilan, maka media sosial adalah medium pencitraan yang paling tepat, Hal ini dikarenakan pencitraan di media sosial selain karena jangkauan luas, efektif, efisien dan murah.

Pembentukan citra (pencitraan) akan melibatkan persepsi, keyakinan, dan penilaian seseorang terhadap dirinya

sendiri. Tujuan pembentukan citra diri dapat bervariasi antara individu, namun beberapa tujuan umum yang sering mendasari proses ini termasuk:

1. **Pengenalan Identitas:** Individu ingin memahami siapa mereka sebenarnya, termasuk nilai-nilai, minat, keahlian, dan karakteristik pribadi yang membentuk identitas mereka.
2. **Penerimaan Diri:** Orang ingin merasa nyaman dan menerima diri mereka sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan. Ini melibatkan merasa puas dengan siapa mereka dan mengatasi perasaan negatif terhadap diri sendiri.
3. **Penghargaan dari Orang Lain:** Terkadang, citra diri dibentuk untuk mendapatkan pengakuan, penerimaan, dan penghargaan dari orang lain. Ini bisa meliputi usaha untuk mendapatkan persetujuan sosial atau pujian.
4. **Keseimbangan Emosi:** Citra diri yang positif dapat membantu individu merasa lebih percaya diri dan bahagia, serta mengatasi perasaan cemas, rendah diri, atau tidak aman.
5. **Pengaruh Sosial:** Citra diri juga dapat dipengaruhi oleh norma dan ekspektasi sosial. Individu mungkin berusaha untuk sesuai dengan gambaran yang dianggap "ideal" oleh masyarakat atau kelompok tertentu.
6. **Pencapaian Tujuan:** Pembentukan citra diri yang positif dapat memotivasi individu untuk mencapai tujuan pribadi dan profesional. Citra diri yang kuat dapat meningkatkan motivasi untuk mengatasi rintangan dan mencapai prestasi.
7. **Hubungan Antar Personal:** Citra diri yang positif dapat mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan orang lain. Orang mungkin merasa lebih mampu menjalin hubungan yang sehat dan saling mendukung.
8. **Adaptasi Sosial:** Citra diri yang baik dapat membantu individu beradaptasi

dengan lingkungan sosial yang beragam dan dinamis. Ini membantu individu merasa lebih nyaman dan terlibat dalam berbagai situasi.

9. **Pengembangan Diri:** Citra diri yang berkembang dapat mendorong individu untuk terus tumbuh, belajar, dan berkembang sebagai individu.

Jadi secara *Flexing* dan hedonisme sebagai salah satu cara yang ditempuh dalam membentuk citra diri, awalnya dipengaruhi oleh konsumerisme yang merupakan hasil dari globalisasi.

Mengelola citra diri lewat kekayaan di media sosial bisa memberikan kesan bahwa Anda hidup dalam kemewahan. Namun, banyak orang yang memposting gambar dan cerita yang tidak selalu mencerminkan kehidupan sehari-hari mereka.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang melakukan *Flexing* dan bergaya hidup hedonis di media sosial. Namun, perlu dicatat beberapa faktor tersebut di bawah ini tidak hanya berlaku bagi ASN saja, tapi juga bagi semua kalangan entah itu pejabat, pesohor, pengusaha ataupun masyarakat biasa, kalangan, tanpa memandang pendidikan, status sosial dan lainnya.

Dalam konteks ini, bahasan kita terkait dengan faktor - faktor yang terjadi pada ASN, yaitu:

1. **Tampil kaya di sosial media** telah menjadi kebutuhan. Hal ini menggambarkan fenomena yang sering terjadi dalam era media sosial saat ini, di mana banyak orang merasa dorongan untuk memamerkan gaya hidup yang kaya atau mewah melalui *platform-platform* seperti Instagram, Facebook, dan lainnya. Fenomena ini dapat memiliki berbagai latar belakang dan dampak, termasuk aspek positif dan negatif.
2. **Ingin tampil berbeda dengan yang lain**, sehingga terlihat kaya merupakan salah satu bentuk pembedanya.

Keinginan untuk tampil berbeda dari yang lain adalah dorongan yang umum dialami oleh banyak orang. Ini mencerminkan keinginan individu untuk mengekspresikan identitas unik mereka, menciptakan citra yang membedakan, atau menggambarkan karakteristik yang membuat mereka berbeda. Motivasi ini dapat muncul dari berbagai latar belakang dan memiliki dampak yang beragam:

3. Ingin mendapatkan *previlage* (hak istimewa) ketika berada di masyarakat. Keinginan untuk mendapatkan hak istimewa atau hak istimewa dalam masyarakat adalah dorongan yang sering muncul pada individu. Namun, penting untuk memahami bahwa keinginan semacam itu dapat memiliki implikasi yang kompleks dan beragam.
4. Lemahnya pengawasan baik dari atasan maupun pengawas internal. Lemahnya pengawasan dari atasan atau pengawas internal dapat menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa bebas untuk melakukan *flexing* atau tindakan serupa. Hal ini bisa memiliki beberapa implikasi:

ASN yang secara administrasi sebagai pelaksana tugas dan kewajiban pemerintah, juga sekaligus sebagai individu bagian dari masyarakat, diharapkan mampu berperan efektif dalam memberikan layanan administratif, menjamin keutuhan, menjaga persatuan dan kekompakan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. ASN menjadi cerminan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN. Setiap gerak langkah ASN dipantau dan diamati oleh seluruh masyarakat. Apalagi akses informasi semakin terbuka lebar tanpa ada sekat seperti saat ini.

Oleh karena itu, tindak tanduk, pola tingkah ASN perlu dijaga baik dalam kehidupan nyata maupun di dunia maya. ASN diharapkan menjunjung tinggi nilai kesederhanaan dan profesionalismenya. Dalam Undang-Undang ASN Nomor 5

Tahun 2014 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS tidak ada pasal yang mengatur sanksi terhadap ASN yang menampakkan hidup mewah dan memamerkan harta kekayaannya di media sosial.

Adapun aturan yang terkait pola hidup sederhana ASN diatur pada Pasal 10 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Di dalam aturan tersebut dijelaskan apabila ASN melanggar kode etik akan dikenai sanksi moral dan dapat juga dikenakan kode etik.

Aturan lainnya terkait ASN dilarang pamer harta di media sosial ataupun yang berkaitan dengan gaya hidup hanya berupa himbauan yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana poin 2 yang isinya, “Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepatutan sebagai rasa empati kepada masyarakat”.

Namun, dalam kedua aturan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit jenis sanksi moral ataupun administratif yang dapat diterima oleh ASN. Artinya sanksi yang diberikan dapat bersifat subjektivitas.

Apabila kita kembalikan ke PP Nomor 94 Tahun 2021, maka seorang ASN yang melanggar dapat dikenakan hukuman disiplin baik itu ringan, sedang, ataupun berat tergantung tingkat kesalahannya. Untuk itu penting bagi organisasi memiliki sistem pengawasan yang kuat dan transparan, serta mempromosikan budaya di mana karyawan merasa nyaman untuk menjadi diri sendiri dan tidak merasa perlu melakukan *flexing* dan bergaya hidup hedonis untuk mendapatkan pengakuan atau perhatian.

Pengawasan yang tepat dapat membantu mencegah perilaku yang tidak etis, memastikan informasi yang akurat, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat

dan produktif. Menurut suhartini (2016) dampak dari media sosial terhadap pencitraan diri terjadinya penilaian/judgement baik eksplisit ataupun implisit yang nantinya berujung pada pencitraan diri baik citra yang baik ataupun buruk.

Oleh karena itu, perlunya tetap memperhatikan etika, norma dan nilai yang berlaku di masyarakat karena media massa merupakan ruang publik.

E. PENUTUP

Kemajuan teknologi informasi memiliki peran yang besar dalam terjadinya perubahan perilaku kehidupan manusia saat ini. Era industri 4.0 yang menitik beratkan pada kemajuan teknologi informasi, AI (*Artificial Intelligence*) dan robotik telah mendorong globalisasi melampaui seluruh batas yang ada.

Kemajuan ini telah membuat proses integrasi dan interkoneksi antara berbagai aspek kehidupan manusia di seluruh dunia semakin bebas, mudah dan erat. Salah satu dampaknya terjadi perubahan gaya hidup manusia.

Dari hasil kajian ini diketahui beberapa faktor yang menyebabkan seorang melakukan *flexing* dan hedonisme. Faktor-faktor tersebut dianggap menjadi sebab mengapa seseorang melakukan *flexing* dan hedonisme di media sosial. Kondisi ini sebenarnya terjadi pada semua kalangan dan berbagai level tidak terkecuali ASN.

1. Tampil kaya di sosial media telah menjadi kebutuhan.
2. Ingin tampil berbeda dengan yang lain, sehingga terlihat kaya merupakan salah satu bentuk pembedanya.
3. Ingin mendapatkan *previlage* (hak istimewa) ketika berada di masyarakat.
4. Khusus untuk ASN lemahnya pengawasan baik dari atasan maupun pengawas internal.

Tidak ada larangan bagi ASN untuk menjadi kaya ketika merasa kebutuhannya belum terpenuhi, tetapi yang perlu diperhatikan adalah asal dari kekayaannya itu.

Media sosial pada akhirnya selain memiliki manfaat yang baik bagi kehidupan masyarakat, disisi lain berdampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat. Fungsi media sosial menjadi absurd ketika tujuan awal diciptakannya yaitu sebagai alat berkomunikasi dan berbagi informasi oleh penggunaannya mulai bergeser menjadi alat pencitraan. *Flexing* dan hedonisme sebagai cara pencitraan diri oleh ASN akhirnya akan memproduksi penilaian yang negatif dari masyarakat.

Oleh karena itu, media sosial sebagai ruang digital publik harus dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya tanpa meninggalkan etika, norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, kiranya literasi digital menjadi penting dan urgen pada masyarakat yang dimulai dari usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Creswell, John W. 2017. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Ketiga. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danial dan Wasriah. 2009. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Haryanto, Sindung. (2011). *Sosiologi Ekonomi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nasrullah, Rulli. (2016). *Media sosial: perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi* Cetakan 2. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Soemirat, Soleh & Ardianto, Elvinaro. 2007, *Dasar-Dasar Public Relation*. Cetakan kelima, Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.

Jurnal :

Bakti, Setia Indra *et al*, 2020. Pamer Kemewahan: Kajian Teori Konsumsi Thorstein Veblen. *Jurnal Sosiologi USK*, No.1, Vol.14, 81-98:

<https://www.mendeley.com/catalogue/b8af810b-ed9d-349f-8bc7-8dedff834cca/>

Khayati, Nur *et al*. 2022. Fenomena Flexing di Media Sosial Sebagai Ajang Pengakuan Kelas Sosial Dengan Kajian Teori Fungsionalisme Struktural. *Jurnal Sosialisasi*, No.2, Vol.9, 113-121:

<https://ojs.unm.ac.id/sosialisasi/article/download/32543/17021>.

Setiadi, Ahmad. 2016. Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Universitas BSI*, No.2, Vol.16: <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/1283/1055>

Suhartini, Sri. 2016. Dampak Media Sosial Terhadap Pencitraan Diri. *Program Studi Manajemen Industri, Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana*, (1), 89-99: https://www.stt-wastukencana.ac.id/jurnal/download/6.-DAMPAK-MEDIA-SOSIAL_Sri-S..pdf

Dokumen :

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Website:

<https://www.voaindonesia.com/a/asn-boleh-kaya-flexing-jangan-/7014336.html>. Diakses tanggal 19/08/2023

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/flexing>. Diakses tanggal 20/08/2023 Diakses tanggal 19/08/2023

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/flexing>. Diakses tanggal 21/08/23

<https://wearesocial.com/id/blog/2023/07/social-media-use-reaches-new-milestone/>. Diakses tanggal 23/08/2023.

GAYA HIDUP MEWAH (HEDONISME) APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) ANTARA FENOMENA, PENDAPATAN DAN ETIKA

(The Luxury Lifestyles (Hedonism) of Civil Servants (ASN) Between The Phenomenon, Incomes and Ethics)

Rakhmad Kavin

(Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang)
e-mail: kavinrakhmad@gmail.com

ABSTRAK

Paper Ini membahas tentang Gaya Hidup Mewah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Sudut Pandang Fenomena, Pendapatan, Etika dan Solusi. Adanya beberapa Kejadian ASN yang memamerkan Gaya Hidup mewah mulai dari cara berpenampilan, tempat kumpul dan makan makan, hingga kebiasaan hedon lainnya, padahal Menteri Negara PAN dan RB Republik Indonesia melalui Surat Edaran (SE) Menteri PAN-RB Nomor 13/2014 yang memerintahkan ASN untuk menjalankan hidup sederhana. Kemudian penulis menjelaskan konsep Hedonisme, aturan terkait ASN, Pendapatan ASN hingga Solusi dalam menyelesaikan masalah ini yang menitikberatkan pada Kepemimpinan.

Kata Kunci: Hedonisme, ASN, Pendapatan dan Etika.

ABSTRACT

This paper discusses the luxury lifestyle of state civil servants (ASN) from the perspective of phenomena, income, ethics and solutions. There have been several incidents of ASN showing off a luxurious lifestyle starting from the way they look, where they gather and eat, to other hedonistic habits, even though the Minister of State for PAN and RB of the Republic of Indonesia has issued a circular letter (SE) of the Minister of PAN-RB number 13/2014 which ordered ASN to live a simple life. Then the author explains the concept of Hedonism, regulations related to ASN, ASN income and solutions to solving this problem which focuses on leadership.

Keywords: Hedonism, ASN, Income and Ethics.

A. PENDAHULUAN

Menjaga kepercayaan Masyarakat atas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan kebutuhan dan harapan setiap Lembaga Pemerintahan di era Demokrasi. Semua aktivitas penyelenggara Pemerintahan baik dari pejabat politik, pejabat negara hingga ASN tidak lepas dari Sorotan Masyarakat, apalagi perubahan teknologi informasi yang begitu cepat mengantarkan kita pada dimensi yang tak terbatas, hampir tidak ada sekat antara satu dan lainnya, hanya dengan menggunakan gadget seseorang mengetahui apa yang terjadi dibelahan dunia lainnya.

Beberapa waktu ini kita sering mendengar pemberitaan terkait gaya hidup mewah ASN yang mempertontonkan tingkah laku yang tidak seharusnya ditunjukkan didunia maya dimana pada sisi yang lain Masyarakat masih dalam kemiskinan. Tercatat BPS pada tahun 2023 merilis Persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, atau berjumlah 25,90 juta orang. prihatin kepada kondisi ini, Presiden Jokowi pada hari kamis tanggal 2 february 2023 dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara menyampaikan kekecewaan masyarakat terhadap ASN, dan Anggota Porli atas gaya hidup mewah dengan menyebutkan bahwa beliau mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat dan mengingatkan seluruh yang hadir untuk berhati-hati dalam gaya hidup seorang aparat,. Padahal hal tersebut telah dilarang oleh Menteri Negara PAN dan RB Republik Indonesia melalui Surat Edaran (SE) Menteri PAN-RB Nomor 13/2014 pada poin kedua yang menyebutkan bahwa ASN “Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepatutan sebagai rasa empati kepada Masyarakat”.

Menteri Negara PAN RB Republik Indonesia menegaskan agar ASN tidak memperlihatkan Gaya Hidup Mewah dan

sikap berlebihan terhadap kehidupannya. agar ASN menyadari bahwa mereka adalah pelayan Masyarakat, dan pelayan selayaknya berlaku dan bertindak sebagaimana *Public servant*. Pada Paper ini akan dijelaskan sumber pendapatan sah dari ASN yang mengambil *sample* pada Pemerintah Kota Pangkalpinang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah tertentu dalam memecahkan masalah yang diteliti. Hal ini sesuai dengan pendapat Norbuko dan Achmadi (2007:13) bahwa, penelitian adalah usaha-usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran, dimana dalam usaha-usaha itu dilakukan dengan metode ilmiah. Lebih lanjut Erliana Hasan (2011:162) menjelaskan metode penelitan dapat dinyatakan sebagai upaya guna memperoleh tambahan pemahaman tentang gejala sosial, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendefinisikan masalah sebagai cara untuk membentuk pengetahuan.
2. Memperoleh informasi tentang gejala dan masalah yang diteliti (melakukan analisis dan tafsiran data dalam kaitan dengan masalah yang diteliti).
3. Melakukan komunikasi dan diseminasi hasil penelitian itu kepada orang lain.

Kemudian Nazir (2005:84) menyampaikan Semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian disebut desain penelitian. Desain penelitian dalam arti sempit hanya mengenai metode pengumpulan dan analisis data saja, sedangkan dalam arti luas meliputi proses perencanaan, penelitian atau proses operasional penelitian. Arikunto (2010:90) menambahkan bahwa, desain penelitian adalah rancangan yang dibuat penulis sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan

dilaksanakan. Rancangan digunakan untuk menentukan metode penelitian yang akan menentukan kadar ilmiah hasil penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dilihat dari proses tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam desain penelitian terdiri dari dua bagian penting yaitu perencanaan penelitian dan pelaksanaan penelitian atau proses operasional penelitian.

Kemudian dalam melakukan penelitian dapat menggunakan metode kualitatif. Sugiyono (2012:1) mengemukakan metode penelitian kualitatif adalah “metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Paper ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu menggunakan analisis data secara induktif, dengan menarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penarikan kesimpulan secara induktif dimulai dengan menyatukan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum.

C. KERANGKA TEORI BIROKRASI

Para ahli administrasi negara banyak mengemukakan apa yang dimaksud dengan birokrasi diantaranya Blau dan Mayer dalam Sawir (2020:3) menyebutkan birokrasi sebagai tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas tugas administrasi yang besar dengan mengoordinasikan secara sistematis pekerjaan dari banyak orang dalam satu organisasi. Kemudian Abdullah dalam

Sawir(2020: 4-5) membagi birokrasi menjadi tiga kategori yaitu:

- a. Birokrasi pemerintahan Umum, yaitu rangkaian organisasi pemerintah yang menjalankan tugas tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan dari tingkat pusat sampai daerah. Tugas-tugasnya bersifat mengatur.
- b. Birokrasi pembangunan, yaitu organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang sektor yang khusus guna mencapai tujuan pembangunan, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, industri dan lainnya, fungsi pokoknya pembangunan.
- c. Birokrasi pelayanan yaitu unit organisasi pemerintahan yang pada hakikatnya merupakan bagian atau berhubungan dengan masyarakat, dimana fungsi pokoknya adalah pelayanan.

Birokrasi yang berjalan di Indonesia sudah tergolong lama, mulai dari zaman kerajaan, zaman *colonial*, paska kemerdekaan, orde baru hingga reformasi, tentunya banyak perubahan yang dialami dalam perjalanan birokrasi yang mengikuti perubahan lingkungan, akan tetapi Menurut Webert dalam Miftah (2008;18) tipe birokrasi yang rasional atau ideal itu bercirikan sebagai berikut:

1. Pejabat secara rasional bebas, tetapi dibatasi oleh jabatannya.
2. Jabatan disusun oleh tingkat hierarki dari atas ke bawah dan kesamping dengan konsekuensinya berupa perbedaan kekuasaan.
3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lain.
4. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan.
5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya.
6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun.

7. Terdapat struktur pengembangan karir yang jelas.
8. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya untuk kepentingan pribadi.
9. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.

Dalam Konteks Pemerintahan Indonesia Birokrasi tersebar dari Pemerintah pusat hingga Pemerintah Daerah daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Konsep Hidup Mewah/Hedonisme.

Konsep hidup Mewah sering disebut dengan gaya Hidup Hedon atau *hedonism*, berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia *hedonisme/he·do·nis·me/ /hédonisme/* adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Konsep Hedonisme merupakan pengembangan studi motivasi yang tidak terlepas dari beberapa ahli seperti Adam Smith, dan J.S Mill, dimana Zainuddin Mustapa dalam perilaku organisasi (2008:124) mengatakan bahwa konsep Hedonisme menyatakan bahwa seseorang mempunyai kecenderungan mencari keenakan dan kesenangan dan menghindari ketidakenakan dan kesusahan.

Agus Dermawan (2017:135) menyebutkan *Hedoneismen* berasal dari Kata *Hedone* memiliki arti kesenangan, kepuasan, kenikmatan, bahwa *hedone* memiliki Prinsip yang menekankan bahwa kebahagiaan merupakan tujuan satu satunya dan paling utama dalam Tindakan manusia kemudian beliau menyebutkan empat kategori hedonis:

1. *Hedonism Individual* yang menegaskan bahwa setiap manusia pasti mencita-citakan kesenangan diri setinggi tingginya.
2. *Hedonism universal* yang mensyaratkan kesenangan diri sendiri seharusnya juga

menyangkut kesenangan orang lain.

3. *Hedonism* Kuantitatif, mempercayai bahwa setiap orang ingin meraup jumlah kesenangan sebanyak banyaknya.
4. Hedonisme Kualitatif lebih menekankan bahwa mutu kesenangan adalah sangat penting bagi kehidupan.

Selanjutnya Trimartati menyebutkan bahwa Aspek-Aspek gaya hidup hedonisme antara lain:

1. Kegiatan (*Activities*) Tindakan nyata seperti banyak menghabiskan waktu diluar rumah, lebih banyak membeli barang-barang yang kurang diperlukan, pergi ke pusat perbelanjaan dan kafe. Walaupun tindakan ini dapat dipahami, tetapi kegiatan ini tidak dapat diukur secara langsung.
2. Minat (*Interest*) Seperti hal dalam *fashion*, makanan, benda-benda mewah, tempat kumpul, dan selalu ingin jadi pusat perhatian.
3. Opini (*Opinion*) Adalah “jawaban” lisan atau tertulis yang diberikan sebagai respon terhadap situasi stimulus dimana semacam “pertanyaan” diajukan. Opini digunakan untuk mendeskripsikan pemikiran, harapan, dan evaluasi dalam perilaku.

Gaya hidup mewah dalam konteks ASN adalah gaya hidup yang dilakukan oleh ASN dengan mempertunjukkan kemewahan dalam kehidupan kesehariannya, baik dalam bentuk *Fashion* yakni seringnya menggunakan barang barang mewah seperti pakaian branded, sepatu *branded* dan atau benda lain digunakan dalam rangka meningkatkan status kepercayaan diri supaya terlihat mewah, atau gaya hidup ASN yang mempertontonkan perilaku sering makan di restoran mewah baik sendiri dan berkelompok yang dilakukan berulang kali, dan juga perilaku sering berkumpul di tempat nongkrong yang mewah bersama teman sesama ASN bahkan pada waktu jam kerja. Apalagi seringnya kita melihat ASN Dinas Luar (DL) untuk melaksanakan tugas

tertentu namun kesan seperti liburan, *healing*, *shopping* dan lainnya yang sering dipertontonkan. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan *public* terkait kinerja ASN.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

ASN dan Pendapatannya.

Dalam undang undang nomor 5 tahun 2014 disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada ketentuan ini ASN dibagi menjadi dua golongan yaitu Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas ASN diatur dengan kebijakan merit sistem yaitu dalam pengaturan kebijakan dan Manajemen ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan dengan mengedepankan asas-asas sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;
- c. proporsionalitas;
- d. keterpaduan;
- e. delegasi;

- f. netralitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektif dan efisien;
- i. keterbukaan;
- j. nondiskriminatif;
- k. persatuan dan kesatuan;
- l. keadilan dan kesetaraan; dan
- m. kesejahteraan.

ASN dalam melaksanakan tugas berkedudukan di Instansi Pusat baik di Ibukota Negara atau Vertikal maupun pada Instansi Daerah yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk ASN Pusat Pendapatan dibebankan pada APBN sedangkan untuk ASN Daerah dibebankan pada APBD. Dengan rincian gaji dan tunjangan. Gaji yang didapatkan ASN sesuai dengan Pangkat, masa kerja, beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan, sedangkan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, meliputi tunjangan kinerja yang dibayarkan sesuai pencapaian kinerja dan tunjangan kemahalan yang dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.

Setelah kita melihat sumber pendapatan ASN berdasarkan UU nomor 5 Tahun 2014, maka kita dapat melihat bagaimana pendapatan PNS pada Pemerintah Kota Pangkalpinang. Jumlah PNS Tahun 2022 berdasarkan Kota Pangkalpinang dalam Angka yang dipublikasikan oleh BPS Kota Pangkalpinang tahun 2023 sebanyak 3282 ASN yang menduduki jabatan fungsional umum, fungsional tertentu hingga Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana diagram di bawah ini:



Gambar 1
Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan Tahun 2022.

Fungsional guru sebanyak 993 orang, fungsional medis sebanyak 596 orang, Fungsional Teknis sebanyak 359 orang, fungsional umum sebanyak 861 orang, Pejabat Pengawas sebanyak 322 orang, pejabat Administor sebanyak 125 orang dan Pejabat Pimpinan Tinggi sebanyak 26 orang. Dari data tersebut ada beberapa jabatan yang masih kosong atau belum diisi ASN. Kemudian ketika dipersentasekan maka Jumlah ASN sebagai berikut:



Gambar 2.
Persentase ASN Berdasarkan Jabatan Tahun 2022.

Hal ini menggambarkan bahwa jumlah jabatan terbanyak yang diduduki oleh Fungsional guru sebanyak 30%, selanjutnya fungsional umum sebanyak 26%, fungsional medis sebanyak 18%,

Fungsional Teknis sebanyak 11%, Pejabat Pengawas sebanyak 10%, pejabat Administor sebanyak 4% dan Pejabat Pimpinan Tinggi sebanyak 1% dari jumlah ASN pada Pangkalpinang. PNS adalah Fungsional Tertentu. Kemudian ketika dilihat berdasarkan Kepangkatan maka ASN di Kota Pangkalpinang berjumlah sebagai berikut:



Gambar 3.
Jumlah ASN Berdasarkan Kepangkatan Tahun 2022.

ASN golongan I Sebanyak 5 orang, golongan II 469 orang, golongan III 2143 orang dan golongan IV 422 orang sedangkan PPPK sebanyak 243 orang. Kemudian ketika dipersentasekan maka

Jumlah ASN berdasarkan kepangkatan sebagai berikut:



Gambar 4.

Persentase ASN Berdasarkan Kepangkatan Tahun 2022.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa ASN golongan I tidak mencapai 1%, golongan II sebanyak 14%, golongan III sebanyak 65% dan golongan IV 13% sedangkan PPPK sebanyak 8%. Dari data di atas akan digambarkan pendapatan rata-rata ASN di Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dapat kita lihat gaji ASN sebagai berikut:

Golongan I (lulusan SD dan SMP);	
Golongan I.a:	Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800
Golongan I.b:	Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900
Golongan I.c:	Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500
Golongan I.d:	Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500

Golongan II (lulusan SMA dan D-III);	
Golongan II.a:	Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600
Golongan II.b:	Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300
Golongan II.c:	Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000
Golongan II.d:	Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000
Golongan III (lulusan S1 hingga S3);	
Golongan III.a:	Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400
Golongan III.b:	Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600
Golongan III.c:	Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
Golongan III.d:	Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000
Golongan IV	
Golongan IV.a:	Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
Golongan IV.b:	Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500
Golongan IV.c:	Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900
Golongan IV.d:	Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700
Golongan IV.e:	Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

Tabel 1.
Gaji ASN berdasarkan kepangkatan.

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa Gaji ASN terendah didapatkan bagi Golongan I (lulusan SD-SMP) sebesar 1.560.800; dan Gaji Tertinggi yaitu Golongan IVe Sebesar 5.901.200; Namun tidak banyak ASN yang sampai pada Golongan IVe. Jika kita analisa dengan tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 58/KEP/Bakeuda/I/2022 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, ditambah tunjangan jabatan berdasarkan Perpres Nomor 26 tahun 2007 tentang Tujangan Jabatan Struktural, Perpres Nomor 108 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan, dan Perpres Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perkam Medis, Dan Teknisi Elektromedis maka rata-rata ASN Kota Pangkalpinang mendapatkan Pendapatan bulanan sebagai berikut:

No	Jabatan /Golongan	Gaji	Tunjangan jabatan	TPP	Rata-rata pendapatan
1	Sekretaris Daerah	3.173.100-5.661.700	3.250.000	30.000.000	36.423.100-38.911.700
2	Kepala SKPD (Eselon II)/ Golongan	3.044.300-5.431.900	2.025.000	9.000.000	14.069.300-16.456.900
3	Direktur RSUD	2.920.800-5.000.000	1.260.000	8.500.000	12.680.800-14.760.000

4	Kabag/Sekretaris SKPD (Eselon IIIa)	3.044.300-5.211.500	1.260.000	3.600.000	7.904.300-10.071.500
5	Kabid (Eselon IIIb)	2.920.800-5.000.000	980.000	2.900.000	6.800.800-8.880.000
6	Pengawas (Eselon IVa)	2.688.500-4.797.000	540.000	2.700.000	5.928.500-8.037.000
7	Fungsional Guru	2.579.400-5.211.500	286.000-389.000	2.050.000-2.350.000	2.865.400-7.950.500
8	Fungsional Kesehatan (Dokter Spesialis)	2.688.500-5.431.900	278.000-1.230.000	21.400.000	24.366.500-28.061.900
9	Fungsional Kesehatan (Dokter Umum) dan tenaga kesehatan lainnya	2.688.500-5.431.900	278.000-1.230.000	3.700.000-5.350.000	6.666.500-12.011.900
10	Fungsional Tertentu Lainnya	2.579.400-5.211.500	360.000-1.380.000	2.250.000-2.950.000	5.189.400-9.541.500
11	Fungsional Umum	1.560.800-3.820.000	180.000	2.250.000-2.950.000	3.990.800-6.950.000

Tabel 2.

Pendapatan ASN Kota Pangkalpinang.

Dari persentasi jabatan di atas maka dapat digambarkan bahwa Fungsional Guru sebanyak 30% ASN mendapatkan penghasilan 2.865.400-7.950.500 (data ini di luar tunjangan Sertifikasi), selanjutnya Fungsional Umum sebanyak 26% ASN mendapatkan 3.990.800-6.950.000, Fungsional Medis sebanyak 18% ASN yang terdiri dari Dokter Spesialis sebesar 24.366.500-28.061.900, Dokter Umum dan Tenaga Kesehatan lainnya 6.666.500-12.011.900 dan Fungsional Teknis sebanyak 11% ASN mendapatkan sebesar 5.189.400-9.541.500 sedangkan Pejabat Pengawas/Eselon IV sebanyak 10% ASN

mendapatkan 5.928.500-8.037.000, pejabat Administor sebanyak 4% ASN 7.904.300-10.071.500 dan Pejabat Pimpinan Tinggi sebanyak 1% yakni Sekretasi Daerah 36.423.100-38.911.700 dan kepala SKPD sebesar 14.069.300-16.456.900 dari jumlah ASN di Pangkalpinang.

Gambaran di atas memberikan pandangan bahwa hanya Sebagian kecil PNS saja yang Pendapatannya di atas 10.000.000 juta, yaitu 1% atau sebanyak 26 ASN yang terdiri dari Sekretaris daerah dan Kepada OPD, kemudian beberapa Pejabat Eselon III di bawah 3,6% ASN, dan Sebagian kecil dari tenaga Kesehatan yakni Dokter Spesialis dan juga Dirut RSUD. Selebihnya 3.071 ASN atau 95% ASN berpendapatan di bawah 10.000.000;. Jika ASN tidak mampu mengatur keuangan dengan baik, maka jumlah pendapatan tersebut dapat dikategorikan kurang, apalagi dengan kondisi sekarang dimana biaya Pendidikan anak yang mahal ditambah harga tanah dan rumah yang selalu meningkat. Tidak selayaknya ASN hidup Hedon atau mewah.

Etika dan Solusinya.

Menjadi Seorang ASN tidak seperti dibayangkan oleh banyak orang karena kehidupannya terikat akan kode etik ASN, Y. Gede Sutmana dalam Jurnal Cakrawarti Vol.2 (2019:223) mengatakan “etika merupakan refleksi filosofis atas moral, maka dapat dimengerti bahwa etika tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan pada norma, tetapi penekanannya justru pada aspek refleksi dalam upaya mencari “bagaimana” bertindak. Dalam konteks ASN, maka etika yang dimaksud lebih pada refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku atau tindakan dan keputusan dalam menjalankan tugas dan fungsi”. Tentunya gaya hidup mewah yang ditunjukkan oleh ASN merusak dan melukai hati masyarakat yang melihat. Beberapa sebab Fenomena tersebut dikarenakan:

1. ASN tidak peka terhadap Kondisi Masyarakat.

Dengan jumlah kemiskinan yang cukup tinggi yaitu 9,36 persen, maka gaya hidup mewah menggambarkan tidak pekanya ASN terhadap kondisi bangsa dan negara, padahal gaji ASN dibayarkan melalui Pajak yang ditarik dari Masyarakat. oleh karena itu pembinaan ASN harus melalui pendekatan Abdi Negara, sehingga ketika sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai wajib baginya mementingkan kepentingan Negara, bangsa dan masyarakat diatas kepentingan Pribadi dan golongan.

2. Tidak memahami Kode Etik Pegawai dan Tidak memahami hakikat Pelayan Publik.

Banyaknya ASN yang tidak memahami Kode Etik ASN secara terperinci, sehingga tidak memahami hakikat Pelayan Masyarakat. Pelayan harus mampu menunjukkan tingkah dan perilaku sebagai pelayanan masyarakat, karena pada konsep ini yang dilayani memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pelayanan.

Solusi.

Sosok pemimpin menjadi poin penting dalam menyelesaikan perilaku Hedon ASN. Pemimpin dalam konteks pemerintahan daerah terbagi menjadi 2 jenis yaitu pertama, pemimpin politik atau pemimpin yang diangkat dari proses politik pemilihan Kepala Daerah, kedua pemimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memimpin Dinas, Badan atau Kantor yang ada di Pemerintahan Daerah.

1. Penegakan *reward* dan *Punishment*, di mana penghargaan bagi ASN yang berprestasi harus diberikan agar motivasi dan semangat kerja ASN meningkat, begitu pula dengan *Punishment* terhadap ASN, harus diberikan kepada ASN yang melanggar Kode Etik ataupun melanggar aturan pemerintahan.

Meskipun hingga hari ini jarang terdengar ASN di Kota Pangkalpinang ataupun Kabupaten se-Provinsi Bangka Belitung Menjalankan Sidang Etik karena pelanggaran ASN. Sanksi dapat diberikan berupa:

- a. Sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan pejabat Pembina Kepegawaian berupa pernyataan tertutup/terbuka dengan menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan.
 - b. Hukuman disiplin/ Tindakan administrasi atas rekomendasi majelis kode etik dan ditetapkan pejabat Pembina Kepegawaian.
2. Pendidikan dan pelatihan, ASN harus terus diberikan Pendidikan Etik dan moral dalam menyelenggarakan Pemerintahan. Agar mampu memposisikan diri sebagai seorang Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.
 3. ASN diwajibkan melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN secara periodik.

E. PENUTUP

Gaya hidup mewah ASN disebabkan ketidakpekaan terhadap Kondisi Masyarakat dan Ketidakhahaman terkait Kode Etik Pegawai serta hakikat *Public Servant*, padahal 95% pendapatan ASN terbelang sedang dan hanya cukup untuk kehidupan sederhana tidak untuk kehidupan *hedonism*, sedangkan hanya 5% ASN yang pendapatannya di atas Rp10.000.000;. oleh karena itu dibutuhkan kepemimpinan Pemerintahan Daerah yang kuat, jujur dan sederhana untuk menjawab permasalahan ini melalui kepemimpinan sebagai teladan, tegas dan mengimplementasikan *reward* dan *punishment* serta pendidikan dan pelatihan yang menitik beratkan pada jiwa kenegarawanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dermawan (2017), *Perjalanan Turis Siluman. Sejarah, Filosofi, Budaya, Politik dan Peristiwa*, KPG (kepuustakaan Populer Gramedia), Jakarta.
- Cholid Norbuko dan Abu Achmadi (2007), *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hasan, Erliana, 2011, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Mustapa Zainuddin (2018), *Perilaku Organisasi dalam prespektif Manajemen Organisasi*, Celebes Media Perkasa, Makasar.
- Nazir (2005), *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- Sawir Muhammad (2020), *Birokrasi pelayan publik (konsep, teori dan aplikasi)*, Penerbit deepublish, Sleman jogjakarta.
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Suharsimi Arikunto (2010), *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Thoha Miftah (2008), *Birokrasi pemerintahan Indonesia di era reformasi*, Penerbit kecana, Jakarta.
- Trimartati Novita (2014), *Studi Kasus Tentang Gaya Hidup Hedonisme Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, Jurnal PSIKOPEDAGOGIA Universitas Ahmad Dahlan, No.1 Vol. 3, ISSN: 2301-6167 20.
- ASN, Y. Gede Sutmana (2019), *Etika Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Jurnal Cakrawarti No 1 Vol.2, ISSN :26205173.
- Buku Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Dalam Angka, BPS Kota Pangkalpinang Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Kedelapan Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil.

Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2007
tentang Tugangan Jabatan Struktural.

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007
Tentang Tunjangan Tenaga
Kependidikan, dan Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2006 Tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter,
Dokter Gigi, Apoteker, Asisten
Apoteker, Pranata Laboratorium
Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan,
Entomolog Kesehatan, Sanitarian,
Administrator Kesehatan, Penyuluh
Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi,
Nutrisionis, Bidan, Perawat,
Radiografer, Perekam Medis, Dan
Teknisi Elektromedis.

Keputusan Walikota Pangkalpinang nomor:
58/KEP/Bakeuda/I/2022 tentang
Besaran Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kota
Pangkalpinang.

Surat edaran Menpan RB RI nomor 13
Tahun 2014.

BPS dalam Merdeka.com Diakses pada
<https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-aturan-larangan-pejabat-negara-dan-asn-bergaya-hidup-mewah-hot-issue.html>
tanggal 25 september 2023.

FENOMENA FLEXING HARTA MEWAH DI KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN IMPLIKASINYA

(The Phenomenon of Flexing Luxury Assets Among State Civil Servants [ASN] and Its Implications)

Imam Kusnadi

(Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

e-mail: Imamkusnadi09@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami fenomena *flexing* atau perilaku pamer kekayaan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menganalisis implikasinya terhadap integritas, etika, serta citra lembaga pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan berbagai situasi, kondisi, dan variabel yang terkait dengan fenomena *flexing* harta mewah. Data dikumpulkan melalui teknik data sekunder dan pencarian foto di media sosial. Fenomena *flexing* dianalisis dalam kerangka teori fungsionalisme struktural. Media sosial seperti *Instagram*, *TikTok*, dan *Facebook* menjadi platform utama di mana *flexing* harta mewah menjadi topik perbincangan diberbagai kalangan sosial. Memamerkan kekayaan di media sosial bertujuan untuk mendapatkan penghargaan, prestise, dan status sosial, meskipun kepemilikan aset tersebut belum tentu mencerminkan kekayaan yang didapatkan dengan cara-cara yang sah. Fenomena ini juga mencakup ASN yang terlibat dalam perilaku *flexing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *flexing* harta mewah yang dilakukan oleh ASN dan anggota keluarganya di media sosial menciptakan dampak serius terhadap integritas dan penegakan etika ASN serta lembaga pemerintah. Perilaku ini dapat menciptakan ketidaksejajaran antara gaya hidup yang mereka tampilkan di media sosial dengan penghasilan yang seharusnya mereka terima sebagai pelayan publik.

Kata Kunci: *flexing*, media sosial, Aparatur Sipil Negara.

ABSTRACT

This study aims to delve into the phenomenon of flexing or flaunting wealth within the Civil Servants (ASN) and analyze its implications on the integrity, ethics, and image of government institutions. This is crucial as it has the potential to create public mistrust in public servants and raise suspicions of corruption or gratification. Data for this research were collected through secondary data techniques and the retrieval of photos from social media to acquire relevant data and enhance the researcher's understanding of the phenomenon of flexing wealth. This phenomenon of flexing wealth is analyzed within the framework of structural functionalism theory. Social media platforms such as Instagram, TikTok, and Facebook serve as the primary platforms where flexing wealth has become a topic of discussion across various social strata. Displaying wealth on social media aims to garner recognition, prestige, and social status, even though the ownership of these assets may not necessarily reflect legitimate sources of wealth. This phenomenon also encompasses civil servants (ASN) engaged in flexing behavior. The research findings indicate that the phenomenon of flexing luxury possessions by Civil Servants (ASN) and their family members on social media has serious implications for the integrity and ethical enforcement of both the Civil Servants and government institutions. This behavior can create a misalignment between the lifestyle they showcase on social media and the income they should rightfully receive as public servants.

Keywords: *flexing, social media, civil servants.*

A. PENDAHULUAN

Perhatian publik dihebohkan oleh berita-berita media massa mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau anggota keluarga mereka yang terlibat dalam tindakan *flexing* atau pamer harta melalui media sosial. *Flexing* atau pamer harta mewah ini merujuk pada perilaku dimana seseorang dengan sengaja memamerkan atau mengekspos kekayaan dan kemewahannya dengan tingkat yang berlebihan, sering kali melalui platform media sosial atau bahkan dalam interaksi sehari-hari mereka. Perilaku *flexing* terkait dengan harta benda ini dapat diartikan tindakan pamer akan kekayaan yang dimilikinya. Meski begitu, beberapa orang tak selalu setuju dengan tindakan *flexing* karena merupakan salah satu bentuk dari dampak negatif kemajuan teknologi. (Hendrik Nuryanto, 2022).

Asal-usul istilah *flexing* bermula dari bahasa gaul masyarakat kulit hitam untuk "menunjukkan keberanian" atau "pamer" sejak tahun 1990-an. Istilah tersebut secara khusus juga digunakan oleh rapper *Ice Cube* melalui lagunya yang berjudul "*It Was a Good Day*" pada tahun 1992. (Nurul Azizah, 2022). Perilaku *flexing* sebenarnya berkebalikan dari orang kaya sungguhan, bahwa orang kaya yang sesungguhnya tidak ingin menjadi pusat perhatian. Hal tersebut berkaitan dengan sebuah pepatah yang mengatakan *poverty screams, but wealth whispers* yang artinya kemiskinan menjerit, tetapi kekayaan berbisik (Rhenald Kasali, 2022).

Beberapa fenomena *flexing* harta mewah yang dilakukan oleh ASN di media sosial yang merupakan perilaku hedonisme yaitu: mereka memamerkan mobil mewah atau motor gede yang harganya jauh di atas penghasilan yang dimiliki sebagai ASN, memamerkan kehidupan mewah di hotel-hotel mahal, seperti pamer foto di *suite* hotel bintang lima atau liburan ke luar negeri yang mewah dan mahal. Selain itu, ASN juga memperlihatkan barang-

barang mewah seperti tas, sepatu, jam tangan, dan perhiasan yang harganya tidak sebanding dengan penghasilan mereka. Mereka juga suka memamerkan rumah mewah yang sangat besar dan mahal yang tidak dapat dibiayai dengan penghasilan ASN. ASN juga menunjukkan aktivitas olahraga yang mahal seperti bermain *golf* atau bersepeda di tempat yang mewah dan eksklusif. Perilaku hedonisme seakan telah menjadi sesuatu hal yang lazim di masyarakat yang diperlihatkan dengan cara langsung maupun lewat sosial media (Rahadi, 2017).

ASN seharusnya memberikan contoh yang baik dalam penegakan integritas dan penegakan etika menjalankan tugas-tugas mereka sebagai pelayan publik. Secara tegas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara [UU ASN], menyebutkan bahwa Pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, maka perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Komara, 2019).

Perilaku *flexing*, yang melibatkan pamer harta mewah yang tidak sejalan dengan gaji atau pendapatan ASN, dapat menimbulkan kecurigaan bahwa ASN tersebut memperoleh kekayaan melalui cara yang tidak sah. Fenomena ini dapat merusak citra dan kredibilitas pemerintah, bahkan memicu dugaan korupsi atau gratifikasi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan lembaga antikorupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat mengambil tindakan tegas. Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020

mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) melaporkan perubahan harta kekayaannya setiap tahun dan melibatkan pelaporan harta kekayaan keluarga inti. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat berujung pada sanksi administratif maupun pidana sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Flexing harta mewah dapat menjadi sumber informasi bagi orang-orang yang memiliki niat tidak baik, seperti para pelaku tindak kejahatan. Hal ini tentunya sangat membahayakan keselamatan dan keamanan ASN yang bersangkutan. Oleh karena itu, ASN harus lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial, mereka juga perlu memastikan keamanan akun media sosial mereka dan tidak membagikan informasi pribadi yang sensitif secara terbuka di media sosial. Dampak negatif digitalisasi juga harus menjadi hal yang perlu diingat, bahwa selain ada hal positif, ada juga yang negatif. Apabila ada sesuatu hal yang tidak kita harapkan, berarti harus adaantisipasi (Andri Johandri, 2023).

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menggali lebih dalam fenomena *flexing* atau perilaku pamer harta mewah yang melibatkan ASN dan anggota keluarganya di media sosial, yaitu:

1. Mendeskripsikan fenomena *flexing* harta mewah yang dilakukan oleh ASN dan keluarganya di media sosial, termasuk jenis-jenis barang yang sering dipamerkan, seperti mobil mewah, perhiasan, liburan mewah, dan sebagainya.
2. Menganalisis dampak dari perilaku *flexing* harta mewah ini terhadap integritas dan penegakan etika ASN serta lembaga pemerintah.
3. Menyoroti aspek hukum dan peraturan terkait pelaporan harta kekayaan ASN, serta implikasi hukum yang timbul jika terjadi pelanggaran terkait *flexing* harta mewah.
4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong ASN untuk melakukan

flexing harta mewah di media sosial.

5. Memberikan saran dan rekomendasi langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mengatasi fenomena *flexing* harta mewah oleh ASN, termasuk upaya untuk meningkatkan kesadaran akan etika dan integritas.

Diharapkan makalah ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami masalah secara lebih mendalam serta memberikan informasi bagi ASN dalam menggunakan media sosial secara bijak dan etis.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, menjadikannya sebuah penelitian deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena *flexing* oleh ASN saat ini menjadi perbincangan hangat dalam masyarakat. Deskripsi dalam konteks penelitian ini merujuk pada upaya peneliti untuk menggambarkan berbagai situasi, kondisi, dan variabel yang terkait dengan fenomena *flexing* oleh ASN.

Penelitian ini juga menggunakan metode penjabaran serta langkah-langkah eksploratif yang sesuai dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif dan pendekatan fenomenologi dipilih karena peneliti ingin mendalami perilaku *flexing* dalam konteks gaya hidup masa kini, yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menggambarkan makna yang terkandung dalam konsep *flexing*, dengan fokus pada pemahaman yang diinginkan oleh individu yang terlibat dalam tindakan *flexing*. (Nugrahani & Hum, 2014).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi tanpa partisipasi, di mana peneliti hanya mengamati fenomena yang terjadi di media sosial. Selain itu, peneliti juga

mengumpulkan data berupa gambar atau foto yang diambil dari platform media sosial seperti *Instagram*, *TikTok*, dan *Facebook*. Data-data ini kemudian diperkuat dengan penggunaan data sekunder, yang melibatkan pencarian data yang relevan untuk memperluas wawasan penelitian, khususnya terkait dengan tindakan memamerkan kekayaan.

C. KERANGKA TEORI ATAU KERANGKA KONSEP

Perkembangan zaman mengubah pola hidup dan pola konsumsi secara pesat. Kenyataannya aktivitas yang dirasakan saat ini, semuanya akan gampang untuk dilakukan. Pola tingkah laku serta pola konsumsi berbeda dari masa ke masa. Selain itu, sekarang ini sangat mudah mengetahui kehidupan seseorang. Wabah modernisasi dan globalisasi ini sangat cepat menyatu dalam kehidupan masyarakat berkembang dan transisi. Salah satu penyebabnya dipicu oleh perkembangan teknologi media informatika, baik media elektronik maupun media cetak (massa). Selain itu, kondisi psikologis individu masuk dalam kategori tidak berdaya (*helpless*) dalam memfilter sejumlah produk baru dan perubahan kebudayaan. Pada akhirnya kepekaan individu terhadap konsep baru menjadi kian tak kritis. Contoh, pemilihan fashion (busana) ala Barat saat ini sangat disukai generasi muda masa kini. Bagi mereka yang penting adalah gaya atau *merk* produk baru. Kondisi serupa, juga terjadi pada pola berinteraksi, berkomunikasi dan bertransaksi sosial lainnya, yang semakin meninggalkan sistem panutan tradisional dan bergeser pada konsep modernisasi. Ironisnya perilaku-perilaku seperti itu tidak hanya disukai oleh kaula muda, tapi juga mewabah pada kalangan dewasa atau orang tua (Safuwani, 2007).

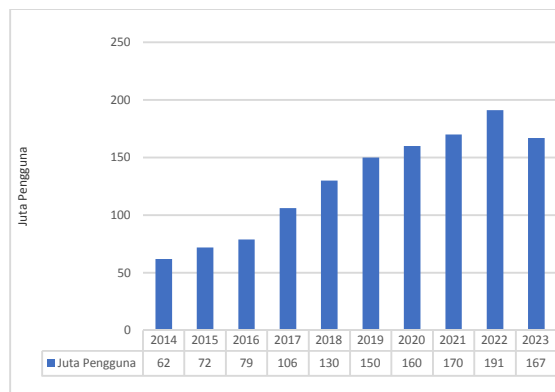
Gaya hidup bukan lagi hal semata dalam pemenuhan kehidupan atau kebudayaan pada benda, tetapi sebagai ajang untuk panggung sosial. Sarat makna-

makna dalam sosial menjadi hal yang direbutkan, konflik posisi juga terjadi pada anggota-anggota di masyarakat yang saling terlibat. Budaya konsumerisme yang dalamnya adalah produk- produk konsumen yang digunakan sebagai pembentukan gaya, personalitas, dan status sosial (Subagya, 2010).

Pada masa kini, globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, khususnya *internet* dan media sosial, telah menciptakan sebuah realitas di mana individu dari beragam latar belakang sosial dan usia dapat dengan mudah berinteraksi dan berbagi momen dalam kehidupan mereka dengan audiens global. Dampak dari kemudahan konektivitas ini adalah semakin mencoloknya fenomena *flexing* yang melibatkan berbagai pelaku, termasuk pemilik bisnis, selebriti, dan individu biasa, yang turut berpartisipasi dalam berbagai bentuk tindakan *flexing* dalam budaya digital ini.

Pemanfaatan teknologi memberikan arahan, dapat mempunyai pemahaman dan keahlian yang bermatabat. Kebiasaan pamer kekayaan sesekali dilakukan di jejaring sosial dianggap tidak elok dilakukan. Menjadi penikmat jejaring sosial harus pandai dan mahir memilah yang layak untuk ditonton. Harta bukan menjadi nilai keunggulan seseorang. Dalam agama pun melarang melakukan perbuatan pamer atau riya (Anisatul Mardiah, 2022).

Jejaring sosial yang semakin pesat. Tidak bisa dipungkiri faedahnya dalam kehidupan, baik dalam kegiatan sosialisasi maupun pendidikan. Bisa saja yang bermula kecil bisa menjadi besar dengan jejaring sosial, bagi masyarakat khususnya kalangan remaja. Jejaring sosial sudah mencandu yang berdampak ke penggunaanya, tidak ada hari tanpa membuka jejaring sosial (Wilga Secsio Ratsja Putri dkk, 2016).



Sumber : *We Are Social*

Gambar 1.

Grafik Jumlah Pengguna Aktif Media Sosial di Indonesia Periode 2014-2023

Pada Januari 2023, Indonesia memiliki 167 juta pengguna media sosial, mencakup 60,4% populasi, meskipun mengalami penurunan 12,57%. Waktu rata-rata yang dihabiskan di media sosial adalah 3 jam 18 menit per hari, menduduki peringkat sepuluh di dunia. Sementara itu, pengguna *internet* di Indonesia mencapai 212,9 juta, naik 3,85% dari tahun sebelumnya. Lebih dari 98% pengguna *internet* menggunakan ponsel, dan mereka rata-rata online selama 7 jam 42 menit per hari. Meskipun ada penurunan dalam pengguna media sosial, penggunaan *internet* terus meningkat di Indonesia. (dataindonesia.id, 2023).

Fenomena *flexing*, sebuah istilah yang mungkin belum begitu dikenal beberapa tahun yang lalu, saat ini telah menjadi bagian dari budaya *online*. *Flexing* merujuk pada tindakan seseorang memamerkan kekayaan dan kemewahannya kepada khalayak umum, terutama melalui media sosial. Istilah *flexing* sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1899 oleh Thorstein Veblen di bukunya yang berjudul *The Theory of the Leisure Class: An Economic Study in the Evolution of Institutions*.

Perbuatan dan tindakan *flexing* kebanyakan kebalikan dari seorang yang benar-benar kaya. Orang kaya sungguhan tidak mengharapkan dirinya menjadi daya tarik. Pada akhirnya kenyataannya kemiskinan berkoar-koar,

tetapi kekayaan menutup mulut (Rahardjo, 2009). *Flexing* dapat dilakukan untuk mencari pengakuan dan perhatian dari orang lain, terutama bagi orang kaya baru.

Menurut *Cambridge Dictionary*, *flexing* adalah tindakan untuk menunjukkan sesuatu yang kalian miliki atau raih, akan tetapi dengan cara yang dianggap orang lain tak menyenangkan. Lalu, menurut kamus Merriam Webster, *flexing* adalah tindakan memamerkan sesuatu yang dimiliki secara pribadi dengan cara lebih mencolok.

Dalam definisi sederhana, *flexing* adalah tindakan memamerkan apa yang dimiliki oleh seseorang kepada orang lain. Ini bisa berupa mobil mewah, perhiasan mahal, liburan mewah, atau bahkan gaya hidup yang tampak glamor. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perangkat seluler yang canggih, *flexing* menjadi semakin mudah dilakukan. Seseorang hanya perlu mengunggah foto atau video, dan dengan sekali klik, informasi ini bisa tersebar ke seluruh dunia.

Berkaitan dalam perilaku ataupun gaya hidup, orang-orang tersebut biasanya dalam budaya konsumerismenya di dasarkan pada kelas-kelas sosial. Kelas-kelas sosial yang berada di atas tersebut akan memperlihatkan atau menggambarkan karakteristik pada pengomsumsian budayanya. Sebaliknya juga, pada kelas sosial bawah dan menengah juga akan terlihat ciri khasnya dalam konsumsi sehari-hari. Dikarenakan setiap orang memiliki kesanggupan yang berbeda dalam konsumsi, dari hal tersebut terjadilah diferensiasi yang mereka alami sehingga bermunculan sekumpulan pada individu beristilahkan "*social climber*" yang berartikan tindakan sosial ataupun perilaku yang di lakukan seseorang agar status sosialnya meningkat (Agustianti & Amir, 2020).

Flexing atau pamer harta di media sosial juga terjadi di kalangan ASN dan keluarganya, ASN itu boleh kaya. Artinya, makmur itu boleh, dan secara akademis,

sebenarnya kalau tuntutan kebutuhan hidup pegawai masih belum mencukupi, mestinya memang harus dipenuhi, namun, ada prasyarat bagi ASN terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Harus dipastikan dari hitungan pendapatan sebagai abdi negara, sebenarnya sulit bagi ASN untuk bergelimang harta. Karena itu, jika ada ASN kaya, negara harus memastikan bahwa harta itu diperolehnya secara wajar (Wahyudi Kumorotomo, 2023).

Fenomena ini telah menarik perhatian publik dan pemerintah, terutama setelah upaya penindakan dilakukan. KEMENDAGRI bahkan akan mengeluarkan regulasi anti-*flexing* untuk ASN, yang melarang mereka memamerkan kekayaan di depan umum. Meskipun demikian, *flexing* barang mewah sebenarnya sulit dilakukan ASN pada umumnya (normal) karena faktor sosialita dan *social identity*, ASN memiliki apa yang disebut sebagai *self consciousness*, ini sebagai rasa tanggung jawab sosial dan tanggung jawab terhadap pemerintah. Lebih penting dari itu adalah karena sebagai ASN dan pejabat publik, mereka harus bisa mempertanggungjawabkan aktivitasnya karena menggunakan uang rakyat dan pajak. Karena itu, ASN yang melakukan *flexing* di media sosial, sebenarnya dapat dikategorikan sebagai kurang berempati terhadap kondisi masyarakat (Zainal Abidin, 2023).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena *flexing* harta mewah yang dilakukan oleh ASN dan anggota keluarganya di media sosial merupakan sebuah peristiwa yang mencerminkan perilaku individu atau kelompok yang secara berlebihan memamerkan atau mengekspos kekayaan dan kemewahannya. Melalui *platform* media sosial, terutama di jejaring sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, dan *Tik Tok*, individu-individu tersebut secara intensif membagikan konten yang menampilkan berbagai barang-barang mewah yang mereka miliki.

Polemik seputar ASN yang memiliki kekayaan yang mencolok sering kali muncul bukan sebagai hasil dari upaya pencegahan atau pengungkapan oleh aparat hukum, melainkan lebih sering dipicu oleh kasus kriminal tertentu. Salah satu contoh kasus adalah ketika seorang pelaku kriminal, yang ternyata adalah anak dari pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, menggunakan akun media sosialnya untuk menampilkan perilaku *flexing* atau pamer kekayaan. Kasus ini kemudian merembet hingga mencakup kekayaan orangtuanya yang merupakan ASN.

Dari satu kasus seperti ini, dampaknya meluas ke berbagai kasus lainnya, termasuk di Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Bea dan Cukai, KPK, kepolisian, Badan Pertanahan, serta berbagai kementerian dan lembaga lainnya, termasuk pejabat pemerintah daerah beserta keluarganya. Hal ini mencerminkan kompleksitas isu *flexing* harta mewah dan dampaknya yang dapat mempengaruhi berbagai lapisan pemerintahan dan lembaga di Indonesia. Terakhir, pejabat di Sekretariat Negara dinonaktifkan pada 19 Maret 2023, setelah istrinya diketahui gemar *flexing* barang mewah di akun media sosial. Warganet seolah-olah berlomba mengulik kekayaan ASN yang terlihat dari akun media sosial mereka. Uniknya, setelah upaya penindakan dilakukan, tercatat penjualan motor besar dan tas mewah meningkat tajam di berbagai laman jual-beli daring yang dinilai sebagai respon para ASN itu menjual koleksi mahal.

Memamerkan harta, sebenarnya adalah kecenderungan setiap orang, termasuk ASN, Secara psikologi, ada dorongan untuk *self esteem*. Untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, variabel lainnya adalah upaya untuk menunjukkan identitas. Beberapa pernyataan “Dia ingin mengatakan, siapa saya. Artinya, menunjukkan barang mewah, yang *limited edition* itu menunjukkan identitas diri, misalnya sebagai orang yang sukses,”

Namun, ada juga identitas sosial. “Siapa yang ada di belakangnya, sosialitanya itu siapa saja, dia berteman dengan siapa, bahwa sejumlah pejabat tidak hanya memamerkan barang ketika dia sendiri, tetapi juga dengan kelompoknya”. Pernyataan tersebut menunjukkan *social identity*.

Dalam fenomena *flexing* harta mewah, salah satu jenis barang yang sering dipamerkan adalah kendaraan bermotor, terutama mobil mewah dan motor gede. ASN dan keluarganya seringkali membagikan foto atau video kendaraan-kendaraan mewah dengan latar belakang yang mencolok, seperti parkir di depan hotel mewah atau pusat perbelanjaan eksklusif. Mobil mewah yang harganya jauh di atas penghasilan yang seharusnya mereka terima sebagai ASN menjadi salah satu sorotan utama dalam tindakan *flexing*. Selain itu, perhiasan juga sering menjadi objek yang dipamerkan, seperti cincin berlian, kalung emas, atau jam tangan mewah. Foto-foto liburan ke destinasi eksotis yang mahal, seperti menginap di suite hotel bintang lima atau berlibur ke luar negeri dengan fasilitas yang mewah, juga sering dibagikan untuk memamerkan gaya hidup mewah. Tas-tas desainer juga menjadi objek *flexing* yang populer, menciptakan kesan bahwa mereka mampu membeli barang-barang mewah ini dengan mudah. Semua tindakan ini merupakan bagian dari usaha untuk mempertunjukkan kekayaan dan status sosial yang lebih tinggi daripada yang sebenarnya mereka miliki.

Flexing harta mewah seperti yang sering terjadi di media sosial menciptakan sejumlah permasalahan. Pertama, perilaku ini menggambarkan adanya ketimpangan yang mencolok antara gaya hidup oleh individu, termasuk ASN dan anggota keluarganya di media sosial dengan penghasilan yang seharusnya mereka terima sebagai pelayan publik. Kesenjangan ini menyebabkan adanya dugaan bahwa mereka memperoleh kekayaan tersebut melalui cara yang tidak sah atau melanggar

aturan yang berlaku - menerima gratifikasi atau terlibat dalam tindak pidana korupsi. Kedua, fenomena *flexing* harta mewah ini mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap integritas ASN dan merosotnya citra dan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.

Upaya untuk menekan fenomena *flexing* harta mewah di kalangan pejabat, terutama ASN, memerlukan berbagai strategi yang efektif. Salah satu langkah awal adalah memberikan himbauan dan edukasi kepada pejabat serta masyarakat tentang dampak negatif dari *flexing* harta mewah. Dalam jangka pendek, himbauan ini mungkin dapat memberikan dampak positif dengan mengurangi perilaku *flexing* yang berlebihan.

Namun, untuk mencapai efek yang berkelanjutan dalam jangka panjang, diperlukan adanya sanksi yang diterapkan sebagai tindak lanjut dari himbauan dan edukasi tersebut. Sanksi dapat berupa sanksi administratif, peringatan etika, penundaan kenaikan pangkat, atau bahkan pemberhentian tidak dengan hormat. Kombinasi antara pendekatan pencegahan melalui himbauan dan edukasi dengan pengawasan serta penerapan sanksi yang tegas dapat menjadi strategi efektif dalam mengurangi fenomena *flexing* harta mewah di kalangan pejabat dan ASN.

Pemberian sanksi etika, administratif, bahkan pidana hukum dalam kasus-kasus terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang merupakan upaya dalam menekan *flexing* harta mewah di kalangan pejabat dan ASN. Pemberian sanksi bukan hanya sebagai tindakan penegakan aturan, tetapi juga sebagai upaya menunjukkan bahwa perilaku tersebut tidak dapat diterima dalam tatanan pemerintahan yang bersih dan transparan. Sanksi tersebut juga dapat menjadi efek jera bagi pelaku *flexing*. Selain itu, melibatkan peran masyarakat, terutama warganet. Komentar negatif dan sikap kritis dari masyarakat dapat menjadi

alat pengawasan sosial yang efektif, mendorong para pejabat untuk merenungkan kembali perilaku mereka dan menjaga integritasnya.

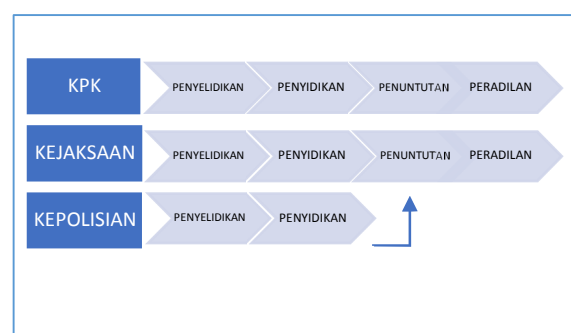
Semua langkah tersebut diharapkan dapat membentuk tatanan yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan fenomena *flexing* harta mewah serta menjaga integritas dan penegakan etika ASN serta lembaga pemerintah.

Beberapa implikasi hukum bagi ASN yang akan timbul jika terjadi pelanggaran terkait *flexing* harta mewah, yaitu:

1. Pelanggaran Terhadap Aturan Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/Aparatur Sipil Negara (LHKPN/LHKASN): Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara mengatur tata cara pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, termasuk ASN. Jika seorang ASN atau anggota keluarga intinya memamerkan kekayaan yang tidak sejalan dengan laporan harta kekayaan yang mereka ajukan, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan pelaporan LHKPN/LHKASN. Pelanggaran semacam ini dapat mengakibatkan sanksi administratif, seperti teguran, penundaan kenaikan pangkat, atau bahkan pemberhentian tidak dengan hormat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pelanggaran Terhadap Kode Etik ASN: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 3 menegaskan bahwa setiap ASN

dalam menjalankan tugas dan profesinya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang mencakup nilai dasar serta kode etik dan perilaku. Selain sanksi administratif, ASN juga tunduk pada sanksi etika jika terbukti terlibat dalam perilaku *flexing* harta mewah yang mencerminkan perilaku yang tidak etis. Jenis sanksi etika ini meliputi peringatan etika, penundaan kenaikan pangkat, atau bahkan pemberhentian dengan tidak hormat. Lembaga pemerintah memiliki kode etik yang mengatur perilaku ASN, dan pelanggaran terhadap kode etik ini dapat berdampak serius bagi ASN yang terlibat dalam *flexing* harta mewah.

3. Tuntutan Hukum di Peradilan: Jika *flexing* harta mewah menciptakan dugaan serius terkait tindak pidana korupsi atau gratifikasi, maka penyelidikan hukum dapat dilakukan. Penyelidikan ini dapat melibatkan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apabila terdapat bukti yang cukup, individu yang terlibat dapat diadili secara pidana, yang dapat berakibat pada hukuman penjara dan denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Gambar 2.

Bagan Kewenangan Aparat Penegak Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam upaya memahami akar permasalahan fenomena *flexing*, langkah awal dengan cara mengidentifikasi faktor-melakukan *flexing* harta mewah di media

sosial. Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi pendorong perilaku *flexing* harta mewah di kalangan ASN:

1. *Prestise* dan Status Sosial: Salah satu motivasi utama ASN untuk melakukan *flexing* adalah dorongan untuk meningkatkan prestise dan status sosial. Mereka melihat kepemilikan barang-barang mewah sebagai simbol status prestisius yang diinginkan dan merasa perlu untuk memamerkannya agar dianggap sukses dan berpengaruh dalam masyarakat.
2. Tekanan Sosial - *Insecure* ASN yang merasa kurang yakin diri juga bisa mengalami tekanan sosial untuk terlihat sukses dan mapan secara finansial. Mereka mungkin merasa bahwa masyarakat, rekan kerja, atau bahkan keluarga mengharapkan mereka memiliki gaya hidup mewah. Tekanan ini dapat menjadi pendorong untuk terlibat dalam perilaku *flexing*.
3. Tren Media Sosial: Media sosial menciptakan tren di mana individu sering dibandingkan satu sama lain berdasarkan konten yang mereka unggah. ASN yang melihat rekan-rekan atau kenalan mereka memamerkan kekayaan di media sosial dapat merasa tertarik untuk ikut serta dalam tren ini, dengan harapan mendapatkan pengakuan sosial.
4. Faktor Ekonomi: Faktor ekonomi dapat memainkan peran. Jika seorang ASN merasa bahwa pendapatannya atau hartanya meningkat secara signifikan, mereka mungkin merasa lebih nyaman untuk memamerkan kekayaan mereka. Pertumbuhan ekonomi juga dapat menciptakan dorongan untuk berinvestasi dalam barang-barang mewah.
5. Kebutuhan akan Validasi dan Pengakuan: Seringkali, individu yang terlibat dalam perilaku *flexing* merasakan kebutuhan untuk diterima dan diakui oleh orang lain. Memamerkan kekayaan mereka di media sosial bisa memberikan mereka pengakuan positif dan perasaan validasi dari teman-teman dan *follower* mereka.
6. Kompetisi dan Keinginan untuk Bersaing: Sebagian ASN mungkin merasa dalam kompetisi dengan rekan-rekan sejawat mereka. Mereka berkeinginan untuk membuktikan bahwa mereka lebih sukses atau memiliki harta yang lebih banyak daripada yang lain. Dorongan untuk melakukan *flexing* dapat muncul sebagai upaya untuk memenangkan kompetisi ini.
7. Kurangnya Kesadaran Etika: Sebagian ASN mungkin merasa dalam kompetisi dengan rekan-rekan sejawat mereka. Mereka berkeinginan untuk membuktikan bahwa mereka lebih sukses atau memiliki aset yang lebih banyak daripada yang lain. Dorongan untuk melakukan *flexing* dapat muncul sebagai upaya untuk memenangkan kompetisi ini.
8. Dorongan untuk Meningkatkan Pengikut di Media Sosial: Sebagian ASN yang menggunakan *flexing* sebagai strategi untuk meningkatkan jumlah pengikut mereka di media sosial. Mereka mungkin meyakini bahwa postingan tentang kekayaan mereka akan menarik perhatian lebih banyak orang dan akhirnya meningkatkan popularitas mereka di *platform* media sosial tersebut.

Dengan adanya pemahaman atas faktor-faktor yang telah diidentifikasi, ASN beserta keluarganya dapat menghindari terjerumus dalam perilaku *flexing*, sementara pemerintah dan entitas yang berkompeten dapat merancang pendekatan yang lebih efektif dalam menangani fenomena *flexing* harta mewah di lingkungan ASN. Langkah-langkah seperti pendidikan dan peningkatan kesadaran etika, serta perubahan budaya organisasi, dapat diimplementasikan sebagai strategi yang dapat secara efektif mengurangi

praktik *flexing* yang tidak baik.

Untuk mengatasi fenomena *flexing* harta mewah secara pribadi oleh ASN dan beserta keluarga intinya, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

1. Berpikir Kritis: Mencari fakta dan data dari setiap informasi yang diterima sebelum memberikan respons atau mengambil keputusan. Kemampuan berpikir kritis membantu dalam menyaring informasi yang benar-benar relevan dan didasarkan pada fakta serta data yang valid.
2. Kerjakan Apa yang Diketahui: Sebelum mengikuti tren, untuk mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam konteks kegiatan positif, diharapkan ASN dan keluarganya untuk secara cermat mencari informasi lebih lanjut dan memahami proses serta potensi risiko yang mungkin timbul. Risiko ini dapat memiliki dampak yang merugikan baik bagi ASN maupun keluarganya. Jangan tergoda peningkatan status sosial dan oleh janji keuntungan instan, karena kekayaan memerlukan proses waktu dan usaha dan kerja keras.
3. Filter Media Sosial: Kontrol informasi yang masuk melalui media sosial dengan bijak. Pilih akun dan konten yang memberikan manfaat dan sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan media sosial yang bijak untuk kegiatan positif melibatkan berbagi informasi pendidikan, menggalang dana amal, memotivasi orang, mendukung isu-isu sosial, dan berbagi kreativitas tanpa berpamer kekayaan. Jika telah terjebak dalam budaya *flexing*, pertimbangkan untuk menghindari atau tidak melakukan kegiatan *flexing* di media sosial.
4. Kesederhanaan: Mengingatkan diri sendiri bahwa penilaian terhadap nilai individu tidak semata-mata bergantung pada dimensi materi atau akumulasi kekayaan, melainkan seharusnya difokuskan pada dimensi non-materi,

seperti etika karakter dan kontribusi sosial yang dihasilkan oleh individu tersebut.

5. Edukasi Risiko: Memahami risiko yang terkait dengan tindakan *flexing* harta mewah adalah kunci untuk menghindarinya. Kesadaran terhadap bagaimana perilaku ini dapat membuka pintu bagi berbagai ancaman, seperti kejahatan siber dan penyalahgunaan informasi dalam memotivasi untuk tidak melakukannya.

Selain mengatasinya secara pribadi oleh ASN dan keluarganya, pemerintah dan lembaga terkait dalam rangka mengatasi fenomena *flexing* harta mewah oleh ASN dapat mempertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendidikan Etika dan Integritas: Untuk mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan yang memuat materi terkait etika dan integritas yang diberikan kepada ASN. Tindakan ini akan membantu meningkatkan pemahaman ASN tentang nilai-nilai moral dan integritas dalam menjalankan tugas mereka sebagai pelayan publik.
2. Pedoman Kode Etik: Mengkomunikasikan pedoman kode etik kepada ASN. Pedoman tersebut harus secara rinci menjelaskan perilaku yang dilarang, termasuk *flexing* harta mewah, serta sanksi yang akan diberlakukan jika terjadi pelanggaran. Hal ini akan membantu ASN memahami batasan-batasan yang berlaku dan konsekuensi dari pelanggaran etika dalam menjalankan tugas mereka sebagai pelayan publik.
3. Pengendalian dan Pengawasan: Pemerintah dan lembaga terkait memiliki sejumlah mekanisme pengawasan terhadap kekayaan ASN yang mencakup mekanisme dan alat terkait, seperti pelaporan LHKPN/LHKASN, pencegahan gratifikasi, penanganan pelanggaran

- Kode Etik, dan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*).
4. Pelaporan Harta Kekayaan: Menjamin bahwa pelaporan harta kekayaan oleh ASN tersedia secara transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Tindakan ini akan memungkinkan masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kekayaan ASN dengan lebih efektif dan meningkatkan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
 5. Pengawasan Media Sosial: Pemerintah mempertimbangkan untuk mengawasi aktivitas media sosial yang mencurigakan dari ASN, terutama yang terkait dengan *flexing* harta mewah. Namun, langkah ini harus dilakukan dengan mematuhi aturan privasi yang berlaku dan memastikan bahwa tindakan pengawasan tersebut sesuai dengan hukum dan hak-hak ASN.
 6. Melaksanakan Sosialisasi Anti Korupsi dan Penegakan Integritas: Melaksanakan kampanye Anti Korupsi dan Penegakan Integritas yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada ASN mengenai bahaya dan dampak negatif dari *flexing* harta mewah adalah langkah yang bijak. Kampanye ini dapat menggandeng tokoh masyarakat atau selebriti yang memiliki potensi menjadi contoh teladan dan memiliki pengaruh besar dalam menyampaikan pesan-pesan tersebut.
 7. Memberikan Penghargaan atas Integritas: Mendorong dan mengakui ASN yang menjaga integritas mereka dengan baik. Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada ASN yang mematuhi etika dapat berfungsi sebagai insentif yang efektif, dalam merangsang motivasi dan mendorong ASN lainnya untuk berperilaku etis dalam pelaksanaan tugas mereka.
 8. Kerjasama dengan Media dan Masyarakat: Melibatkan media dan organisasi masyarakat dalam pengawasan perilaku ASN adalah langkah yang efektif dalam menjaga akuntabilitas. Media dapat berperan dalam memberikan informasi mengenai kasus *flexing* harta mewah yang mencurigakan, sementara organisasi masyarakat, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada anti korupsi seperti ICW, dapat berperan sebagai pengawas dengan mematuhi batasan-batasan kewenangan yang berlaku. Kerjasama ini dapat meningkatkan transparansi dan meminimalkan peluang untuk perilaku yang tidak etis.
 9. Pemberian Sanksi yang Tegas: Memastikan bahwa sanksi yang diberikan kepada ASN yang terbukti melakukan *flexing* harta mewah yang diperoleh secara tidak sah atau melanggar hukum harus dijalankan secara tegas dan efektif. Sanksi tersebut dapat meliputi tindakan administratif, tindakan disiplin, dan bahkan penuntutan hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang ada. Hal ini bertujuan untuk menegaskan bahwa pelanggaran etika dan hukum akan mendapatkan konsekuensi yang sesuai dan dapat menjadi pelajaran bagi ASN lainnya.
 10. Membangun Budaya Organisasi: Bertujuan meningkatkan integritas dan etika di antara ASN merupakan upaya pencegahan. Kegiatan ini mencakup pemberian contoh oleh pimpinan organisasi yang menunjukkan integritas dan etika yang baik sebagai teladan bagi seluruh anggota organisasi. Dengan membangun budaya yang mendorong integritas dan etika, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku yang benar dan pelayanan publik yang lebih baik.
- Dengan demikian, langkah-langkah di atas diharapkan dapat membantu mengurangi fenomena *flexing* harta mewah

oleh ASN dan secara bersama-sama memperkuat integritas lembaga pemerintah. Hal ini pada gilirannya akan membantu membangun kepercayaan masyarakat yang kuat terhadap ASN sebagai pelayan publik yang jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

E. PENUTUP

Fenomena *flexing* harta mewah yang dilakukan oleh ASN dan anggota keluarganya di media sosial menciptakan dampak serius terhadap integritas dan penegakan etika ASN serta lembaga pemerintah. Perilaku ini dapat menciptakan ketidaksejajaran antara gaya hidup yang mereka tampilkan di media sosial dengan penghasilan yang seharusnya mereka terima sebagai pelayan publik. Hal ini juga dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap integritas ASN dan lembaga pemerintah secara umum, merusak citra dan kredibilitas pemerintah dalam mata masyarakat, serta menimbulkan dugaan korupsi atau gratifikasi.

Mengakhiri tulisannya, penulis mengutip kata-kata bijak dari filsuf Jean-Jacques Rousseau yang relevan dengan pandangan yang disampaikan, bahwa kekayaan seseorang tidaklah dinilai dari jumlah harta yang dimilikinya, melainkan dari kemampuan untuk menahan diri dari memamerkan kekayaannya kepada orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianti, S., & Amir, R. (2020). Fenomena Social climber Mahasiswa dalam Pandangan Hukum Islam; Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*.
- Akbar, M. A. (2019). *Buku Ajar Konsep-Konsep Dasar Dalam Keperawatan Komunitas*. Deepublish.
- Anes Berlliana Permatasari (2023), Fenomena *Flexing* Sebagai Pengakuan Status Sosial, <https://jurnalpost.com/fenomena-flexing-sebagai-pengakuan-status-sosial/54025/> (diakses pada tanggal 21 September 2023).
- Avianto, B. N. (2022). *Filsafat Administrasi*. Bumi Aksara.
- Darmalaksana, W. (2022). Studi *Flexing* dalam Pandangan Hadis dengan Metode Tematik dan Analisis Etika Media Sosial. *Gunung Djati Conference Series*, 8, 412–427.
- Hendri S. Sasmita (2023) Alasan Fenomena *Flexing* di Media Sosial Marak Terjadi, <https://katanetizen.kompas.com/read/2023/05/04/175039285/alasan-fenomena-flexing-di-media-sosial-marak-terjadi?page=all> (diakses pada tanggal 21 September 2023).
- Hendrik Nuryanto (2022) *Flexing: Pengertian, Penyebab, Akibat, dan Cara Menghindarinya*, Gramedia.
- Ika Defianti (2022) Fenomena *Flexing*, Pamer Harta demi Eksistensi, <https://www.liputan6.com/news/read/4928859/journal-fenomena-flexing-pamer-harta-demi-eksistensi> (diakses pada tanggal 21 September 2023).
- Komara, E. (2019). Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia. 4(1), 73–84. <https://ejournal.upi.edu/index.php/mimbardik/article/view/16971> (diakses pada tanggal 17 November 2023).
- Mahyuddin, M. (2019). Social Climber dan Budaya Pamer: Paradoks Gaya Hidup Masyarakat Kontemporer. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 2(2).
- Mardiah, Anisatul. (2022) “Fenomena *Flexing*: Pamer di Media Sosial dalam Perspektif Etika Islam”, *International Conference on Tradition and Religius Studies*, no 1,

-
- <http://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/lc-TiaRS/article/view/239/152> (diakses pada tanggal 21 September 2023).
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 1.
- Nurul Azizah (2022). *Arti Flexing & Asal-Usul Katanya yang Ramai di Media Sosial*", <https://tirto.id/gpgJ>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*. Penerbit Buku Kompas.
- Rahadi, D. R. (2017). *Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax Di Media Sosial*, *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5(1), 58–70.
- Safuwani (2007) *Gaya Hidup, Konsumerisme dan Modernitas*, *Jurnal SUWA Universitas Malikussaleh*, Vol. V, No. 1, April 2007.
- Subagya, R. (2010). *Gaya Hidup Membeli Sebagai Tema Dalam Penciptaan Karya Lukis*. Surakarta – FSSR.
- Wahyudi Kumorotomo, Zainal Abidin, (2023) *ASN: Boleh Kaya, 'Flexing' Jangan*, <https://www.voaindonesia.com/a/asn-boleh-kaya-flexing-jangan-7014336.html> (diakses pada tanggal 21 September 2023).
- We Are Social (2023) *Pengguna Media Sosial di Indonesia Sebanyak 167 Juta pada 2023*, <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023> (diakses pada tanggal 21 September 2023).
- Wilga Secsio Ratsja Putri, R. Nunung Nurwati, & Meilanny Budiarti Santoso (2016) *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja*, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*.
-

KAITAN 7 CORE VALUE “BerAKHLAK” dengan PERILAKU GAYA HIDUP HEDONISME APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TAHUN 2023

(The Relationship Of The 7 (Seven) Core Value "BerAKHLAK" With The Hedonism Lifestyle Behavior Of State Civil Apparatus (ASN) In 2023)

Ladiasari

(UPT. Puskemas Tanjung Binga)
e-mail: ladiasari2708@gmail.com

ABSTRAK

Bagi seorang ASN, hedonisme merupakan pelanggaran kode etik. Perilaku hedonisme lebih mengarah pada membeli barang namun sebenarnya yang bersangkutan tidak terlalu membutuhkan. Hal ini berarti mereka mengutamakan kesenangan di atas manfaat atau kebutuhan. Tujuan penelitian ini ingin melihat sejauh mana seorang ASN mengetahui 7 (tujuh) *Core Value* terhadap perilaku gaya hidup hedonisme. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana peneliti menggunakan wawancara dan observasi langsung kepada partisipan. Partisipan yang diambil peneliti sebanyak 6 (enam) orang. Hasil penelitian mengatakan bahwa loyalnya seorang ASN tidak didapat dari mereka sebagai ASN saja tetapi mereka mempunyai usaha-usaha lain seperti mendirikan apotik sendiri, membuka praktek sendiri, mempunyai perkebunan sendiri, memiliki usaha-usaha kecil lainnya. Walaupun sebagian dari mereka tidak menerapkan hidup hedonisme mereka tetap memegang teguh 7 (tujuh) *Core Value* ASN yang disingkat “BerAKHLAK” yang bisa jabarkan sebagai berikut Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Kata Kunci: Hedonisme, perilaku gaya hidup, ASN, *Core Value*.

ABSTRACT

For an ASN, hedonism is a violation of the code of ethics. Hedonistic behavior is more directed towards buying things but actually the person concerned doesn't really need them. This means they prioritize pleasure above benefits or needs. The aim of this research is to see to what extent an ASN knows the 7 (Seven) Core Values regarding hedonistic lifestyle behavior. This research method uses a qualitative method where researchers use interviews and direct observation of informants. The informants taken by researchers were 6 (six) people. The results of the research show that the loyalty of an ASN does not only come from them being an ASN but from having other businesses such as setting up their own pharmacy, opening their own practice, having their own plantation, owning other small businesses. Even though some of them do not live a hedonistic life, they still adhere to the 7 (seven) Core Values of ASN, abbreviated as "BerAKHLAK," which can be described as follows: Service-oriented, Accountable, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive and Collaborative.

Keywords: Hedonic, Lifestyle, ASN (State Civil Servants), Core Value.

A. PENDAHULUAN

Hedonisme adalah sifat yang buruk. Hedonisme adalah kebalikan dari sifat hidup seadanya atau sederhana. Bagi seorang ASN, hedonisme merupakan pelanggaran kode etik (Herru Widiatmanti, 2023) Perilaku hedonisme lebih mengarah pada membeli barang namun sebenarnya yang bersangkutan tidak terlalu membutuhkan. Hal ini berarti mereka mengutamakan kesenangan di atas manfaat atau kebutuhan.

Hedonisme adalah salah satu istilah yang barangkali sudah sering Anda dengar dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini lazim dimaknai sebagai gaya hidup boros yang sepatutnya dihindari.

Secara harfiah kata hedonisme berasal dari bahasa Yunani *'hedone'* yang memiliki arti kesenangan. Hedonisme adalah sebuah ideologi atau pandangan hidup yang meyakini jika kebahagiaan hanya bisa didapat dengan cara mencari kesenangan sebanyak-banyaknya dan menghindari perasaan menyakitkan.

Dalam filsafat, hedonisme adalah aliran yang menganggap bahwa kebahagiaan adalah hal terpenting dalam hidup, dan menegaskan jika kebahagiaan dapat dicapai melalui pemenuhan kebutuhan dan hasrat pribadi. Aliran ini turut berpendapat bahwa kebahagiaan seharusnya menjadi tujuan utama dalam hidup seseorang dan segala sesuatunya akan memiliki nilai jika mampu membuat kita bahagia.

Sedangkan pemaknaan kata hedonisme dalam gaya hidup mengacu pada tindakan dan kebiasaan yang berfokus pada pemenuhan hasrat dan kenikmatan pribadi, seperti berlebihan dalam konsumsi makan, minum, dan belanja, serta menghabiskan waktu dan uang untuk aktivitas yang hanya memuaskan keinginan pribadi (Umi Zuhriyah, 2023).

Dari pengertian yang ada ini dapat kita

simpulkan jika hedonisme adalah gaya hidup yang fokus pada kenikmatan serta kepuasan pribadi tanpa mementingkan dampaknya terhadap diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Hedonisme sangat erat kaitannya dengan kekayaan, kenikmatan batin, kekuasaan, kebebasan, dan sebagainya.

Hedonisme adalah pandangan yang menganggap bahwa setiap kesenangan dan kenikmatan dalam bentuk materi merupakan tujuan utama dalam hidup seseorang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2023). Hedonisme sebagai doktrin yang menyatakan jika kesenangan adalah hal yang paling penting di dunia. Kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia (Collin Gem, 1993). Hedonisme adalah sesuatu yang dianggap baik, sesuai dengan kesenangan yang didatangkannya (Burhanuddin, 2010). Hedonisme merupakan suatu anggapan bahwa kesenangan atau kenikmatan adalah tujuan akhir hidup dan yang baik yang tertinggi (Pospoprodijo, 2010).

Gaya hidup hedonis merupakan suatu dorongan individu untuk berperilaku dengan memegang prinsip kesenangan duniawi (Benthem, 2004).

Gaya hidup adalah kegiatan dimana individu dapat menghabiskan waktu yang dimilikinya serta menghamburkan uang dengan cuma-cuma (Engel, Blackwell, & Miniard, 1994).

Jadi dapat kita tarik kesimpulannya bahwa gaya hidup hedonisme adalah kesenangan pribadi yang berlebihan dan merupakan kebiasaan yang buruk.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. ASN dipilih dan diangkat untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7 Core Value "BerAKHLAK" adalah

merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya *Core Values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014) tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Core Value “BerAKHLAK” adalah sebagai berikut :

1. Berorientasi Pelayanan: Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, Melakukan perbaikan tiada henti;
2. Akuntabel: Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;
3. Kompeten: Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah., Membantu orang lain belajar, Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
4. Harmonis: Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, Suka menolong orang lain, Membangun lingkungan kerja yang kondusif;
5. Loyal: Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara;
6. Adaptif: Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, Bertindak proaktif;
7. Kolaboratif: Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, Terbuka dalam bekerja

sama untuk menghasilkan nilai tambah, Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ranti Tri Ansaraini dan Fauzan Heru Santoso 2017) “Hubungan Antara Gaya Hedonis Dengan Perilaku Konsumtif Pada Remaja” menyatakan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara gaya hidup hedonisme dengan perilaku konsumtif remaja.

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “gaya hidup hedonisme dikalangan mahasiswa universitas sam ratulangi” menyatakan bahwa terdapat hubungan hedonisme dengan perilaku gaya hidup” (Vionnalito Jennyya dan Maria Heny Pratiknjo, 2021).

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh (Adinda Vira Eka Reynata dan Reza Fantino, 2022) “Perubahan Gaya Hidup Hedonisme Pada Kalangan Mahasiswa Rantau di Kota Surabaya” menyatakan bahwa terdapat perubahan gaya hidup yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi Nur Ambadra, 2018) “Gaya Hidup Hedonis Pada Mahasiswa” menyatakan bahwa gaya hidup pada mahasiswa adalah adanya rasa ingin selalu hidup enak, instan, tidak mau ribet akan satu hal.

Berdasarkan penelitian oleh Sri Ratna Sari, Sriandriani, dan Putri Reno Kemala Sari, 2021) dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Keuangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Wanita di Sumbawa Besar” menyatakan bahwa hubungan ini mengandung arti bahwa semakin baik atau tinggi literasi keuangan, maka akan semakin tinggi atau baik perilaku keuangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dikawasan Sumbawa Besar.

Hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti pada bulan September 2023 dengan Kepala Puskesmas UPT. Puskesmas Tanjung Binga

mengatakan bahwa ASN dengan hedonisme ada kaitannya terlebih untuk ASN yang sudah memiliki jabatan mereka ingin terlihat “wah” “berwibawa” “keren” dan “bergengsi” itulah yang mencerminkan mereka menganut hedonisme jadi bisa dijadikan pribahasa yaitu “besar pasang dari pada tiang”. Menurut beliau hedonisme itu sendiri adalah buang-buang duit sesuatu yang tidak mempunyai manfaat sama sekali hanya mengandalkan gengsi beli memberikan contoh salah satunya sebagai berikut “mau punya tas bermerk biar kelihatan WAH padahal mau berapapun harga nya kegunaan dan manfaat tas adalah untuk menyimpan keperluan seseorang “SAMA” dan maaf saya bukan penganut itu karena tidak sesuai dengan pendapatan.

Hasil wawancara dengan Kasubag. TU UPT. Puskesmas Tanjung Binga mengatakan bahwa hedonisme rasa tidak pernah puas, punya ambang rasa senang yang tinggi bahkan tidak terjangkau, selalu merasa kurang dan dekat dengan kufur. Menurut beliau perilaku hedonisme terhadap gaya hidup beliau sebagai ASN itu terlalu sulit beliau memilih membatasi diri serta tidak mengikuti trend apalagi terkait gaya maunya jadi *trend setter* dan memilih realitas saja tetapi beliau tidak pernah memandang yang aneh terhadap orang-orang yang terlihat hedon dan beliau tidak anggap mereka mampu dan beliau tidak. Selogan hidup beliau adalah “*life is a choice*”.

Hasil wawancara dengan salah satu dokter di UPT. Puskesmas Tanjung Binga mengatakan bahwa hedon yang dia miliki tidak didapat dari hasil beliau dari menjadi ASN tetapi dari hasil kerja keras sendiri dengan membuka praktek klinik sendiri.

Hal ini diperkuat dari hasil observasi langsung peneliti pada bulan September 2023 kebiasaan yang sering dilihat adalah jika mengambil cuti pegawai lebih memilih melakukan perjalanan keluar kota bersama keluarga ketempat tempat baru untuk menghabiskan masa cuti bersama

keluarga mereka dan ada beberapa yang memilih wisata lokal atau memilih *Staycation* disalah satu hotel bahkan berlibur ke luar negeri tetapi itu tidak dilakukan terus menerus. Pada sebgaiian ASN lainnya mengatakan gaya hidup hedon yang mereka miliki tidaklah semata-mata hanya mengandalkan sebagai ASN tetapi mereka mempunyai usaha-usaha tersendiri misalkan membuka praktek sendiri, mempunyai apotik sendiri, mempunyai perkebunan, dan usaha kecil lainnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena akan melakukan pendekatan yang meneliti kehidupan hedonisme pada kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di UPT. Puskesmas Tanjung Binga. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mendapatkan informasi secara mendalam dan lengkap dari data yang telah dikumpulkan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara untuk mengumpulkan informasi lebih jauh. Maka pertanyaan yang diajukan akan memiliki format yang terbuka, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Peneliti harus berusaha masuk dan memahami gambaran konseptual para informan yang diteliti agar dapat memahami apa serta bagaimana suatu makna dikembangkan oleh mereka dalam peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari.

Lokasi penelitian ini berada di Kepulauan Bangka Belitung tepatnya di Belitung desa Tanjung Binga dan melakukan observasi terhadap pegawai UPT. Puskesmas Tanjung Binga Aparatur Sipil Negara (ASN) UPT. Puskesmas Tanjung Binga Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki pola hidup hedonisme alasan penulis memilih pegawai UPT. Puskesmas Tanjung Binga karena UPT. Puskesmas Tanjung Binga adalah tempat kerja penulis saat ini.

Gambaran Partisipan EM.

Partisipan pertama adalah seorang apoteker berinisial EM bekerja di UPT. Puskesmas Tanjung Binga dengan masa kerja 5-7 tahun. Partisipan berjenis kelamin perempuan dan berusia 35 tahun. Berstatus menikah dengan 2 orang anak.

Partisipan kedua adalah seorang ahli kesehatan masyarakat berinisial PP bekerja di UPT. Puskesmas Tanjung Binga dengan masa kerja 5-7 tahun. Partisipan berjenis kelamin perempuan dan berusia 35 tahun. Berstatus menikah dengan 2 orang anak.

Partisipan ketiga adalah seorang dokter gigi berinisial EVC bekerja di UPT. Puskesmas Tanjung Binga dengan masa kerja 2-5 tahun. Partisipan berjenis kelamin perempuan dan berusia 32 tahun. Berstatus belum menikah.

Partisipan keempat adalah seorang dokter umum berinisial PM bekerja di UPT. Puskesmas Tanjung Binga dengan masa kerja 2-5 tahun. Partisipan berjenis kelamin perempuan dan berusia 30 tahun. Berstatus menikah dengan 1 orang anak.

Partisipan kelima adalah seorang sarjana komunikasi berinisial IP bekerja di UPT. Puskesmas Tanjung Binga dengan masa kerja 3-5 tahun. Partisipan berjenis kelamin perempuan dan berusia 30 tahun. Berstatus belum menikah.

Partisipan keenam adalah seorang ahli kesehatan masyarakat berinisial I bekerja di UPT. Puskesmas Tanjung Binga dengan masa kerja 1-3 tahun. Partisipan berjenis kelamin perempuan dan berusia 25 tahun. Berstatus belum menikah.

Tabel 1.
Partisipan.

No	Subjek	Usia	Pekerjaan	Pendidikan	Status
1	EM (Perempuan)	35	PNS	S1 (APOTEKER)	MENIKAH
2	PP (Perempuan)	35	PNS	S2 (SKM)	MENIKAH
3	EVC (Perempuan)	32	PNS	S1(DOKTER GIGI)	BELUM MENIKAH
4	PM (Perempuan)	30	PNS	S1 (DOKTER UMUM)	MENIKAH
5	IP (Perempuan)	30	HONOR DAERAH	S1 (KOMPUTER)	BELUM MENIKAH
6	I (Perempuan)	25	HONOR DAERAH	S1(SKM)	BELUM MENIKAH

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara semi intrastuktur yaitu dengan menyusun *guide interview* atau panduan wawancara terlebih. Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “ gaya hidup hedonisme pada mahasiswa” (Dewi Nur Ambadra, 2018) menjelaskan bahwa gaya hidup hedonis pada

mahasiswa adalah adanya rasa ingin selalu hidup enak, instan, dan tidak mau ribet. Semua keinginan dan kemauan yang selalu terpenuhi membuat subjek memiliki gaya hidup yang tidak mau susah. Adapun garis besar pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

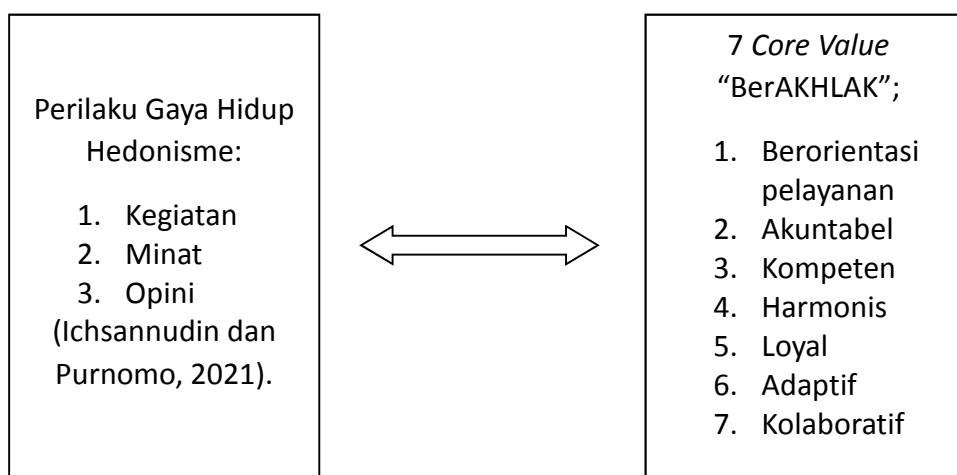
Tabel 2.
Guide Interview.

No	Aspek	Pertanyaan
1	Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan apa saja yang anda lakukan diwaktu luang? 2. Seberapa sering anda pergi keluar rumah ? 3. Berapa kali anda makan/minum di kafe atau restoran dalam seminggu? 4. Berapa uang yang anda habiskan untuk sekali makan minum di kafe atau restoran? 5. Biasanya anda pergi keluar rumah bersama siapa saja?
2	Minat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hal-hal apa saja membuat anda tertarik untuk melakukan sesuatu? 2. Apakah anda mengikuti mode terbaru? 3. Berapa banyak barang <i>branded</i> yang anda miliki? 4. Barang dengan kualitas seperti apa yang anda minati? 5. Dimana saja anda pergi rekreasi? 6. Apa yang anda lakukan jika menginginkan sesuatu?
3	Opini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang anda rasakan ketika membeli barang <i>branded</i>? 2. Hal-hal apa saja yang diperlukan atau harus dilakukan untuk menunjang gaya hidup anda? 3. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan atau keinginan anda ? 4. Model transaksi pembayaran yang seperti apa yang anda sukai? 5. Apa harapan anda untuk kehidupan anda?

C. KERANGKA TEORI ATAU KERANGKA KONSEP

Kerangka konsep pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.
Kerangka konsep.



Pada teori perilaku gaya hidup hedonisme (Ichsannudin dan Purnomo, 2021) yaitu kegiatan, minat, opini. Gaya hidup berkaitan erat dengan perkembangan

zaman dan teknologi. Semakin bertambahnya zaman canggih teknologi, maka semakin berkembang pula penerapan gaya hidup oleh manusia dalam kehidupan

sehari-hari. Aspek-aspek gaya hidup hedonisme antara lain:

1. Kegiatan.

Tindakan nyata seperti banyak menghabiskan waktu diluar rumah, lebih banyak membeli barang-barang yang kurang diperlukan, pergi ke pusat perbelanjaan dan kafe. Walaupun tindakan ini dapat dipahami, tetapi kegiatan ini tidak dapat diukur secara langsung;

2. Minat.

Seperti hal dalam berpenampilan, makanan, benda-benda mewah, tempat kumpul, dan selalu ingin jadi pusat perhatian;

3. Opini.

Adalah “jawaban” lisan atau tertulis yang diberikan sebagai respon terhadap situasi stimulasi dimana semacam “pertanyaan” diajukan. Opini digunakan untuk mendeskripsikan pemikiran, harapan, dan evaluasi dalam perilaku.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas hedonisme sendiri mencakup banyak hal, namun gaya hidup Hedonisme yang sering kita temui pada para ASN adalah liburan keluar kota bersama keluarga, belanja *Online*, *Staycation* di hotel, berlibur keluar negeri bagi sebagian ASN tetapi mereka hedon bukan hasil dari sebagai ASN tetapi sebagian dari mereka memiliki usaha sendiri, membuka praktek sendiri, memiliki perkebunan sendiri, mempunyai apotik sendiri dan memiliki usaha kecil lainnya dikarena kan pendapatan yang mereka dapatkan lebih besar dari pada sebagai ASN. Akar masalah gaya hidup dan perilaku hedon berasal dari cara pandang /*mindset* tentang tujuan hidup dan nilai-nilai yang diyakini. Mereka yang bergaya hidup hedon sebenarnya sedang mengalami *hedonic treadmill*, yaitu orang yang berlari dan mengejar kesenangan namun tetap berada di tempat. Hedonisme ASN paling dapat dilihat seperti nongkrong di *Cafe-Cafe*, *Staycation* hotel, warung-

warung kopi dimana yang kita ketahui, bahwa belitung ini memiliki lebih dari 1001 warung kopi dengan *Cafe-Cafe Modern* kekinian yang digemari oleh anak muda. Mereka selalu menghabiskan waktu mereka ditempat itu.

Sifat pribadi dari seorang ASN yang cenderung sering menghambur-hamburkan uang hanya untuk bersenang-senang tanpa tujuan pasti. Hidup mereka bahagia dan akan terus mencari kesenangan itu sampai mereka merasa puas. hal ini bisa menjadi dampak positif karena bisa menghilangkan stres akibat tugas dan tanggung jawab yang menumpuk. Menurut Collis Gem (1993) hedonisme adalah sebuah pengertian dari doktrin yang mengatakan bahwa kesenangan adalah hal yang sangat penting dari hidup.

Gaya hidup Hedonisme ini tidak menutup kemungkinan untuk mereka lepas dari tanggung jawab mereka sebagai ASN dikarenakan tidak semua kehedonan yang mereka capai merupakan hasil dari pendapatan sebagai ASN. Mereka tetap menerapkan 7 (Tujuh) *Core Value* dalam bekerja tetap profesional dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka sebagai seorang ASN. Mungkin untuk ASN dikalangan kepulauan seperti kami tingkat hedonisme hanya sekedar bersantai di *Cafe-Cafe* atau tempat lainnya, menginap di penginapan bersama keluarga, jalan-jalan ke wisata pantai diluar itu mungkin itu kesenangan yang bisa diambil karena realitas saja hidup ada di tangan kita sendiri. Dapat kita tarik kesimpulannya hedonisme bisa menjadi dampak positif jika bisa mengatasinya dengan baik namun bisa berubah menjadi dampak buruk jika hedonisme tidak disikapi dengan baik. Kegiatan nongkrong bukanlah kegiatan istimewa serta sering kita temukan dalam kehidupan setiap orang, namun terdapat perbedaan bagi ASN satu dengan lainnya. Cara pandangan mengenai hedonisme dikalangan ASN sangatlah bervariasi, berbeda-beda pula. Mungkin ada sebagai

ASN yang mengatakan bahwa keluar negeri adalah hal yang wajib untuk menyenangkan kehidupannya, ada pula yang mengatakan membeli tas *branded* adalah hal yang mewah, ada pula yang mengatakan bahwa semua itu tergantung dari pemikiran dan keinginan masing-masing pribadi.

Dari pernyataan-pernyataan yang telah peneliti tuangkan pada saat wawancara maka dapat kita simpulkan jawaban dari keenam partisipan kita terhadap judul:

“KAITAN 7 CORE VALUE “BerAKHLAK” dengan PERILAKU GAYA HIDUP HEDONISME APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)”.

Tabel 3.

Pertanyaan pertama “Sering berbelanja melalui *online*”.

Partisipan	Jawaban
1	Ya karena lebih praktis
2	Ya karena tidak ribet
3	Ya karena malas keluar panas
4	Tidak
5	Ya karena lebih menghemat waktu
6	Ya karena lebih mudah

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa partisipan mengatakan;

“Ya lebih hemat aja, lebih praktis dan ga perlu berpanas-panasan ke pasar cukup punya kuota ajah” (P1)

“Ya karena tidak ribet” (P2)

“Ya karena malas keluar panas” (P3)

“Tidak” (P4)

“Ya karena lebih menghemat waktu” (P5)

“Ya karena lebih mudah” (P6)

Keenam partisipan memilih berbelanja online karena mereka merasa lebih praktis, tidak ribet, tidak keluar rumah, menghemat waktu dan lebih mudah, tetapi ada salah satu informan yang mengatakan “TIDAK”.

Pertanyaan kedua “Merasa setiap kegiatan harus diabadikan di media sosial”;

“Tidak” (P1)

“Tidak” (P2)

“Tidak” (P3)

“Tidak” (P4)

“Tidak” (P5)

“Ya” (P6)

Pertanyaan ketiga “Merasa ingin membeli sesuatu setelah barang-barang di media sosial”;

“Ya” (P1)

“Tidak karena belum tentu barang tersebut dibutuhkan” (P2)

“Tidak” (P3)

“Tidak mungkin tidak dibutuhkan” (P4)

“Tidak” (P5)

“Tidak ga penting ya ga dibeli” (P6)

Pertanyaan keempat “Memiliki ketergantuan dengan kuota *internet* atau *wifi*”;

“Tidak” (P1)

“Tidak” (P2)

“Ya karena kebutuhan untuk mengetahui info info *terupdate*” (P3)

“Ya pentinglah” (P4)

“Ya karena kalo ga punya itu gabisa mengetahui informasi” (P5)

“Ya karena mengetahui zaman dan info *terupdate* dari sini” (P6)

Pertanyaan kelima “*gadget* sudah menjadi barang yang sangat penting”;

“Ya media berkomunikasi” (P1)

“Ya” (P2)

“Ya sangat penting untuk menerima dan memberi informasi” (P3)

“Ya” (P4)

“Ya sumber informasi” (P5)

“Ya” (P6)

Pertanyaan keenam “memiliki geng”;

“Tidak” (P1)

“Tidak” (P2)

“Tidak” (P3)

“Tidak” (P4)

“Tidak” (P5)

“Tidak” (P6)

Pertanyaan ketujuh “teman mempengaruhi dalam mengikuti *trend*”;

- “Tidak” (P1)
- “Tidak” (P2)
- “Tidak” (P3)
- “Tidak” (P4)
- “Tidak” (P5)
- “Tidak” (P6)

“Tidak” (P1)

- “Tidak” (P2)
- “Tidak ada mall” (P3)
- “Tidak” (P4)
- “Tidak disini tidak ada *mall* adanya warung kopi” (P5)
- “Ya” (P6)

Pertanyaan ketujuh “teman mempengaruhi dalam mengikuti *trend*”;

- “Tidak” (P1)
- “Tidak” (P2)
- “Tidak” (P3)
- “Tidak” (P4)
- “Tidak” (P5)
- “Tidak” (P6)

Pertanyaan kesepuluh “teman sering mengajak ke mall atau tempat hangout yang mahal”;

- “Tidak disini ga ada mall” (P1)
- “Tidak” (P2)
- “Tidak” (P3)
- “Tidak” (P4)
- “Tidak” (P5)
- “Ya” (P6)

Pertanyaan kedelapan “memiliki geng yang cenderung memiliki gaya hidup mewah”;

- “Tidak realitas saja” (P1)
- “Tidak” (P2)
- “Tidak” (P3)
- “Ya” (P4)
- “Tidak” (P5)
- “Tidak” (P6)

Pertanyaan kesebelas “memiliki keinginan untuk memiliki *handphone* terbaru”;

- “Tidak pakai saja yang ada toh fungsinya sama kalo hanya untuk gaya-gayaan” (P1)
- “Tidak sama ajah kegunaannya” (P2)
- “Ya harus mengikuti *trend* dong” (P3)
- “Tidak fungsi dan kegunaannya sama saja ” (P4)
- “Tidak fungsinya sama ” (P5)
- “Tidak yang ada aja digunakan ” (P6)

Pertanyaan kesembilan “lebih sering ke *mall* atau ketempat *hangout* atau di rumah”

Tabel 4

Pertanyaan Partisipan.

Pertanyaan	1	2	3	4	5	6
2. Merasa setiap kegiatan harus diabadikan di media sosial	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
3. Merasa ingin membeli sesuatu setelah barang-barang di media sosial	Ya	Tidak karena belum tentu barang tersebut dibutuhkan	Tidak	Tidak mungkin tidak dibutuhkan	Tidak	Tidak ga penting ya ga beli
4. Memiliki ketergantuan dengan kuota <i>internet</i> atau <i>wifi</i>	Tidak	Tidak	Ya karena kebutuhan untuk mengetahui info-info <i>terupdate</i>	Ya pentinglah	Ya karena kalo ga punya itu ga bisa mengetahui informasi	Ya karena mengetahui zaman dan info <i>terupdate</i> dari sini

5. <i>Gadget</i> sudah menjadi barang yang sangat penting	Ya media berkomunikasi	Ya	Ya sangat penting untuk menerima dan memberi informasi	Ya	Ya sumber informasi	Ya
6. Memiliki geng	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
7. Teman mempengaruhi dalam mengikuti <i>trend</i>	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
8. Memiliki geng yang cenderung memiliki gaya hidup mewah	Tidak realitas saja	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
9. Lebih sering ke <i>mall</i> atau ketempat <i>hangout</i> atau di rumah	Tidak	Tidak	Tidak ada mall	Tidak	Tidak disini tidak ada mall adanya warung kopi	Ya
10. Teman sering mengajak ke mall atau tempat <i>hangout</i> yang mahal	Tidak disini tidak ada mall	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
11. Memiliki keinginan untuk memiliki <i>handphone</i> terbaru	Tidak pakai saja yang ada toh fungsinya sama kalo hanya untuk gaya-gayaan	Tidak sama aja kegunaannya	Ya harus mengikuti <i>trend</i> dong	Tidak fungsi dan kegunaannya sama saja	Tidak fungsinya sama	Tidak yang ada saja digunakan
12. Berbelanja ke <i>mall</i> hal yang biasa	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak
13. Perawatan diri adalah hal yang wajar	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
14. <i>Shopping</i> sesuatu kebutuhan	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya
15. Menaiki kendaraan mewah merupakan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

sesuatu yang biasa						
16. Individu yang suka mengikuti tren merupakan penganut hedonisme	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
17. Individu yang menganut hedonisme selalu berusaha mendapatkan apa yang diinginkan	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
18. Merasa gengsi jika tidak memakai barang <i>branded</i>	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
19. Memiliki teman pergaulan itu sangat penting menentukan tingkat popularitas	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
20. Berbelanja diluar kebutuhan termasuk gaya hidup hedonisme	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya

Pertanyaan kedua belas “berbelanja ke *mall* hal yang biasa” dapat kita simpulkan bahwa 3 tiga partisipan menjawab “YA” dan 3 menjawab “TIDAK” jadi menurut partisipan bahwa belanja di *mall* itu hak yang biasa saja.

Pertanyaan ketiga belas “perawatan diri adalah hal yang wajar“. Semua partisipan mengatan ya berarti mereka setuju akan perawatan itu penting.

Pertanyaan keempat belas “*shopping* sesuatu kebutuhan” 3 (tiga) partisipan menjawab ya dan 3 (tiga) partisipan lainnya menjawab “TIDAK”.

Pertanyaan kelima belas “memiliki kendaraan mewah merupakan sesuatu yang biasa”. Semua partisipan menjawab “TIDAK” mereka tidak setuju bahwa memiliki kendaraan mewah itu hal yang biasa.

Pertanyaan keenam belas “individu yang suka mengikuti tren merupakan penganut hedonisme”. Semua partisipan menjawab “TIDAK” yang menunjukkan bahwa mereka bukan penganut hedonismes yang kuat.

Pertanyaan ketujuh belas “individu yang menganut hedonisme selalu berusaha mendapatkan apa yang diinginkan”. 3 (tiga)

menjawab “YA” dan 3 (tiga) menjawab “TIDAK”.

Pertanyaan kedelapan belas “merasa gengsi jika tidak memakai barang *branded*” semua partisipan menjawab “TIDAK”.

Pertanyaan kesembilan belas “memiliki teman pergaulan itu sangat penting menentukan tingkat popularitas”. Semua jawaban partisipan “TIDAK” dapat kita tarik kesimpulan bahwa pergaulan bukan satu faktor untuk berhedonisme.

Pertanyaan kedua puluh “berbelanja diluar kebutuhan termasuk gaya hidup hedonisme”. Partisipan menjawab 3 (tiga) “YA” dan 3 (tiga) “TIDAK”.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gaya hidup hedonis pada ASN adalah tidak didapat dari pendapatan mereka sebagai ASN melainkan didapat dari usaha yang mereka dirikan tetapi meskipun itu bereka tetap memagang teguh 7 (Tujuh) *Core Value* dalam bekerja, bertanggungjawab atas pekerjaan, disiplin atas segala pekerjaan yang ada sebagai ASN. Oleh karena itu seluruh ASN harus terus menjaga marwah ASN sebagai pelayan publik yang bertanggung jawab terhadap tugas dan kepercayaan publik yang diberikan. Hedonisme adalah bentuk pengkhianatan terhadap *core values* ASN

BerAkhlak. Mari bentengi diri dari gaya hidup dan perilaku hedon!. Realitas Hidup seorang ASN sangatlah penting. Kegiatan yang dilakukan mengarah pada kesenangan, memiliki ketertarikan terhadap suatu hal yang dianggap penting dan ingin berbeda dengan lingkungan di sekitarnya serta memiliki harapan yang mengarah pada kesenangan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansarni Ranti Tri (2017). Hubungan Antara Gaya Hedonis Dengan Perilaku Konsumtif Pada Remaja. Jakarta.
- Burnaiddin, S. 1997. Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan manusia. Jakarta; Rineka Cipta.
- GEM, C. 1993. Kamus Saku Biologi. Jakarta: PT. Erlangga.
- Ichsannudin dan Pur (2021). Ichsannudin & Hery Purnomo. (2021). Analisis Gaya Hedonis status Sosial Variasi.
- Ichsannudin & Hery Purnomo. (2021). Analisis Gaya Hedonis status Sosial Variasi.
- Ichsannudin & Hery Purnomo. (2021). Analisis Gaya Hedonis status Sosial Variasi.
- Ichasannudin dan Hery Purnomo (2021). Analisis gaya hedonis status sosialvariasi. Produk. Jawa Barat: Media Sains Indonesia.
- Jennyya, V., Pratiknjo, M.H. and Rumampuk, S., 2021. Gaya Hidup Hedonisme di Kalangan Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi. Holistik, Journal Of Social and Culture. ISSN: 1979-0481.
- Nur Dewi (2018). Gaya Hidup Hedonis Pada Mahasiswa. Jakarta.
- Ratna Sri (2021). Pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap perilaku keuangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Jakarta.
- Sari, D. N. (2015). Perbedaan Gaya Hidup Mahasiswa Ditinjau Dari Status Ekonomi Dan Jenis Kelamin Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman. Jurnal Psikologi, 2 (3), 338-347.

- Sepriadi, Antonius. 2010. Pengaruh Gaya Hidup yang Hedonisme dengan Pelanggaran Kode Etik UNILA pada Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung Angkatan 2007-2009. Lampung: Universitas Lampung (UNILA).
- Engel, J. F., Blackwell, R. D., & Miniard, P. W. (1994). Perilaku Konsumen. Jakarta: Bina Pustaka Aksa.
- UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta.
- Vira Adinda Eka (2022). Perubahan Gaya Hidup Hedonisme Pada Kalangan Mahasiswa Rantau di Kota Surabaya. Surabaya.
- Widiatmanti, Herru. (2023). Hedonisme vs *Core Values* ASN. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

BIJAK BERMEDSOS MEMINIMALISASI ASN *FLEXING*

(Be Wise In Using Social Media To Minimize ASN Flexing)

Ria Anggreni

(SD Negeri 6 Kota Pangkalpinang)
e-mail: riaanggreni27@admin.sd.belajar.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang fenomena hidup para Aparatur Sipil Negara (ASN) dewasa ini yang terjebak dalam hedonisme dan *flexing*. Penting untuk diingat bahwa ASN bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya publik dan melaksanakan tanggung jawabnya untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, gaya hidup yang terlalu mewah dan boros dapat dikritik dan memengaruhi reputasi orang dan organisasi yang mereka representasi. Pemerintah biasanya menetapkan standar dan peraturan tentang etika dan perilaku ASN, termasuk bagaimana menggunakan sumber daya publik. ASN diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan efisiensi, dan seringkali ada kontroversi tentang pengeluaran yang tidak perlu atau tidak terkait dengan tugas pemerintah. Sebuah pendekatan yang adil dan seimbang diperlukan untuk mengatasi gaya hidup hedonisme ASN dan ASN harus bijak dalam memosisikan diri sebagai publik figur dengan bijak dalam menggunakan media sosial.

Kata Kunci: Bijak Bermedsos, ASN, *flexing*.

ABSTRACT

This article discusses the phenomenon of the lives of today's State Civil Servants (ASN) who are trapped in hedonism and flexing. It is important to remember that ASN is responsible for the use of public resources and carries out its responsibilities in the public interest. Therefore, overly luxurious and extravagant lifestyles can be criticized and affect the reputation of the people and organizations they represent. The government usually sets standards and regulations on ASN ethics and behavior, including how to use public resources. ASNs are expected to carry out their duties with integrity and efficiency, and there is often controversy about spending that is unnecessary or unrelated to government duties. A fair and balanced approach is needed to overcome ASN's hedonistic lifestyle and ASN must be wise in positioning themselves as public figures wisely in using social media.

Keywords: *Be wise in using social media, ASN, flexing.*

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, para Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sorotan masyarakat luas. Hal ini berkaitan dengan gaya hidup sebagian besar ASN yang cenderung memamerkan harta dan kemewahan, sehingga menimbulkan kemirisan bagi masyarakat yang ASN maupun yang bukan ASN.

ASN menyukai publisitas dan media sosial sangat penting untuk kehidupan modern termasuk ASN karena memungkinkan orang untuk menunjukkan kehidupan mereka kepada umum, yang dapat mendorong ASN untuk pamer agar terlihat lebih baik dan lebih bahagia. (Laksamana, 2018)

Pada dasarnya, manusia ingin diakui dan diterima oleh orang lain. Memenuhi kebutuhan ini dapat dicapai melalui pamer; ASN yang pamer ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka sukses dan kaya. (Laksamana, 2018)

Kompleksitas psikologis, seperti rasa tidak aman atau rendah diri, juga dapat menyebabkan pamer. ASN yang pamer mungkin tidak puas dengan kehidupannya, sehingga mereka berusaha menutupi kekurangan mereka dengan menunjukkan apa yang mereka miliki.

Ekspresi kekayaan para pejabat publik dan keluarganya dengan *flexing* di media sosial menjadi perhatian publik. Dinilai bahwa peristiwa ini tidak etis dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Memang menjadi hak si ASN untuk menjadi kaya, apalagi didapat dengan cara yang benar dan wajar. Tetapi kembali etika moral seorang ASN untuk peka dalam kondisi perekonomian yang saat ini tidak menentu pasca *Covid-19*.

Seperti kasus yang viral dan menyita banyak perhatian, yaitu yang menimpa seorang mantan pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Awal terkuaknya harta tidak wajar dari sosok ini justru dari anaknya yang tersandung kasus penganiayaan dan harus berurusan dengan hukum. Mata jeli netizen mengaitkan perilaku nakal dengan hedonnya seorang anak pejabat yang berstatus PNS di media sosial karena cenderung pamer sehingga mengakibatkan krisis moral.

Mantan pejabat ini menjadi sasaran kecurigaan masyarakat karena statusnya tidak berimbang dengan harta yang diperoleh. Kalkulasi pendapatan seorang pejabat ini ibarat bom, meledak ketika terkuak. Instansi ini sudah menjadi rahasia umum sebagai lahan “basah” atau ladang duit bagi pegawainya apalagi pejabatnya.

Hal ini terbukti ketika diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), banyak aliran dana dan transaksi perbankan yang mencurigakan. Usut diusut, mantan pejabat ini menerima gratifikasi dari wajib pajak ketika menjabat.

Kasus yang sangat menggemparkan dan menimpa DJP merembet ke instansi lainnya. Seperti istri pejabat yang memakai tas mewah, walaupun bukan niatan untuk pamer di Instagram, akibat dari kasus mantan pejabat DJP ini maka berimbas pula kepada yang bersangkutan. Pihak-pihak yang berlawanan menyerang di postingan, lalu mengulik harga tas mewah dan tentunya ke pendapatan sang suami. Apalagi saat ini menjadi tahun politik dan menjadi kerawanan seorang calon pemimpin daerah dicari-cari kesalahannya.

Salah satu konsekuensi negatif dari kasus ini adalah munculnya tuduhan bahwa istri pejabat di kantor lain juga memiliki gaya hidup mewah. Salah satu contohnya adalah istri pejabat di suatu wilayah yang mengunggah foto di Instagram dirinya mengenakan tas mewah. Pihak yang berlawanan kemudian menyerang postingan tersebut.

Pihak berlawanan menyatakan bahwa istri pejabat tersebut melakukan pamer kekayaan. Selain itu, mereka

mempertimbangkan biaya tas mewah tersebut dan membandingkannya dengan pendapatan sang suami. Istri pejabat tersebut jelas tidak senang dengan tuduhan tersebut. Ia tidak terlibat dalam kasus mantan pejabat DJP; ia hanya mengunggah foto dirinya mengenakan tas mewah tersebut dan didapat dari penghasilan atau tabungan.

Unggahan istri pejabat di media sosial menjadi sasaran serangan karena kasus tersebut sedang hangat dibicarakan imbas dari kasus yang mencuat sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun politik, seorang calon pemimpin daerah lebih peka dan bijak bermedsos karena rentan dicari kesalahannya.

Sudah jelas bahwa setiap orang memiliki hak untuk menikmati hasil kerja mereka dan membelanjakan uang mereka dengan cara yang mereka sukai selama itu dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan hukum. Tidak ada yang salah dengan bekerja keras dan ingin menikmati pengalaman atau barang yang mereka sukai. (Febriani & Dewi, 2019).

Seseorang dalam menjaga keseimbangan, bagaimanapun, dan mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan etika pribadi adalah penting (Natika & Septianti, 2023). Seorang pejabat atau pegawai negeri yang menikmati pengalaman mewah atau barang mewah mungkin dianggap pamer atau kurang sensitif terhadap keadaan sosial yang sulit bagi banyak orang.

Seseorang harus memiliki kesadaran sosial dan empati terhadap orang lain yang mungkin kurang beruntung jika mereka berhak atas kebahagiaan pribadi dan kesenangan. Ini dapat membantu menghindari perselisihan atau perasaan negatif dari rekan kerja atau masyarakat. Integritas dan etika pribadi penting, terutama ketika bekerja untuk pemerintahan atau organisasi yang membantu orang lain. (Tan, 2018). Pada artikel ini, penulis membahas tema

Fenomena Hidup Mewah (Hedonisme dan *Flexing*) para Aparatur Sipil Negara dengan judul “Bijak Bermedsos Meminimalisasi ASN *Flexing*”.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan subjek berdasarkan informasi aktual. (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018) karena ingin menggali informasi mendalam, penelitian ini menerapkan metode deskriptif tentang gaya hidup *flexing* yang dipamerkan di media sosial.

1. Jenis Penelitian.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yang adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan subjek dengan menggunakan data aktual. (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018) Karena ingin menggali informasi mendalam, penelitian ini menerapkan metode deskriptif tentang gaya hidup ASN yang *flexing*. Peneliti adalah instrumen kunci dalam studi ini, seperti halnya dalam studi kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian digunakan untuk mendeskripsikan secara umum pentingnya bijak dalam bermedia sosial untuk meminimalisasi gaya hidup *flexing*. Pendekatan analisis dilakukan untuk mengetahui dampak positif bijak bermedia sosial. Untuk mendapatkan kesimpulan tentang subjek yang diteliti, data akan dikumpulkan dan ditafsirkan.

3. Metode Pengumpulan Data.

Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan yang relevan dengan penelitian ini dan studi literatur (Moleong, 2017). Informan yang diwawancarai adalah ASN yang terindikasi

melakukan *flexing* dan ASN yang tidak melakukan *flexing*.

4. Analisis Data.

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data. Analisis deskriptif tidak menguji hipotesis atau membuat kesimpulan tentang hubungan antarvariabel; sebaliknya, ia bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan. (Ramdhan, 2021).

Dalam analisis kualitatif, kata-kata seperti deskripsi, interpretasi, dan analisis digunakan untuk menggambarkan data. (Octaviani & Sutriani, 2019).

C. KERANGKA TEORI

1. Bijak Bermedsos.

Media sosial merupakan sarana komunikasi dan informasi yang sangat populer saat ini. Media sosial dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari menjalin komunikasi dengan teman dan keluarga, mencari informasi, hingga berbisnis. (Haniza, 2019).

Kehidupan kontemporer sangat bergantung pada media sosial dan ASN harus memahami cara menggunakannya dengan benar agar tidak berdampak buruk pada masyarakat, organisasi, atau dirinya sendiri.

Penggunaan media sosial dengan bijak menjadi perhatian yang penting. Informasi yang beredar di media sosial tidak selalu benar. Informasi yang salah dapat menimbulkan keresahan dan konflik sosial. Penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat menyebabkan kecanduan. Kecanduan media sosial dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menimbulkan masalah kesehatan mental, sehingga pentingnya literasi digital bagi pengguna media sosial. (Simarmata et al., 2019).

Literasi digital mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang diperlukan untuk memanfaatkan

teknologi informasi sebagai alat bantu produktif dalam belajar, bekerja, dan melakukan aktivitas lainnya. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kognitif SDM Indonesia sehingga mereka tidak hanya dapat menggunakan gawai. (Sulianta, 2020).

Lima Visi Presiden untuk Indonesia telah mempercepat literasi digital: pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, keterbukaan investasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Presiden juga telah memberikan lima (5) arahan untuk mempercepat transformasi digital: peningkatan akses dan peningkatan infrastruktur digital, peta jalan transformasi digital di sektor strategis, dan percepatan integrasi digital. (Fatoni, 2022).

Empat (4) PILAR Literasi Digital terdiri dari Kemampuan Digital, yang mencakup kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital; Etika Digital, yang mencakup kemampuan seseorang untuk menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika; dan Keamanan Digital, yang mencakup kemampuan seseorang untuk mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, dan meningkatkan kesadaran akan keamanan dan bahaya. (Estiningsih, 2023).

Saat ini, era transformasi digital memerlukan keterampilan *soft skill* dan teknik yang kuat. Di tahun 2020, penggunaan *internet* di Indonesia naik 64%, atau 175,4 juta pengguna aktif, dan 338,2 juta orang menggunakan layanan *mobile*, dengan 59% pengguna aktif menggunakan media sosial (*We Are Social*, 2020 dalam Durhan, 2021). Pada saat yang sama, peningkatan signifikan jumlah pengguna menyebabkan peningkatan penyalahgunaan *internet* dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Fakta bahwa sejak tahun 2008, lebih

dari 144 orang telah dihukum atas pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terutama yang berkaitan dengan berita palsu dan ujaran kebencian di media sosial, merupakan contoh penggunaan *internet* di Indonesia. Selain itu, hingga 31 Desember 2020, Kementerian Kominfo telah memblokir 1.858.554 konten di situs web, sebagian besar di antaranya merupakan situs pornografi. (Kominfo, 2019).

Tindakan pemerintah ini menunjukkan bahwa kemajuan TIK dan *Internet* di Indonesia tidak selalu menguntungkan, literasi digital sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan ASN pada khususnya.

Hal ini merupakan kesiapan ASN memenuhi kewajibannya menjalankan tugas pokok fungsi melalui digital. Kesehariannya tidak terlepas dari kata kata dan tingkah laku digital. Oleh karena itu tanggungjawab ASN adalah berat dan inilah tantangan untuk mewujudkan Indonesia melek digital dan ASN Cakap digital. (Sumiati, 2022).

Kajian teori bijak media sosial adalah cara untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Beberapa prinsip teoritis yang mendasarinya termasuk: (Mukarom, 2020).

- a. Teori Kesadaran Diri (Self-awareness): Teori ini membahas bagaimana orang menggunakan media sosial dan bagaimana mereka mengevaluasi apa yang mereka *posting* dan bagaimana hal itu berdampak pada mereka. Kesadaran diri membantu orang menghindari tindakan impulsif atau tidak bijak di media sosial.
- b. Teori Privasi dan Batasan (*Privacy and Boundaries*): Teori ini menekankan betapa pentingnya menjaga privasi dan menetapkan batasan yang sehat untuk penggunaan media sosial. Ini termasuk mempertimbangkan jenis informasi pribadi mana yang boleh atau tidak dibagikan secara *online*.
- c. Teori Tanggung Jawab Sosial: Teori ini

mendorong orang untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka di media sosial terhadap orang lain dan lingkungan sekitar mereka karena dia menekankan tanggung jawab individu terhadap masyarakat dan lingkungan sosial mereka.

- d. Teori Empati: Ide ini mendorong orang untuk berempati terhadap pendapat dan perasaan orang lain. Ini berarti berpikir dua kali sebelum memposting sesuatu di media sosial yang dapat merugikan atau menyinggung orang lain.
- e. Teori Pengembangan Pribadi: Teori ini menekankan penggunaan media sosial sebagai alat untuk pertumbuhan dan pengembangan pribadi. Ini mencakup berbagi pengetahuan, pembelajaran, dan memotivasi diri sendiri dan orang lain.
- f. Teori Interaksi Sosial: Ini menekankan betapa pentingnya memiliki interaksi positif dan membangun hubungan di media sosial. Hal ini termasuk berpartisipasi dalam diskusi yang bermanfaat, mendukung satu sama lain, dan berpartisipasi dalam kolaborasi.

2. Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) diangkat dan dipekerjakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan pegawai pemerintah dengan kontrak yang bekerja untuk lembaga pemerintah adalah jenis pekerjaan yang dipekerjakan oleh ASN dan dibayar oleh pejabat pembina kepegawaian. Pegawai ASN memajukan kebijakan dan pelayanan publik serta mempersatukan bangsa (Prasojo & Rudita, 2014; dan Faedlulloh, 2015). Selain itu, mereka bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi dan profesional (NKRI). (Komara, 2019).

Di Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN) mengacu pada pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja diberbagai lembaga pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. ASN memberikan pelayanan publik,

menjalankan tugas pemerintah, dan mendukung pelaksanaan kebijakan. (Achdiat, 2019).

Beberapa fitur ASN di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS): ASN diangkat sebagai PNS setelah melalui proses seleksi yang panjang dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan lembaga pemerintah yang relevan.
- b. Jabatan Struktural dan Fungsional: ASN dapat mengisi jabatan struktural, yang merupakan jabatan yang sudah ada dalam organisasi pemerintah, atau jabatan fungsional, yang merupakan jabatan yang lebih khusus yang bergantung pada pendidikan atau keahlian individu.
- c. Sistem Kenaikan Pangkat: Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini mengatur sistem kenaikan pangkat ASN.

Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan tugas umum adalah tanggung jawab pegawai ASN juga dalam pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan publik yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; menyediakan layanan publik yang profesional dan berkualitas; dan memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ASN melakukan ini tanpa bantuan politik dan menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. (Indonesia, 2014).

3. *Flexing*.

Dalam bahasa Inggris, "*flexing*" secara harfiah berarti "pamer". Menurut Cambridge Dictionary, *flexi* adalah menunjukkan sesuatu dengan cara yang tidak disukai orang lain. Menurut Kamus Merriam-Webster, "*fleksi*" berarti menunjukkan dengan jelas.

Dalam ilmu ekonomi, perilaku *flexing* didefinisikan sebagai sikap konsumtif yang menonjol yang menghabiskan uang hanya untuk membeli barang mewah dan layanan premium untuk menunjukkan status atau kemampuan finansial mereka. (Arsyad, 2022).

Selain itu, dampak *flexing* bervariasi tergantung pada bagaimana seseorang melakukannya dan bagaimana orang melihatnya. Untuk pelaku sendiri, *flexing* dapat memiliki tujuan positif untuk mengapresiasi diri atas hasil yang mereka capai atau untuk memberikan inspirasi kepada orang lain bahwa dengan usaha, semua orang dapat mencapai hasil yang baik. Namun, dampak negatif dari *flexing* juga dapat membahayakan diri pelaku sendiri, seperti: (Adinda, 2023).

- a. Hidup orang yang *flexing* akan menjadi semakin konsumtif karena mereka berusaha untuk memenuhi atau mendapatkan kesan bahwa mereka adalah orang kaya, sehingga mereka sering membeli banyak hal yang mendukung kesan tersebut;
- b. Jika seseorang tidak dapat membuat dirinya terlihat seperti orang kaya, mereka cenderung melakukan sesuatu di luar kemampuan mereka, seperti nekat berhutang. Jika pelaku tidak dapat membayar hutang mereka atau bahkan melakukan tindakan melanggar hukum seperti penipuan, pencurian bahkan perampokan hanya untuk memenuhi tuntutan gaya hidup mereka, ini akan menjadi masalah besar;
- c. Seseorang yang sangat menyukai *flexing* mungkin tidak lagi mengalami empati. Pelaku *flexing* tidak peduli dengan orang-orang yang miskin dan membutuhkan bantuan karena mereka hanya ingin menunjukkan kekayaan mereka. Jika dilihat secara positif, *flexing* dapat mendorong untuk mendapatkan apa yang diinginkan, tentunya dengan usaha yang baik, tidak merugikan orang lain, dan tidak melanggar hukum. Jika dilihat

secara negatif, *flexing* dapat menimbulkan iri dan dengki, dan bahkan dapat mendorong untuk mendapatkan hal yang sama dengan cara yang tidak baik dan melanggar hukum.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Korelasi antara penggunaan media sosial dengan gaya hidup *flexingnya* ASN sangat berkaitan erat. Banyak orang, termasuk ASN, menggunakan media sosial untuk menunjukkan gaya hidup mereka. Mereka dapat berbagi foto atau cerita tentang pengalaman eksklusif, barang mahal, atau perjalanan mewah. Ini memungkinkan penampilan ASN yang glamor dan hedonistik.

Pengaruh pada Orang Lain: Postingan ASN tentang gaya hidup mewah dapat mempengaruhi rekan kerja dan anggota komunitas untuk mengikuti gaya hidup serupa. Jika pendapatan mereka berasal dari dana publik, ini dapat menjadi masalah karena mengganggu tanggung jawab mereka untuk mengelola sumber daya publik dengan benar.

Kontroversi dan Reaksi Publik: Postingan di media sosial yang menunjukkan gaya hidup yang boros atau tidak sesuai dengan pekerjaan ASN dapat memicu reaksi negatif dari masyarakat, yang dapat menyebabkan kontroversi dan merusak reputasi ASN.

Prinsipnya, setiap karyawan, termasuk ASN, memiliki hak untuk menikmati hasil kerjanya sendiri. Namun, sebagai anggota masyarakat, ASN juga bertanggung jawab untuk menggunakan sumber daya publik dengan bijak dan bertanggung jawab.

Dalam situasi ini, penting bagi ASN untuk mempertimbangkan dampak media sosial terhadap citra dan reputasi mereka serta tanggung jawab mereka kepada masyarakat. Mereka harus menjalankan tanggung jawab mereka dengan jujur dan bijak dalam menggunakan *platform* media sosial untuk memastikan bahwa mereka tidak

merugikan organisasi atau masyarakat yang mereka perwakilkan.

Sangat penting untuk memastikan bahwa ASN menjaga transparansi dalam penggunaan dana publik dan pengeluaran pribadi; selain itu, informasi ini harus tersedia secara publik dan dibawah pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa dana publik tidak digunakan secara tidak sengaja.

Semua tindakan ASN harus diatur oleh kode etik yang jelas, termasuk cara mereka menggunakan sumber daya publik dan menerima hadiah atau suap. Pelatihan dan pendidikan tentang etika, integritas, dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan masyarakat harus diberikan kepada ASN agar mereka lebih memahami pentingnya menjalankan tugas dengan integritas.

Mekanisme pengawasan yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa ASN melakukan pekerjaannya dengan cara yang tepat dan sesuai dengan hukum. Untuk mendorong ASN untuk bertindak jujur, masyarakat harus aktif mengawasi pemerintah dan meminta ASN bertanggung jawab. Kepemimpinan pemerintahan yang baik sangat penting. ASN dapat bertindak lebih etis jika pejabat publik menunjukkan contoh yang baik dan mendukung integritas.

Hal penting untuk diingat bahwa tidak semua ASN menjalani gaya hidup hedonisme; banyak dari mereka melakukan tugas mereka dengan baik dan jujur, tetapi masalah ASN yang menjalani gaya hidup boros dan mewah harus ditangani dengan cermat untuk menjaga akuntabilitas dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

E. PENUTUP

Bersosial media dengan bijak dapat membantu mengedepankan tanggung jawab sosial dan integritas serta meminimalkan gaya hidup hedonisme. Berikut adalah beberapa kesimpulan bijak bermedsos dengan baik:

1. Sadar Diri dan Tujuan Penggunaan: Tentukan alasan Anda menggunakan media sosial. Memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan penggunaan dapat membantu Anda mengurangi keinginan untuk hidup mewah di *internet*.
2. Pertimbangkan privasi Anda. Jangan membagikan semua aspek kehidupan pribadi Anda di media sosial. Pertimbangkan untuk membatasi informasi pribadi Anda dan berpikir dua kali sebelum membagikan informasi yang terlalu pribadi atau berlebihan.
3. Pentingnya Kesederhanaan: Jangan lupa betapa pentingnya menjaga kesederhanaan dalam gaya hidup Anda. Memamerkan pengalaman mewah atau kekayaan tidak perlu. Sebaliknya, berikan pengalaman yang bermanfaat dan inspiratif kepada orang lain.
4. Konteks dan Tanggung Jawab: Jika Anda seorang ASN atau pejabat pemerintah, Anda harus mempertimbangkan konteks sosial dan tanggung jawab Anda. Postingan Anda tentang penggunaan dana publik harus bijak dan terbuka.
5. Empati dan Penerimaan Terhadap Orang Lain: Jangan membuat orang merasa tidak nyaman atau tidak cukup baik hanya karena postingan Anda.

DAFTAR PUSTAKA

- Achdiat, F. M., 2019, Penegakan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri di Kabupaten Cianjur Dihubungkan dengan Prinsip Good Governance, *Skripsi*, Program Hukum Tata Negara, Universitas Pasundan, Bandung.
- Adinda, K. 2023. Flexing di Instagram: Antara Narsisme dan Benefit. *Emik*, 6(1), 68–90.
- Arsyad, J. H. 2022. Fenomena Flexing di Media Sosial dalam Aspek Hukum Pidana. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(1), 10–28.
- Durhan, A. S., 2021, Pengaruh Terpaan Informasi Kasus UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi Pengguna Media Sosial di Kota Makassar, *Tesis*, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Estiningsih, M. 2023. Indonesia Cakap Digital Melalui Kegiatan Literasi Digital Bagi Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). *J-MAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(5), 695–704.
- Fatoni, A. 2022. *A to Z Inovasi Daerah: Selalu Ada Ruang untuk Berinovasi*. Bina Praja Press. Jakarta.
- Febriani, N., & Dewi, W. W. A. 2019. *Perilaku konsumen di era digital: Beserta studi kasus*. Universitas Brawijaya Press. Malang.
- Haniza, N. 2019. Pengaruh Media Sosial terhadap Perkembangan Pola Pikir, Kepribadian dan Kesehatan Mental Manusia. *J. Komun.* 21-31.
- Indonesia, P. R. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*.
- Komara, E. 2019. Kompetensi profesional pegawai ASN (aparatur sipil negara) di Indonesia. *Mimbar Pendidikan*, 4(1), 73–84.
- Laksamana, A. 2018. *Public Relations in the Age of Disruption: 17 Pengakuan Professional PR & Kunci Sukses Membangun Karier pada Era Disrupsi*. Benteng Pustaka. Yogyakarta.
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian kualitatif (Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mukarom, Z. 2020. *Teori-teori komunikasi*. Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati. Bandung.

-
- Natika, L., & Septianti, L. P. 2023. Profesionalisme Aparatur Sipil Negara. *The World of Public Administration Journal*.
- Octaviani, R., & Sutriani, E. 2019. *Analisis data dan pengecekan keabsahan data*.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara. Jakarta.
- Simarmata, J., Iqbal, M., Hasibuan, M. S., Limbong, T., & Albra, W. (2019). *Hoaks dan media sosial: saring sebelum sharing*. Yayasan Kita Menulis. Medan.
- Sulianta, F. (2020). *Literasi Digital, Riset dan Perkembangannya dalam Perspektif Social Studies*. Feri Sulianta.
- Sumiati, I. (2022). *Pengembangan Model Sistem Informasi Administrasi Presensi Dalam Membangun Karakter ASN Berbasis Kinerja*. Tohar Media. Makassar.
- Tan, C.-M. (2018). *Search inside yourself*. Bentang Pustaka. Yogyakarta.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83–90.



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH**

KOMPLEK PERKANTORAN DAN PERMUKIMAN TERPADU PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JL. PULAU BANGKA, AIR ITAM - PANGKALPINANG 33149
Email: pengembangansdm@babelprov.go.id Website: bkpsdmd.babelprov.go.id